



**KEBIJAKAN KEAMANAN INGGRIS : STUDI *NATIONAL SECURITY*
*COUNCIL***

(United Kingdom Security Policy: Study of National Security Council)

SKRIPSI

Oleh

Andenis Surya Jihansyah

NIM: 100910101021

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KEBIJAKAN KEAMANAN INGGRIS : STUDI *NATIONAL SECURITY*
*COUNCIL***

(United Kingdom Security Policy: Study of National Security Council)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Andenis Surya Jihansyah

NIM: 100910101021

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

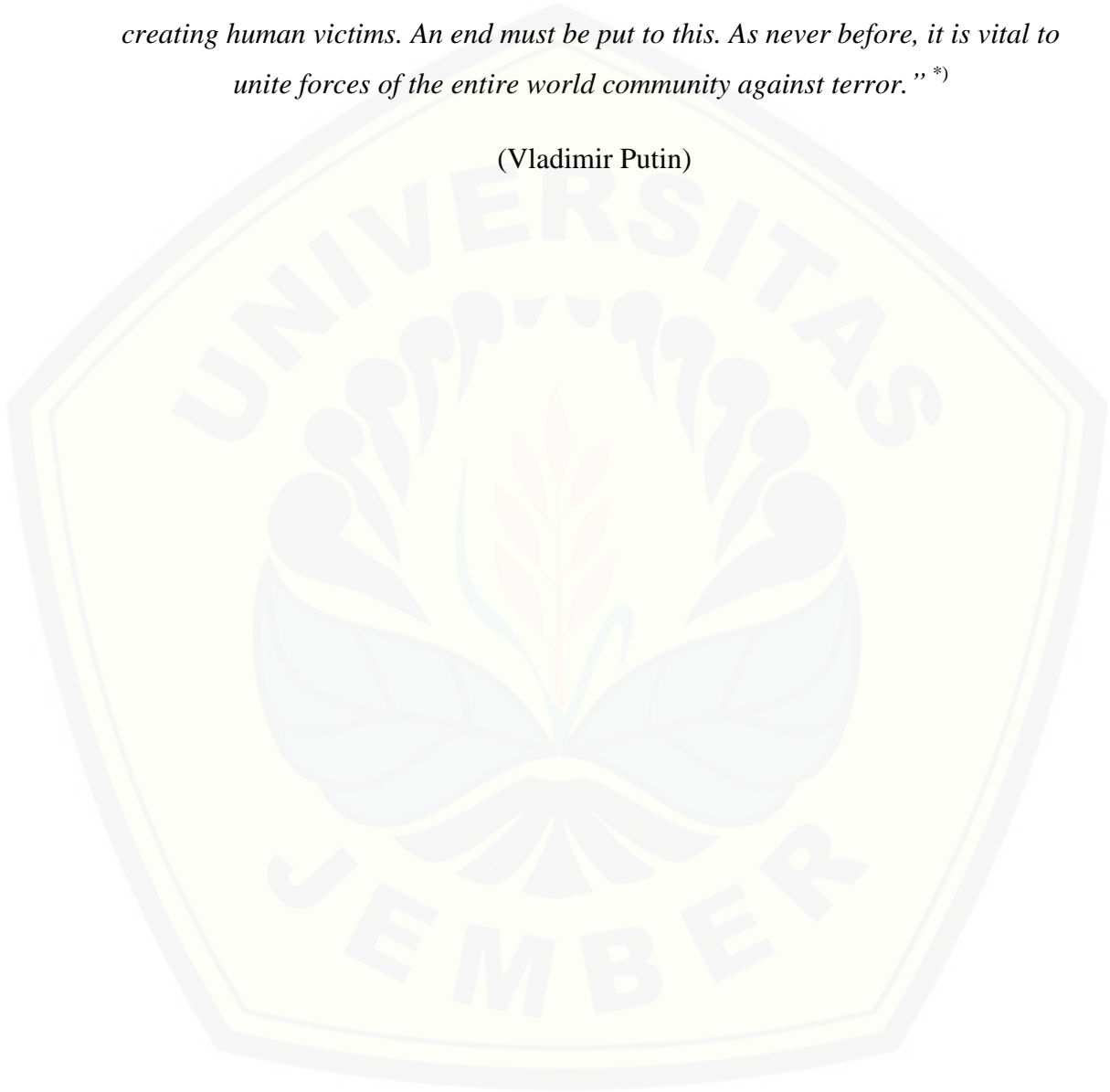
Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Drs.Suryanto dan Ibunda tercinta Sumiarsih;
2. Kedua Saudara Terkasih Penulis, Alm. Andika Surya Bintara dan Anjassafira Surya Salsabilla;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTO

*“Terrorism has once again shown it is prepared deliberately to stop at nothing in creating human victims. An end must be put to this. As never before, it is vital to unite forces of the entire world community against terror.” *)*

(Vladimir Putin)



*) The Irish Times. 2004. World Leader React. <http://www.irishtimes.com/news/world-leaders-react-1.1135175>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andenis Surya Jihansyah

NIM : 100910101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Keamanan Inggris : Studi *National Security Council*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2016
Yang menyatakan,

Andenis Surya Jihansyah
NIM 100910101021

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KEAMANAN INGGRIS : STUDI *NATIONAL SECURITY*
*COUNCIL***

Oleh

Andenis Surya Jihansyah

NIM 100910101021

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Susilo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Keamanan Inggris : Studi *National Security Council*”
telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 05 September 2016

Waktu : 09.30

Tempat : Ruang LKPK FISIP-UNEJ

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP 196010151989031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP 196802291998031001

Anggota I

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si
NIP 197212041999031004

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Kebijakan Keamanan Inggris : Studi *National Security Council*; Andenis Surya Jihansyah; 100910101021; 2016; 116 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia, Inggris tidak lepas dari ancaman dan masalah terkait pertahanan dan keamanan negara. Seperti sebuah negara pada umumnya, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Inggris. Pada segi pertahanan dan keamanan, ancaman bagi Inggris adalah terkait terorisme, kejahatan dunia maya (cybercrime), penyelundupan hingga ancaman di wilayah perbatasan. Masalah lain yang tengah dihadapi oleh pemerintah Inggris adalah berkurangnya pasokan energi untuk konsumsi dalam negeri. Tingginya permintaan pasar terhadap minyak mentah dan gas alam, membuat pemerintah Inggris harus berpikir keras dalam menentukan kebijakan keamanan energinya.

Untuk meneliti respon Inggris penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini menuntut penulis untuk dapat menganalisis data dengan sifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data-data yang ada di dapat dari data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Keamanan Nasional menjadi sebuah forum antar lembaga strategis negara dalam menyusun rencana strategis keamanan nasional yang dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri secara langsung, dengan adanya Dewan Keamanan Nasional ini diharapkan komunikasi antar lembaga strategis negara bisa berjalan lebih efektif. Dengan terjalinnya koordiansi yang efektif antar institusi, maka pemerintah akan dengan mudah menentukan arah kebijakan keamanan negara. Oleh karena itu, pembentukan NSC ditujukan untuk merumuskan kebijakan serta langkah antisipatif terhadap ancaman yang dapat membahayakan bagi stabilitas keamanan dan kedaulatan Inggris khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugrah, keajaiban, rahmat, dan nikmat-Nya yang begitu banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Keamanan Inggris : Studi *National Security Council***” dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Selesaiannya pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si dan Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing selama penulis menyusun skripsi;
3. Adhiningsih P. S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
5. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukungku;
6. Kakak dan Adikku tercinta yang selalu memberi semangat;
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2010 yang telah berjuang bersama dalam memberikan dukungan serta sarannya;
8. Sahabat-sahabat penulis Ewang, Lavina, Rima dan Irfan yang selalu memberi dukungan, dan semangat kepada penulis;
9. Rekan-rekan seperjuangan penulis Ian, Egar, Taufan, Rizki, Wildan, Brian, Edwin, Aldi, dan Irul berkat kalian penulis sering lupa akan tuntutan menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Juli 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSEMBAHAN	II
HALAMAN MOTO	III
SURAT PERNYATAAN	IV
HALAMAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PENGESAHAN	VI
RINGKASAN	VII
PRAKATA	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR SINGKATAN.....	XIII
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP MASALAH	6
1.2.1 <i>Batasan Materi</i>	6
1.2.2 <i>Batasan Waktu</i>	7
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.5 LANDASAN PEMIKIRAN	8
1.5.1 <i>Teori Hubungan Internasional Neo-Realism</i>	8
1.5.2 <i>Konsep Keamanan (Security Concept)</i>	14
1.5.3 <i>Konsep Energy Security</i>	19
1.6 ARGUMEN UTAMA.....	21
1.7 METODE PENELITIAN.....	21
1.7.1 <i>Teknik pengumpulan data</i>	22
1.7.2 <i>Teknik analisis data</i>	22
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.....	23

BAB II. WILAYAH GEOGRAFIS DAN ANCAMAN KEAMANAN INGGRIS	25
2.1 GAMBARAN UMUM INGGRIS.....	25
2.2 KONDISI KEAMANAN INGGRIS.....	31
2.3 ANCAMAN UTAMA INGGRIS	32
2.3.1 <i>Terorisme</i>	33
2.3.2 <i>Masalah Perbatasan dan Imigran Gelap</i>	38
2.3.3 <i>Cyber Attack</i>	40
BAB III. PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL INGGRIS (NATIONAL SECURITY COUNCIL OF UNITED KINGDOM) 45	
3.1 LANDASAN HUKUM NATIONAL SECURITY COUNCIL OF UNITED KINGDOM	45
3.1.1 <i>Dokumen Rancangan Kebijakan Keamanan dan Tujuan Nasional : “A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy” Tahun 2010</i>	45
3.1.2 <i>Dokumen Panduan Pelaksanaan Keamanan Nasional : “Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review” Tahun 2010</i>	47
3.2 PEMBENTUKAN NATIONAL SECURITY COUNCIL OF UNITED KINGDOM. 52	
3.2.1 <i>Sejarah Pembentukan</i>	53
3.2.1.1 <i>Sejarah Komite Koordinasi : The Committee of Imperial Defence</i> ...54	
3.2.1.2 <i>Mempersiapkan keamanan Nasional 1979 – 2010</i>58	
3.2.2 <i>Struktur Organisasi dan Tugas</i>	66
3.3 MITRA KERJA NATIONAL SECURITY COUNCIL OF UNITED KINGDOM... 70	
3.3.1 <i>Badan Intelijen Inggris : MI5/MI6</i>	70
3.3.2 <i>Angkatan Darat Inggris (British Army)</i>	72
3.3.3 <i>Angkatan Laut Inggris (Royal Navy)</i>	73
3.3.4 <i>Angkatan Udara Inggris (Royal Air Force)</i>	75
3.3.5 <i>Kepolisian Inggris</i>	76

BAB IV. ALASAN PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL INGGRIS (NATIONAL SECURITY COUNCIL)	79
4.1 MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NASIONAL INGGRIS	79
4.1.1 <i>Definisi Keamanan dan Ancaman Keamanan bagi Inggris</i>	80
4.1.2 <i>Definisi Kedaulatan dan Ancaman Kedaulatan bagi Inggris</i>	83
4.1.3 <i>Respon Inggris dalam Menghadapi Ancaman Keamanan dan Kedaulatan</i>	86
4.2 MEMPERKUAT ALIANSI INGGRIS DENGAN NATO DAN UNI EROPA	91
4.2.1 <i>Pengertian Aliansi</i>	92
4.2.2 <i>Hubungan Inggris dengan NATO</i>	94
4.2.3 <i>Hubungan Inggris dengan Uni Eropa</i>	96
4.2.4 <i>Upaya Inggris Memperkuat Aliansi dengan NATO dan Uni Eropa</i>	99
4.3 MENJAGA SUMBER DAYA MINERAL.....	102
4.3.1 <i>Deskripsi Sumber Daya Mineral Dunia</i>	103
4.3.2 <i>Sumber Daya Mineral dan Krisis Energi di Inggris</i>	105
4.3.3 <i>Upaya Inggris Mengamankan Pasokan Energi</i>	109
4.4 ANALISA TEORITIS	113
4.4.1 <i>Analisa Tujuan Pembentukan NSC menggunakan Teori Neorealisme</i>	114
4.4.2 <i>Analisa Tujuan Pembentukan NSC dalam Upayanya Mengamankan Energi menggunakan Konsep Energy Security</i>	119
KESIMPULAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR SINGKATAN

CBA	=	<i>Sovereign Base Areas</i>	(Basis Wilayah Kedaulatan)
CDC	=	<i>Colonial Defense Committee</i>	(Komite Pertahanan Kolonial)
CID	=	<i>Committee of Imperial Defence</i>	(Komite Pertahanan Kerajaan)
CONTEST	=	<i>Countering International Terrorism</i>	(Penangkal Terorisme Internasional)
DK-PBB	=	Dewan Keamanan Persatuan Bangsa – Bangsa	
EAEC	=	<i>European Atomic Energy Community</i>	(Komunitas Energi Atom Eropa)
ECSC	=	<i>European Coal and Steel Community</i>	(Komunitas Batu Bara dan Besi Eropa)
EEC	=	<i>European Economic Community</i>	(Komunitas Ekonomi Eropa)
GDP	=	<i>Gross Domestic Product</i>	(Produk Domestik Bruto)
HI	=	Hubungan Internasional	
IRA	=	<i>Irish Republican Army</i>	(Tentara Republik Irlandia)
ISAF	=	<i>International Security Assistance Force</i>	(Pasukan Bantuan Keamanan Internasional)
ISIS	=	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>	(Negara Islam Irak dan Siria)
JIC	=	<i>Joint Intelligence Committee</i>	(Komite Gabungan Intelijen)
JSF	=	<i>Joint Strike Fighter</i>	(Gabungan Pesawat Tempur)
MI5	=	<i>Military Intelligence Section 5</i>	(Intelijen Militer sektor 5)
MI6	=	<i>Military Intelligence Section 6</i>	(Intelijen Militer sektor 6)
MOD	=	<i>Ministry of Defence</i>	(Kementerian Pertahanan)
NATO	=	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>	(Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara)
NSC	=	<i>National Security Council</i>	(Dewan Keamanan Nasional)
PBB	=	Persatuan Bangsa – Bangsa	
SIPRI	=	<i>International Peace Research Institute</i>	(Institut Penelitian Perdamaian Internasional)
SIS	=	<i>The Secret Intelligence Service</i>	(Badan Intelijen Rahasia)
ZEE	=	Zona Ekonomi Eksklusif	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bahasa ilmu sosial, *security* sering disebut sebagai '*essentially contested concept*',¹ karena tidak adanya kesepakatan khusus mengenai definisi dari *security*. Kata *security* memiliki arti yang subyektif dan elastis, maka makna *security* akan berubah pada setiap individu dan kajian ilmu yang berbeda. Sebagian besar pakar Hubungan Internasional (HI) mendefinisikan *security* sebagai bentuk pengurangan ancaman terhadap nilai – nilai kepentingan. Dapat diidentifikasi bahwa *security* tidak dapat dilepaskan dari bidang politik, karena *Security* memiliki peran penting dalam menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana dalam politik dunia.²

Keamanan nasional (*national security*) merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara untuk mengatasi segala bentuk ancaman yang datang, baik dari segi internal maupun eksternal, karena setiap negara harus hidup berdampingan dengan negara lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam bidang kemakmuran (*prosperity*) dan keamanan (*security*).³ Pasca berakhirnya Perang Dingin di era 1990-an konsep *security* mengalami perluasan makna, karena tidak lagi berfokus mengenai *Security of Nation* namun mengalami perubahan menjadi *Security of individual, nation, and system*. Hingga saat ini konsep *security* terus mengalami perluasan kajian, kini *security* tidak hanya fokus terhadap pertahanan negara dari ancaman fisik namun juga menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep *security* ini biasa disebut dengan

¹ Istilah *essentially contested concept* digunakan untuk memfasilitasi pemahaman tentang aplikasi atau interpretasi yang berbeda dari macam abstrak, kualitatif dan evaluatif. Konsep ini biasa digunakan dalam estetika, Filsafat Politik, filsafat sejarah, dan filsafat agama. (Gallie, 1956)

² Paul.D, William. 2008. *Security Studies an Introduction*, New York: Routledge, hal 01.

³ Pimpinan Redaksi, "Undang-Undang keamanan Inggris perpektif keamanan", Majalah *Defender*, 20 Februari 2012, halaman 56.

human security.⁴ Setelah selesainya era Perang Dingin di tahun 1991 terjadi perubahan sistem hubungan antar negara – negara di dunia yang tidak lagi terpusat diantara dua blok Barat dan Timur atau biasa disebut bipolar, namun lebih mengutamakan sistem hubungan dengan banyak negara atau multipolar. Perubahan struktur pada sistem hubungan antar negara ini berdampak pada perubahan sistem keamanan negara. Ketika memiliki hubungan lebih dari dua negara, maka negara – negara akan mengandalkan keamanan mereka untuk negaranya sendiri dan untuk aliansi yang mereka buat.⁵

Inggris berpotensi menjadi salah satu negara dengan kekuatan besar dalam sistem hubungan multipolar ini, dapat dilihat dari data yang di rilis *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) kekuatan pertahanan Inggris menempati urutan ke tiga di dunia. Dalam data SIPRI tahun 2010 Inggris menghabiskan anggaran belanja pertahanannya sebesar 56.8 miliar Dolar Amerika, setara dengan 3.7% rata-rata GDP global.⁶ Sementara dari segi ekonomi berdasarkan tingkat GDP (*Gross Domestic Product*) per tahun 2010 menurut data World Bank, Inggris menempati urutan ke enam dengan pendapatan GDP US\$ 2,246 triliun dolar.⁷ Data tersebut memperlihatkan bahwa Inggris mampu bersaing dengan negara adidaya dunia seperti Amerika Serikat, Rusia dan China, yang kemudian menjadikan Inggris sebagai negara yang memiliki daya tarik bagi negara-negara lain dalam membentuk aliansi. Salah satunya adalah hubungan baik Amerika Serikat dengan Inggris yang telah terjalin selama ratusan tahun membuat Inggris seakan menjadi mitra setia Amerika Serikat dalam berbagai segi baik di bidang pertahanan keamanan maupun bidang ekonomi, sosial dan politik. Contoh dari kedekatan tersebut dapat dilihat pada keterlibatan Inggris dalam operasi militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.

⁴ Bary, Buzan. 2007. *International Security vol. III :Widening Security*. London: SAGE Publications. Ltd. hal 2

⁵ Kenneth N, Waltz. *Structural Realism After the Cold Wars, International Security*, Vol. 25, No.1 (Summer 2000/01), pp. 5-41

⁶ Sam Perlo-Freeman *et.all*.2011. *Appendix 4A. Military expenditure data, 2001–10*. <http://www.sipri.org/yearbook/2011/04/04A>

⁷World Bank.2011. *World Development Indicators database: Gross Domestic Product 2010*.Washington D.C: World Bank. hal 1

Sebagai salah satu negara besar di dunia, Inggris tidak lepas dari ancaman dan masalah terkait pertahanan dan keamanan negara. Seperti sebuah negara pada umumnya, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Inggris. Pada segi pertahanan dan keamanan, ancaman bagi Inggris adalah terkait terorisme, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), penyelundupan hingga ancaman di wilayah perbatasan. Masalah lain yang tengah dihadapi oleh pemerintah Inggris adalah berkurangnya pasokan energi untuk konsumsi dalam negeri. Tingginya permintaan pasar terhadap minyak mentah dan gas alam, membuat pemerintah Inggris harus berpikir keras dalam menentukan kebijakan keamanan energinya.

Dalam bidang keamanan dan pertahanan isu terorisme menjadi perhatian utama Inggris, karena serangkaian peristiwa terror yang terjadi beberapa peristiwa terror di Inggris, khususnya dalam rentang waktu tahun 2005 hingga 2013 telah terjadi empat serangan teroris yang terjadi di Inggris. Dimulai dari serangkaian serangan teroris di sistem Transportasi publik Inggris di London pada tahun 2005.⁸ Selain isu terorisme adalah adanya ancaman kejahatan dunia maya (Cyber Crime), dalam rentang waktu 2007 sampai 2009 jumlah ancaman terus meningkat pesat hingga 300%. yang mencapai puncaknya pada tahun 2009 ketika *Hacker* (peretas) berhasil melumpuhkan website pemerintah, media massa, dan perusahaan keuangan.⁹ Isu perbatasan yang menyangkut ancaman transnasional juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah Inggris, karena semakin meningkatnya jumlah organisasi kriminal, penyelundupan narkoba, dan imigran gelap yang terjadi di wilayah perbatasan Inggris.

⁸ BBC News. In Depth London Attack.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/London_blast/what_happened/html/ (diakses pada 30 Oktober 2015, 16.00)

⁹ Mike, McGuire. 2013. *Cyber Crime : A Review of the Evidence*. London: Home Office of United Kingdom. Hal 05

Untuk menangkal berbagai ancaman yang datang dari luar, Inggris membutuhkan mitra strategis yang sanggup memberikan proteksi tambahan bagi Inggris demi menjaga kedaulatan wilayahnya. Kehadiran Pakta Keamanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization* – NATO) dan Uni Eropa sebagai mitra strategis Inggris, sangat membantu Inggris dalam menjaga kedaulatan Inggris. Sebagai salah satu *founding father* dari NATO sudah pasti Inggris mendapat jaminan keamanan dari para anggota – anggota NATO, seperti yang tertuang dalam *North Atlantic Treaty* pasal 4 dan 5 yang dapat diterjemahkan : segala jenis ancaman yang terjadi diwilayah Eropa dan Amerika utara yang mengancam integritas teritorial, kemerdekaan politik atau keamanan akan dianggap sebagai ancaman bersama.¹⁰ Keberadaan NATO dianggap penting bagi Inggris mengingat luasnya wilayah teritori Inggris yang berada diluar *mainland* Inggris, sehingga NATO dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah teritori Inggris. Hubungan Inggris dengan Uni Eropa mengalami pasang surut semenjak Inggris tidak menyetujui penyatuan mata uang eropa di tahun 1992. Namun terlepas dari hubungan ekonomi yang terus mengalami pasang – surut hubungan hingga sekarang, dalam bidang pertahanan dan keamanan keberadaan Uni Eropa sangat penting terutama didalam menjaga keamanan di perbatasan. Inggris yang menyoroti berbagai masalah diperbatasan yang telah dijelaskan diatas, membuat keberadaan Uni Eropa menjadi penting karena Inggris yang berbatasan langsung dengan wilayah Eropa barat.

Kondisi pasokan energi di Inggris juga menjadi perhatian khusus pemerintah Inggris, dalam jangka waktu sepuluh tahun tepatnya pada tahun 1990 hingga tahun 2000, produksi minyak mentah dan gas alam dalam negeri Inggris terus mengalami penurunan. Walaupun Inggris memiliki sejumlah cadangan minyak dan penemuan tambang minyak baru, tetapi masih belum dapat dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri. Kondisi tersebut mengakibatkan Inggris berubah menjadi negara pengimpor minyak

¹⁰ NATO.1949. *North Atlantic Treaty*. Washington D.C : North Atlantic Treaty Organization. Hal.01

mentah dan gas alam pada tahun 2004 dan 2005.¹¹ Dalam upaya mengamankan pasokan energinya, Inggris harus menghadapi berbagai resiko dalam kemampuannya memperoleh energi yang terjamin, beragam dan terjangkau, dan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Inggris. Resiko yang menjadi perhatian pemerintah Inggris adalah ketidakstabilan politik di negara pemasok energi utama, kurangnya investasi di negara – negara pemasok energi, dan ketidaksempurnaan dalam fungsi pasar global dan pasar dalam negeri Inggris.¹²

Setelah menganalisis jenis ancaman yang tengah dihadapi oleh Inggris, Pada 21 mei 2010 Perdana Menteri David Cameron membentuk sebuah komite yang dipimpin langsung oleh dirinya yang disebut dengan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council – NSC*). Lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan dan analisis terhadap ancaman keamanan Inggris.¹³ Dalam jangka waktu lima bulan dari pembentukan NSC Perdana Menteri Inggris David Cameron Mengeluarkan dua kebijakan keamanan nasional Inggris yaitu *Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review* dan *The National Security Strategy*. Rancangan strategi tersebut merupakan sebuah pedoman dan gambaran umum tentang kebijakan pertahanan dan keamanan, serta tujuan nasional yang akan dijalankan oleh pemerintah Inggris kedepannya.¹⁴

Dalam dua konsepsi keamanan nasional Inggris, Inggris memprioritaskan keamanannya pada *cyber Attack, civil emergencies, energy security, organized crime, counter proliferation* dan *border security*, krisis militer internasional, serta bencana alam nasional. Kebijakan strategis yang dikembangkan mengacu pada prioritas penanganan terhadap ancaman keamanan nasional. Terutama untuk

¹¹ U.S Energy Information Administration.2014.*Energy Analysis of United Kingdom*.Washington D.C: U.S Energy Information Administration. Hal 01.

¹² Cabinet Office of United Kingdom.2010.*Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review*. London: Cabinet Office of United Kingdom.hal 50

¹³ George, Bangham.2012.*The National Security Council and Prime Minister*. London: The Wilberforce Society. Hal 01

¹⁴ Cabinet Office of United Kingdom, *Op. cit* hal 06

mengatasi resiko – resiko terhadap keamanan nasional Inggris terutama melalui tindakan pendekatan yang integratif baik pada tataran pemerintahan maupun secara internasional, pengindentifikasian resiko secara dini serta mengedepankan pencegahan ancaman terror ketimbang upaya mengatasi terror setelah terjadi.¹⁵ Pembentukan National Security Council di Inggris sangat menarik untuk di amati, ditinjau dari dua kebijakan keamanan Inggris yang telah dikeluarkan. Dari dua kebijakan keamanan pemerintah Inggris yakni *Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review* dan *The National Security Strategy*, mengindikasikan Inggris memiliki tujuan nasional yang lebih luas terutama di kawasan Eropa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kebijakan keamanan Inggris terutama pada alasan pembentukan *National Security Council* kedalam sebuah karya ilmiah. Adapun judul dalam karya ilmiah ini adalah :

“Kebijakan Keamanan Inggris : Studi *National Security Council*”

1.2 Ruang lingkup Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang penting. Hal tersebut dikarenakan agar karya tulis ilmiah tersebut fokus terhadap kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Pembahasan rumusan masalah akan berjalan ke arah sasaran yang telah ditentukan dan tidak melebar serta keluar dari kerangka penelitian. Ruang lingkup pembahasan sendiri terbagi atas dua batasan yakni batasan waktu dan bahasan materi.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis ingin menganalisis mengenai kebijakan Keamanan Inggris, dengan memfokuskan pembahasan pada alasan mengapa Pemerintah Inggris membentuk *National Security Council* (NSC) pada tahun 2010. Serta konstelasi kawasan serta isu keamanan yang tengah dihadapi oleh Inggris dalam usahanya membentuk *National security Council*.

¹⁵Majalah *Defender*. *Op.Cit*, hal 57.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam karya tulis ilmiah ini ialah pada tahun 2001 hingga tahun 2010. Diawali tahun bulan Desember 2001 ketika Pemerintahan Inggris masih dipimpin oleh Perdana Menteri Tony Blair yang bereaksi Atas serangan 11 September di Amerika Serikat dengan mengeluarkan kebijakan *Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001*. Sementara batasan akhir karya ilmiah ini yakni pada bulan Mei tahun 2010 ketika pemerintah Inggris dibawah kepemimpinan Perdana Menteri David Cameron mengumumkan pembentukan *National Security Council* dibawah Kabinetnya

1.3 Rumusan Masalah

Karya tulis ini akan meneliti lebih dalam tema utama yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itulah, dalam karya tulis ilmiah ini penulis mengangkat persoalan yang berkaitan dengan tema utama tersebut untuk kemudian berusaha menemukan jawabannya dengan menggunakan metode-metode tertentu menuju kesimpulan di akhir pembahasan nanti. Dengan memunculkan permasalahan, maka akan dimengerti inti dari pembahasan sebuah karya tulis ilmiah. Berkenaan dengan itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa Pemerintah Inggris Membentuk *National Security Council* pada tahun 2010?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, tujuan utama dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan tentang tujuan pemerintah Inggris membentuk *National Security Council* pada tahun 2010. Dan menganalisis isu keamanan yang terjadi di wilayah Inggris dalam kurun waktu 2001 hingga tahun 2010. Tahun 2001 adalah titik awal batasan waktu penulis, karena saat itu Perdana Menteri Tony Blair mengeluarkan kebijakan *Anti-Terrorism, Crime and Security Act*

2001. Selain itu penulis juga ingin menguraikan apa saja hasil yang diperoleh Pemerintah Inggris dari pembentukan National Security Council.

1.5 Landasan Pemikiran

Didalam menganalisa suatu masalah dibutuhkan beberapa teori serta konseptual yang mendukung pembahasan kasus yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Kerangka pemikiran secara umum dapat diartikan sebagai awal pemikiran dasar yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Kerangka pemikiran yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah konsep adalah teori hubungan internasional *Neo-Realisme* dan *energy security*.

1.5.1 Teori Hubungan Internasional Neo-Realism

Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, ini merupakan nilai – nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis, terutama realisme klasik.¹⁶ Realisme kembali muncul di era 1980 dengan sebutan neo-realisme. Neo-realisme mengalami kemajuan dan perkembangan didalam kajian ilmu hubungan internasional pasca Perang Dingin. Dengan demikian terjadi pula perubahan struktur dunia internasional dari yang semula bipolar menjadi multipolar.

Tidak seperti bipolar yang hanya ada dua pihak yang saling berhadapan, persaingan dalam sistem multipolar lebih kompleks dan setiap negara saling berinteraksi. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak pihak dan kemungkinan munculnya polar-polar baru yang juga sangat besar. Seiring berkembangnya multipolar, para pengamat memprediksi bahwa kebangkitan China, India, Rusia

¹⁶ Robert Jackson & Georg Sorensen.2009.Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.89

dan Brasil merupakan sesuatu yang realistis sebagai kekuatan baru di dunia internasional.¹⁷

Pada sistem multipolar negara berusaha untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dengan menggunakan mobilitas domestik atau melalui aliansi dengan negara lain. Namun menurut Kenneth Waltz pembentukan aliansi adalah sulit tercapai, karena negara yang tergabung dalam aliansi akan memperhitungkan untung-rugi.¹⁸ Keuntungan dari adanya aliansi adalah negara dengan kapabilitas keamanan yang kecil akan merasa terlindungi oleh negara dengan kapabilitas yang lebih besar. Disisi lain, suatu negara juga akan merasa dirugikan karena kedaulatan negara sebagian akan diserahkan kepada aliansi. Oleh karena itu terkadang sebuah negara melakukan *struggle for power* dengan usahanya sendiri (*self-help*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Kekuatan baru yang muncul seperti gambaran diatas dapat digolongkan berdasarkan strategi dan tujuannya. Pengertian strategi disini adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer satu bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik pada masa damai maupun masa perang.¹⁹ Berdasarkan sifatnya, strategi dapat dibedakan menjadi strategi defensif dan strategi ofensif. Perbedaan strategi dalam neorealisme antara ofensif dan defensif dapat kita lihat dalam jurnal yang berjudul *Security Seeking under Anarchy* seperti yang dipaparkan oleh Jeffrey W. Taliaferro pada Tabel 1.1 berikut²⁰ :

¹⁷ Victoria, Jepson. 2012. Identify the Major Differences between Classical Realism and Neorealism, <http://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/> (Diakses pada 15 Mei 2014, 20:54)

¹⁸ Keneth N. Waltz. Structural Realism After the Cold War. *International Security*, Vol. 25, No.1 (Summer 2000), pp. 6–41

¹⁹ Strategy.2015. Dalam *Merriam Webster Dictionary*. . www.merriam-webster.com/dictionary/strategy (diakses 04 Maret 2015)

²⁰ Jeffrey W. Taliaferro. *Security Seeking under Anarchy*. *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01), pp. 128–161

Tabel 1.1 Perbedaan Defensive dan Offensive dalam Neo-Realisme

Strategi Teori	Fokus Utama dan Asumsi Tentang Anarki	Ruang Lingkup Teori	Tokoh Teoritisi
Defensif	Sistem internasional memberikan insentif atau kesempatan untuk melakukan ekspansi, tetapi hanya pada saat kondisi tertentu	Menyerang atau bertahan bisa dibedakan. Teknologi dan faktor geografi dimanfaatkan untuk bertahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kenneth Waltz • Dale Copeland • Robert Jervis • Charles Glaser • Benjamin Miller
Ofensive	Sistem Internasional selalu memberi insentif atau kesempatan untuk melakukan ekspansi	Menyerang atau bertahan tidak dapat dibedakan. Teknologi dan faktor geografi mendukung untuk menyerang	<ul style="list-style-type: none"> • Robert Gilpin • Jacek Kugler • John Mearsheimer • Randall Schweller

Sumber: Jeffrey W. Taliaferro (2000). dan Abubakar Eby Hara (2011).

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 1.1 diatas, para teoritisi kemudian mencoba mengemukakan pendapat mereka mengenai realisme defensif. Kenneth Waltz berpendapat bahwa peningkatan kapabilitas militer suatu negara selain dipengaruhi oleh faktor geografis juga dipengaruhi oleh tingkat populasi, kemampuan ekonomi, stabilitas politik, kekuatan militer dan daya dukung sumber daya.²¹ Robert Jervis berpendapat bahwa dalam dunia yang anarki, suatu negara merasa cemas akan keberadaan negara lain. Kecemasan dipicu adanya distribusi kapabilitas yang bersifat relatif, dengan kata lain negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjaga keamanannya. Apabila salah satu negara

²¹ Keneth N. Waltz. *The Emerging Structure of International Politics. International Security*, Vol.18, No.2 (Autumn, 1993), pp. 44-79

meningkatkan keamanannya, maka dengan sendirinya hal tersebut akan memicu negara lain untuk melakukan hal yang sama.²²

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Charles Glaser, menurutnya motivasi negara meningkatkan kapabilitas keamanannya lebih ditujukan untuk *survive* dan mencegah setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki. Glaser berpendapat ancaman yang paling utama ialah ancaman yang datang dari negara lain.²³ Selanjutnya, Dale Copeland didalam bukunya yang berjudul *The Origins of Major War* mengemukakan bahwa kekhawatiran akan kondisi keamanan membuat negara berusaha mencegah terjadinya perang.²⁴ Benjamin Miller mengemukakan bahwa keamanan dapat tercipta dengan adanya kerjasama dengan negara lain.²⁵

Sementara itu beberapa teoretisi lain mengemukakan pendapatnya mengenai realisme ofensif. Robert Gilpin berpendapat bahwa sistem hegemonik dengan satu aktor negara yang kuat akan menciptakan sebuah kestabilan dalam tatanan politik dan militer. Dengan kata lain, ada satu kekuatan besar yang dominan dalam suatu kawasan. Ketika kekuatan suatu negara setara dengan negara hegemon, maka negara tersebut cenderung untuk memulai perang.²⁶ Jacek Kugler menilai bahwa kunci untuk memenangkan peperangan yang bersifat ofensif terletak pada kekuatan militer. Kugler mencontohkannya pada kekuatan Jerman selama Perang Dunia, faktor yang menyebabkan Jerman hampir meraih kemenangan adalah dari segi superioritas kekuatan militernya.²⁷

²² Robert Jervis. *Cooperation under the Security Dilemma*. *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (January 1978), pp. 167–214 dalam Jeffrey W. Taliaferro. *Op. Cit* Hal.138

²³ Charles Glaser. 2003. *The Necessary and Natural Evolution dalam Griffiths, Martin (eds). 2007. International Relation Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge. Hal.17

²⁴ Terkait pendapat tersebut, Copeland mengemukakan bahwa superioritas militer dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti yang ia paparkan pada bagian teori *Dynamics Differential* dalam Dale Copeland. 2000. *The Origins of Major War*. New York: Cornell University Press. Hal.15

²⁵ Pendapat Miller tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah *Great power cooperation theories* seperti dikutip dalam Jeffrey W. Taliaferro. *Op. Cit* Hal.135

²⁶ Gilpin, Robert. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. dalam Dale Copeland. *Op.cit*. Hal.13

²⁷ Organski, and Kugler. 1980. *The War Ledger*. Chicago: University of Chicago Press. Hal.27-28 dalam *ibid* Hal.14

John Mearsheimer berpendapat bahwa negara menghadapi lingkungan internasional yang tidak pasti, dimana memungkinkan bagi setiap negara menggunakan kekuatannya untuk menyerang negara lain. Negara dengan kekuatan besar cenderung memiliki kemampuan militer yang bersifat ofensif.²⁸ Randal Schweller berpendapat bahwa kerjasama dalam aliansi sebuah negara bukan hanya bertujuan untuk *survive*, tetapi untuk mencapai sebuah tujuan lain yang hendak dicapai terutama pada saat perang. Schweller mencontohkan aliansi antara Jerman dengan Italia pada Perang Dunia II. Walaupun kedua negara beraliansi, namun tujuan mereka berbeda dalam mendapatkan tanah jajahan.²⁹

Menurut Dunne dan Schmidt seperti yang dikutip oleh Abubakar Eby Hara dalam *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*, perbedaan mengenai tujuan yang bersifat defensif atau offensive juga dapat dilihat dengan berdasarkan prinsip *security maximize* atau *power maximize*.³⁰ Bila suatu negara hanya memaksimalkan keamanannya (*security*) maka negara tersebut termasuk dalam defensif. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memaksimalkan *power* seperti apa yang dikemukakan oleh Mearsheimer diatas tujuannya ialah untuk mencapai hegemoni dalam sistem internasional.³¹ Suatu negara memilih strategi defensif dikarenakan beberapa hal, diantaranya adanya anggapan bahwa kekuatan musuh lebih besar. Selain faktor kekuatan musuh, negara memilih strategi defensif karena hendak memanfaatkan kondisi geografisnya.³²

Bedasarkan teori diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peningkatan ancaman keamanan dalam negeri Inggris, memicu pemerintah Inggris untuk meningkatkan kapabilitas keamanan negara. jika dikaitkan dengan pendapat

²⁸ J, Mearsheimer. 2001 *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: WW. Norton dalam Griffiths, Martin (eds).Op.Cit Hal.18

²⁹ Randall L. Schweller. *Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In. International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), pp. 72-107. Hal.74

³⁰ Dunne and Schmidt. 2001. Realism dalam Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa. Hal.49

³¹ Liu Fengand dan Zhang Ruizhuang. *The Typologies of Realism. Chinese Journal of International Politics*. Vol. 1 , 2006, pp.109–134. Hal.127

³² Sayidiman, Suryohadiprojo. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.121

Waltz pada paragraf diatas bahwa peningkatan kapabilitas militer suatu negara selain dipengaruhi oleh faktor geografis juga dipengaruhi oleh tingkat populasi, kemampuan ekonomi, stabilitas politik, kekuatan militer dan daya dukung sumber daya. Dalam kasus Inggris ini penulis beranggapan bahwa peningkatan kapabilitas militer ini memiliki arti yang kurang lebih sama dengan upaya peningkatan tingkat keamanan dan kepentingan nasional Inggris. Sementara Charles Glaser berpendapat bahwa motivasi negara meningkatkan kapabilitas keamanannya lebih ditujukan untuk bertahan dan mencegah setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki.

Kondisi anarki umumnya dipahami sebagai cara untuk menggambarkan sistem internasional dimana negara dilihat sebagai salah satu unit analisa, yang dianggap memiliki kedaulatan penuh dan dipersepsikan setara sebagai sebuah aktor.³³ Sistem internasional mengalami banyak perubahan setelah era perang dingin dimana sistem *state-centric model* tidak lagi mendominasi sistem internasional, pertumbuhan sistem *non-state centric model* terus mengalami peningkatan pesat sejak era perang dunia II hingga di awal abad ke-21 pemegang peranan penting dalam sistem internasional tidak lagi hanya negara (*State*) namun juga terdapat *Non-State Actors* yang dapat merubah tatanan politik dunia. *Non-State Actors* adalah sebuah entitas yang berpartisipasi dan bergerak didalam hubungan internasional, *Non-State Actors* merupakan organisasi yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dan membuat perubahan walaupun organisasi tersebut tidak tergabung didalam lembaga yang dibentuk oleh sebuah negara. Para pengamat neorealisme mengakui adanya percampuran antara *state* dan *nonstate actors*, dan mengakui bahwa percampuran antar aktor tersebut merupakan bagian dari dunia yang semakin tergantung antara satu dengan lainnya.³⁴ Perubahan struktur politik di abad ke-21 membuat perubahan konsep anarki dalam sistem internasional, musuh negara tidak lagi hanya sebatas antar negara namun juga dengan aktor – aktor diluar negara.

³³ Helen Milner, 'The Assumption Of Anarchy in International Relations Theory : A Critique', *Review Of International Studies*. Vol. 17 No. 1, 1991, pp. 67-85. hal 67

³⁴ Craig Calhoun, 2002, *Dictionary Of Social Science*. New York: Oxford University Press. Hal. 338-339

Dalam karya ilmiah ini ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan Inggris yang terdapat dalam *Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review* dan *The National Security Strategy* adalah : (1) Ancaman Terorisme, (2) Serangan *Cyber*, (3) Bencana Alam, dan (4) Krisis militer antar negara yang berdampak pada keamanan Inggris. Dari pemaparan diatas, peningkatan keamanan Inggris dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2010 bisa dijelaskan melalui teori *neo-realism defensive* yakni dengan memaksimalkan keamanannya berdasarkan prinsip *security maximize*.

1.5.2 Konsep Keamanan (*Security Concept*)

Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional.³⁵ Karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analisis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. *Power* atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan.³⁶ Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari *power* itu sendiri.

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara

³⁵Barry Buzan.1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Sussex: WHEATSEAF BOOK. Hal. 12

³⁶James N. Rosenau.1976. *World Politics: An Introduction*. New York: Free Press. Hal. 157

kekuatan dan perdamaian.³⁷ Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.³⁸

Landasan utama dalam pendekatan ini yaitu lensa keamanan (*security*) yang dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan (*hostile*).³⁹

Selanjutnya keamanan (*security*) di sini dapat kita bedakan dengan konsep pertahanan (*defense*) yang memiliki kesamaan dari segi tujuannya, yaitu kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan dalam melaksanakan kedua konsep di atas, dimana keamanan biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman dibandingkan pertahanan. Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul : *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*, bahwa keamanan yang dimaksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan yang bersifat konvensional saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang dipaparkan pada Tabel 1.2 berikut :

³⁷ Buzan *Op.cit* hal.2-3

³⁸ *Ibid.* Hal. 61

³⁹ *Ibid.*

Tabel 1.2 Aspek Keamanan Menurut Bary Buzan

No	Aspek Keamanan	Penjelasan
1	militer	mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak
2	politik	mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi
3	ekonomi	mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara
4	sosial	mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional
5	lingkungan	mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya

Sumber: Barry Buzan (1991) (data diolah)

Lebih jauh Buzan menjelaskan bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.⁴⁰

Tidak seperti kerentanan, aspek ancaman sulit untuk diidentifikasi. Hal itu disebabkan karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu secara

⁴⁰Buzan. *ibid.* Hal. 112-114)

substantif adalah nyata. Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (*national insecurity*).⁴¹ Oleh karena itu untuk memudahkan pengkategorian terhadap ancaman nasional, Buzan membedekannya menjadi lima aspek bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Lima bentuk ancaman yang menyebabkan hadirnya ketidakamanan nasional (*national insecurity*) tersebut yaitu :

1. *Militer*

Ancaman militer menduduki inti tradisional dari keamanan nasional. Tindakan-tindakan militer dapat dan biasanya mengancam segala komponen dari negara. Ancaman ini dapat merusak sistem dari segala aspek.⁴² Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah diraih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktivitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan.

Tingkatan ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi, tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mulai dari pelanggaran batas teritorial, hukuman, perebutan batas teritorial negara, invasi, sampai ancaman pembumi-hangusan sebuah negara dengan adanya blokade pengeboman. Tujuannya juga beragam, mulai dari persoalan minor seperti pelanggaran batas laut teritorial, sampai perbedaan paham yang dianut negara lain.⁴³

2. *Politik*

Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan intrik politik yang mampu

⁴¹*ibid*

⁴²*ibid.* Hal. 116

⁴³ Teuku May Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung : Refika Aditama. Hal. 33

mengganggu jalannya pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang di semua bangsa-bangsa di dunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik maupun kekuatan yang dimilikinya.

3. *Sosial*

Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi di sebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik seperti yang terjadi di jazirah Arab dengan Israel, atau dapat pula dari perbedaan kultur, seperti penetrasi umat Islam fundamentalis terhadap kebijakan dunia Barat. Bentrokan antara perbedaan bahasa, agama dan kultur tradisional masyarakat dengan nilai-nilai yang dilihat cenderung lebih baik yang dianut negara lain khususnya negara barat, yang telah menimbulkan gejala sosial antara yang pro dengan yang kontra.

4. *Ekonomi*

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Bukan saja hal ini dapat berarti kokoh atau tidaknya sebuah bangsa, namun keberhasilannya pun ditentukan oleh banyak faktor. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut tidak mampu segera bangkit dari aspek struktural tersebut, maka keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu.

Hubungan antara ekonomi dan kemampuan militer saling berkaitan. Kemampuan kemiliteran suatu negara bukan hanya terletak pada persediaan dari strategi peralatan tetapi juga pada barang yang dihasilkan suatu industri yang mampu mendukung pasukan bersenjata. Untuk kekuatan utama, artinya sebuah perusahaan industri mampu menghasilkan beraneka macam senjata masa kini.

5. *Lingkungan atau Ekologi*

Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisional, ancaman ekologi bisa dilihat sebagai ketidaksengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional.

Beberapa aspek di atas mulai dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi tidak merupakan sebuah tolok ukur bagi keamanan nasional suatu negara. Dari kelima aspek tersebut, Ancaman militer masih mendominasi secara teoritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Suatu ancaman akan menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya pada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya, tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut.⁴⁴

Suatu negara bisa saja mengambil kebijakan secara pasif dengan menunggu sampai ancaman tersebut menjadi besar/luas atau mengambil kebijakan secara aktif dengan segera mengantisipasinya ketika ancaman-ancaman tersebut masih kecil. Ancaman-ancaman dan kelemahan suatu negara merupakan objek keamanan, sehingga kebijakan dalam bidang keamanan perlu diperhitungkan terutama bagi negara-negara yang kurang atau tidak kuat.

1.5.3 **Konsep *Energy Security***

Energy Security merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menganalisis motif suatu negara dalam melakukan perilaku luar negeri. Keamanan energi atau *energy security* menjadi hal penting bagi suatu negara dalam keberlangsungan ekonomi. Energi yang digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi tersebut adalah energi minyak. Minyak menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan alat-alat transportasi untuk mendistribusikan hasil produksi. Ketahanan minyak yang cukup mendorong terciptanya kestabilan ekonomi di suatu negara. negara selalu berusaha

⁴⁴ Rudy. *ibid.* Hal. 36

mendapatkan pasokan minyak yang cukup atau memiliki cadangan minyak yang cukup untuk kebutuhan negaranya. Motif seperti inilah yang dapat menentukan perilaku luar negeri suatu negara.

Sifat minyak sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan memunculkan kecemasan apabila cadangan minyak yang dimiliki suatu negara habis. Pada era industrialisasi saat ini dimana semua mesin membutuhkan minyak untuk bergerak, menempatkan minyak sebagai faktor penting dalam gerak industrialisasi suatu negara. Kelangkaan minyak yang dialami oleh negara akan mengancam ekonomi negara tersebut dan pada akhirnya menempatkan negara pada posisi krisis. Untuk mengatasi hal ini salah satu cara yang dilakukan adalah terus mencari cadangan minyak baru. Negara sebagai otoritas yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan minyak bagi keadaan ekonomi dan untuk memastikan bahwa pasokan serta cadangan minyak yang dimiliki mencukupi.

Situasi yang dialami negara untuk memastikan pasokan minyaknya cukup disebut sebagai ketahanan energi. Ketahanan energi memiliki berbagai macam penafsiran. Salah satu penafsiran mengenai ketahanan energi adalah dari Michael T. Klare yang menyebutkan “...it as the assured delivery of adequate supplies of affordable energy to meet a state’s vital requirements, even in times of international crisis or conflict.”⁴⁵ Pernyataan Michael T. Klare tersebut memiliki arti bahwa ketahanan energi merupakan pengiriman yang meyakinkan dari suatu pasokan energi untuk mencukupi kebutuhan utama sebuah negara, meskipun dalam situasi krisis internasional dan konflik. Penjelasan Michael T. Klare mengenai ketahanan energi adalah negara harus dan mengusahakan agar bagaimana pasokan atau cadangan minyak yang dimiliki oleh suatu negara cukup dalam memenuhi kebutuhan negara meski dalam kondisi internasional yang krisis.

Keamanan energi sangat penting bagi Inggris untuk memastikan terus berjalannya siklus perekonomian, Merujuk pada pengertian ketahanan energi yang dimiliki oleh Michael T. Klare Inggris harus mampu menyediakan pasokan minyak yang cukup bagi keberlangsungan ekonomi. Dalam upaya mengamankan

⁴⁵ Michael T. Klare. 2008. *Energy Security. Security Studies: An Introduction*. USA: Routledge. Hal. 484.

pasokan energinya, Inggris harus menghadapi berbagai resiko dalam kemampuannya memperoleh energi yang terjamin, beragam dan terjangkau yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Inggris. Resiko yang menjadi perhatian pemerintah Inggris adalah ketidakstabilan politik di negara pemasok energi utama, kurangnya investasi di negara – negara pemasok energi, dan ketidaksempurnaan dalam fungsi pasar global dan pasar dalam negeri Inggris.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan dalam karya ilmiah ini, maka penulis berpendapat bahwa alasan yang mendasari pemerintah Inggris membentuk *National Security Council* adalah untuk meningkatkan kapabilitas keamanan nasional dalam tujuannya untuk bertahan dan mencegah dari setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki.

1.7 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian didalam karya ilmiah ini terbagi dua bagian, yakni teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada tahap pengumpulan data adalah sebuah teknik untuk mencari dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pencarian informasi dan data dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema dan rumusan masalah yang diapaprkkan. Data dapat bersifat primer maupun sekunder, data primer adalah data yang diperoleh pada saat peneliti terjun langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber lain secara tidak langsung. Adapun metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini sebagai berikut :

1.7.1 Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi literatur, sehingga data-data yang dihasilkan merupakan data sekunder. Dalam hal ini, langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan tujuan penulisan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku ilmiah, jurnal, situs-situs internet dan sumber-sumber lain. Beberapa pusat informasi yang dikunjungi antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Jurnal – Jurnal Internasional
4. Koleksi Pribadi
5. Media internet
6. Media cetak

1.7.2 Teknik analisis data

Dalam upaya menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya.⁴⁶ Selain itu, dalam karya ilmiah ini penulis juga menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang membagi proses ini menjadi tiga tahap, yaitu :⁴⁷

1. Proses reduksi data yang bertujuan untuk memilih, menggolongkan dan mengorganisasikan data. Data-data apa saja yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.

⁴⁶ Kartini, Kartono. 1990. *Metodologi Riset*. Bandung: CV.Mandar Maju. Hal.63

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 209-210

2. Proses penyajian data. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disusun secara sistemik dalam bentuk teks naratif, grafik atau bagan.
3. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data-data yang telah disusun tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menarik kesimpulan dan meverifikasi agar pengetahuan yang dihasilkan lebih tepat.

Pada karya ilmiah ini data sekunder yang digunakan berasal dari ulasan berita media massa, pendapat dan penelitian para pengamat, ahli, akademisi, serta pejabat negara yang terkait di Inggris. Selain itu penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari publikasi jurnal dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Berdasarkan data-data tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang mengapa pemerintah Inggris dibawah pemerintahan David Cameron membentuk Dewan Keamanan Nasional di tahun 2010.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum dari karya tulis ini, penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I dengan judul pendahuluan akan dikemukakan latar belakang masalah untuk melihat mengapa masalah itu menjadi penting untuk dibahas. Pembatasan masalah digunakan agar dapat fokus dalam pembahasan masalah. Bab ini juga berisikan kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kondisi Keamanan Nasional Inggris

Bab III Di dalamnya akan dijelaskan gambaran singkat tentang pemerintahan Inggris serta mengenai kondisi keamanan di Inggris dan ancaman – ancaman yang tengah dihadapi oleh pemerintah Inggris

BAB III : National Security Council

Bab II menjelaskan tentang *National Security Council* (NSC), dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum mengenai NSC seperti : pedoman pembentukan NSC, gambaran umum NSC dan respon terhadap pembentukan NSC

BAB IV : Alasan Pembentukan National Security Council Di Inggris Pada Tahun 2010

Bab IV berisi tentang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi pemerintah Inggris membentuk *National Security Council* (NSC) di tahun 2010, dengan menganalisis kebijakan Keamanan Inggris dan dengan situasi keamanan Di Inggris saat itu.

BAB V : Penutup

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan. Dalam bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Disini akan terlihat benang merah antara teori yang digunakan dan permasalahan yang dibahas. Akhirnya bab terakhir ini akan menyimpulkan secara singkat dari keseluruhan bahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

WILAYAH GEOGRAFIS DAN ANCAMAN KEAMANAN INGGRIS

2.1 Gambaran Umum Inggris

Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di lepas pantai barat laut daratan Eropa. Inggris kemudian dikenal dengan sebutan *United Kingdom* atau Inggris Raya yang wilayahnya terdiri dari seluruh pulau Inggris, Wales, dan Skotlandia.⁴⁸ Inggris memiliki wilayah seluas 244.820 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 12.429 kilometer. Adapun rincian mengenai wilayah Inggris (dalam hal ini Inggris Raya) adalah Daratan Inggris 130.373 kilometer persegi, Wales 20.767 kilometer persegi, Skotlandia 78.775 kilometer persegi, Irlandia Utara 14.120 kilometer persegi⁴⁹.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Inggris

Sumber : <http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/uk/map/>

⁴⁸ Petter Kelner. 2014. *United Kingdom*. <http://www.britannica.com/place/United-Kingdom>. (Diakses pada, 16 Juni 2015).

⁴⁹ Nation Encyclopedia. 2015. *United Kindom*. <http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Slovenia-to-Zimbabwe-Cumulative-Index/United-Kingdom.html>. (Diakses pada, 16 Juni 2015).

Mengenai populasi penduduk, Inggris memiliki berbagai macam etnis dan ras. Hal tersebut dikarenakan faktor sejarah Eropa yang terkenal dengan adanya penindasan dan kekerasan baik agama maupun politik. Keberagaman etnis dan ras di Inggris terjadi karena adanya gelombang migrasi dari para penduduk Eropa yang datang ke Inggris untuk mencari wilayah baru guna menghindari penindasan seperti yang terjadi di era kekaisaran Romawi. Pada era 1930-an terjadi gelombang migrasi orang-orang Yahudi ke Inggris. Gelombang migrasi kembali terjadi setelah tahun 1945, pada tahun tersebut banyak imigran dari wilayah Eropa kemudian menetap di Inggris akibat adanya Perang Dunia II. Pada tahun 1960-an penduduk Asia juga melakukan migrasi ke Inggris. Selain penduduk Asia, pada tahun 1960-an juga terjadi gelombang migrasi yang dilakukan oleh penduduk daratan Amerika dan Australia ke Inggris.⁵⁰

Sistem pemerintahan Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut *House of Commons* dan *House of Lords*. Kekuasaan raja/ratu hanyalah bersifat simbolis, sementara kekuasaan sesungguhnya berada di tangan perdana menteri. Walaupun di Inggris merupakan induk dari sistem parlementer, namun di negara ini undang-undang yang ada masih bersifat konvensi. Dengan kata lain adalah apabila menteri atau seluruh kabinet yang tidak lagi memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya. Atau dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan di Inggris Perdana Menteri dapat melaksanakan pemilihan umum sewaktu-waktu sebelum masa jabatan lima tahun jika mendapat mosi tidak percaya.⁵¹ Inggris juga menerapkan sistem dua partai (*two party system*), yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh yang mana kedua partai ini selalu bersaing dalam pemilihan umum di Inggris. Sistem dwi-partai di Inggris ini yang disebut juga oleh Maurice Duverger sebagai khas *Anglo-Saxon* ini seringkali dijadikan

⁵⁰ Mark. A Kishalanky. 2014. *United Kingdom : Land and People*. <http://www.britannica.com/place/United-Kingdom/Plant-and-animal-life#toc44682>. (Diakses pada, 16 Juni 2015)

⁵¹ Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama . Hal.300

contoh bagi negara parlementer lainnya, karena dianggap lebih stabil dan kondusif.⁵²

Sebagai salah satu negara besar di dunia, keberadaan Inggris sejak dahulu menjadi satu kekuatan besar. Salah satu kekuatan besar yang menopang bagi eksistensi Inggris adalah kekuatan militer terutama Angkatan Laut. Dengan kekuatan Angkatan Laut yang besar Inggris dapat menaklukkan sebagian besar wilayah belahan bumi kedalam kedaulatannya yang selanjutnya dikenal dengan persemakmuran (*commonwealth*). Oleh karena itu, selain memiliki wilayah kedaulatan yang meliputi Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales, Inggris juga memiliki wilayah kedaulatan yang tergabung dalam persemakmuran (*commonwealth*) yang tersebar di berbagai benua. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kondisi kedaulatan Inggris. Namun sebelum menginjak pada pembahasan tersebut, sebagai pengantar awal penulis akan sedikit membahas mengenai definisi kedaulatan negara.

Kedaulatan merupakan suatu institusi, yang memiliki arti seperangkat aturan yang dijalankan oleh negara. Aturan tersebut menyatakan dan mengatur kemerdekaan eksternal dan kekuasaan negara domestik.⁵³ Kenneth Waltz mengemukakan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang menentukan bagi dirinya bagaimana ia akan menghadapi masalah internal dan eksternalnya.⁵⁴ Kedaulatan sendiri berdasarkan sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Sebagaimana Gabriella Slomp dalam *On Sovereignty* mengutip Evans dan Newnham, kedaulatan internal memiliki pengertian kekuasaan tertinggi berada pada negara disamping warga negara dalam batas-batas teritori atau wilayah negara. Sementara kedaulatan eksternal memiliki pengertian bahwa pada dasarnya negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hubungan internasional dan tidak ada otoritas tertinggi dari negara

⁵² *Ibid.* Hal.416

⁵³ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.338

⁵⁴ Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill. Hal. 96 dalam Robert Jackson & Georg Sorensen. *Op Cit.* Hal: 114

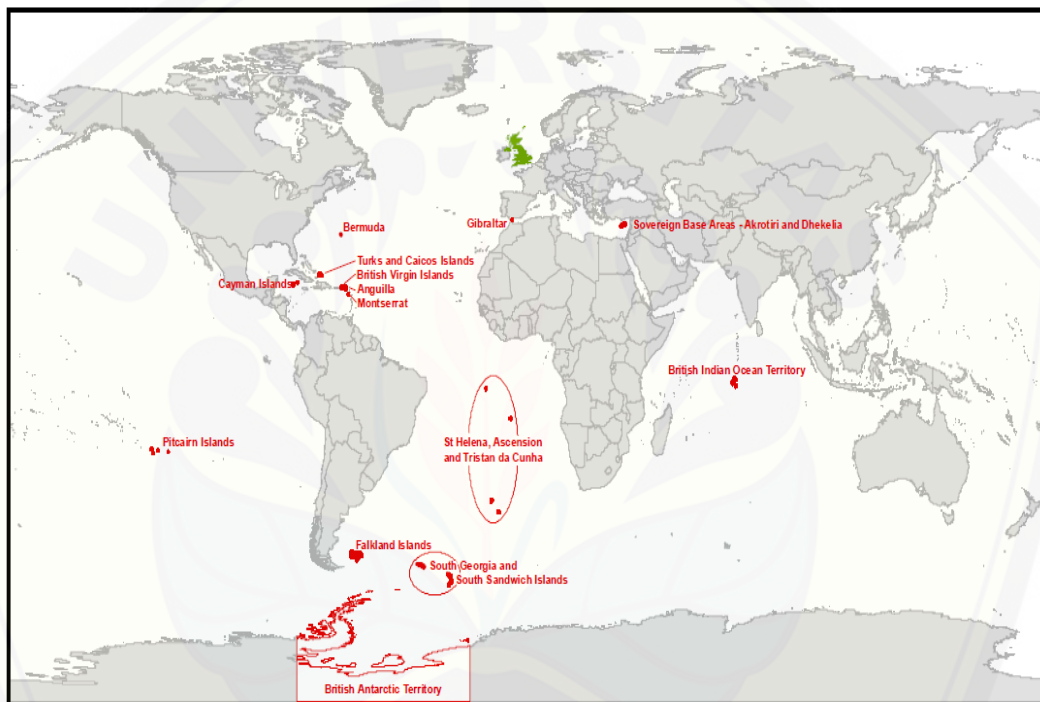
tersebut.⁵⁵ Dalam kaitannya dengan Inggris, kedaulatan negara terbagi atas domestik yang meliputi wilayah Skotlandia, Irlandia Utara, Wales dan Inggris sendiri. Selain itu, Inggris juga memiliki wilayah kedaulatan teritorial yang tersebar di berbagai belahan dunia. Adapun wilayah teritorial tersebut yaitu:⁵⁶

- Anguilla
- Bermuda
- British Antarctic Territory
- British Indian Ocean Territory
- The British Virgin Islands
- The Cayman Islands
- The Falkland Islands
- Gibraltar
- Montserrat
- The Pitcairn, Henderson, Ducie & Oeno Islands
- Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (including Gough Island Dependency)
- South Georgia and the South Sandwich Islands
- Sovereign Base Areas (SBAs) Akrotiri and Dhekelia (on Cyprus)
- The Turks & Caicos Islands

⁵⁵ Evans and Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books. Hal. 504 dalam Trevor C. Salmon. 2008. *Issues in International Relation, Second Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group. Hal: 354

⁵⁶ Directorate-General Security Policy. (Tanpa Tahun). *Overseas Territories: The Ministry of Defence's Contribution*. London : Ministry of Defence. Hal.02.

Wilayah teritori Inggris di seluruh dunia memiliki garis pantai sepanjang 13,500 *Nautica Mile (nm)* dan memiliki luas daratan sebesar 480,000 nm^2 (selain 11,000 nm garis pantai dan 72,000 nm^2 luas daratan di domestik Inggris dan wilayah di sekitarnya). Didalam wilayah tersebut terdapat batas teritori laut yang terdiri dari zona bebas menangkap ikan, zona ekonomi eksklusif, wilayah yang cukup besar ini sangat penting untuk pertahanan Inggris.⁵⁷ Gambar 2.2 berikut menunjukkan wilayah teritori Inggris di berbagai belahan dunia:



Gambar 2.2 Wilayah Teritori Inggris di Belahan Dunia

Sumber : Directorate-General Security Policy. (Tanpa Tahun). *Overseas Territories: The Ministry of Defence's Contribution*. London : Ministry of Defence. Hal.02.

⁵⁷ *Ibid.*

Apabila kita melihat pada Gambar 2.2 diatas, wilayah teritori Inggris hampir terdapat di seluruh benua. Hal tersebut dikarenakan sejarah militer Inggris yang menerapkan konsep peperangan yang menitikberatkan pada kekuatan laut. Pendapat mengenai kekuatan Inggris yang berfokus pada kekuatan laut juga dikemukakan oleh Julian Corbett yang menyebutkan bahwa kunci kekuatan angkatan laut Inggris terletak pada kapal perang Inggris yang dilengkapi dengan meriam modern.⁵⁸ Perluasan wilayah teritori Inggris juga tidak terlepas dari adanya semboyan *Rule Britania, Rule the Wave* atau Inggris harus menguasai lautan untuk menguasai dunia.⁵⁹ Pada era modern seperti saat ini, wilayah teritori Inggris juga menjadi perhatian pemerintah Inggris. Sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris yang menyebutkan bahwa:

*“The National Security Strategy and conclusion of the Strategic Defence and Security Review both reaffirmed the MOD’s commitment to providing security for the nation and its Overseas Territories as the most important responsibility of government and defence.”*⁶⁰

Wilayah yang menjadi fokus perhatian pemerintah Inggris meliputi 14 wilayah teritori seluas 2,3 juta meter persegi. Teritori tersebut menjadi fokus perhatian karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama sumber daya bawah laut. Dengan demikian apabila wilayah teritori Inggris dijaga dan dikelola secara baik maka akan mendatangkan keuntungan bagi Inggris dan teritori tersebut.

⁵⁸ Daoed Joesoef. 2014. *Studi Strategi : Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal.15

⁵⁹ Sayidiman Suryohadiprojo. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal: 19

⁶⁰ Directorate-General Security Policy. *Op.Cit*. Hal.04

2.2 Kondisi Keamanan Inggris

Keamanan dapat dipahami secara luas, yang mencakup mengenai masalah pertahanan negara (*defense*) dan ketertiban (*order*). Dalam hal pertahanan negara fungsi *defense* dilaksanakan oleh militer, sementara yang berkaitan dengan fungsi ketertiban (*order*) dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan instansi keamanan terkait.⁶¹ Beberapa tokoh teoritis kemudian mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari keamanan itu sendiri. Ullman mengemukakan bahwa keamanan nasional ialah “*a threat to national security is an action or sequence of events that (1) threatens drastically and over relatively brief span on time to degrade the quality of life of the inhabitants as a state, or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available on the government of a state private, non-governmental entities (persons, groups, forportations) within the state.*”⁶²

Konsepsi keamanan mendapat tantangan serius dengan berakhirnya Perang Dingin. Konsepsi mengenai keamanan tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional (konsep keamanan teritorial). Namun, berakhirnya Perang Dingin telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Sudut pandang konsep komprehensif ini meliputi aspek yang lebih kompleks selain dari aspek militer itu sendiri. Aspek tersebut cenderung tergolong kedalam ancaman yang bersifat *indirect*, seperti melalui aspek ekonomi, budaya, serta kehidupan politik.

Sebagai negara besar baik dari segi ekonomi dan militer, kondisi keamanan Inggris sangat berpengaruh terhadap eksistensi Inggris di dunia internasional. Kondisi keamanan Inggris pada sisi lain cenderung stabil, namun pasca peristiwa 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat juga berimplikasi

⁶¹ Riant Nugroho. 2014. *National Security Policy : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hal.12

⁶² *Ibid.* Hal.13

pada keamanan Inggris mengingat Inggris merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Serangkaian peristiwa teror terjadi di beberapa wilayah di Inggris seperti di London. Peristiwa pengeboman London yang dikenal dengan peristiwa 7/7 (terjadi pada 7 Juli 2005) menewaskan 52 orang dan 770 orang terluka.⁶³ Selain menyebabkan korban jiwa, peristiwa tersebut berdampak pula pada komunitas muslim di Inggris. Hampir sebanyak tiga juta komunitas muslim Inggris mengalami diskriminasi dan *Islamophobia*, fenomena tersebut dapat dilihat dari adanya serangan terhadap masjid-masjid di Inggris serta pelecehan secara verbal terhadap komunitas muslim.⁶⁴ Kejadian tersebut secara tidak langsung mengganggu terhadap stabilitas keamanan nasional Inggris pasca terjadinya peristiwa serangan 9/11.

2.3 Ancaman Utama Inggris

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dunia internasional, setiap negara memiliki ancaman baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Pasca berakhirnya Perang Dingin terjadi pergeseran pola bentuk ancaman. Sebelumnya ancaman terhadap negara bersifat langsung (*direct*) seperti ancaman militer dari negara lain, namun ancaman tersebut kini bergeser kearah tidak langsung (*indirect*) seperti kejahatan transnasional, terorisme yang melibatkan individu dan kelompok radikal, dan adanya gelombang imigran gelap yang masuk ke suatu negara serta serangan teknologi jaringan komputer (*cyber*). Ancaman tidak langsung tersebut juga dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi dan transnasionalisme.

⁶³ BBC. 2014. *7 July Bombings : Overview*. http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/what_happened/html/. (Diakses pada 16 Juni 2015).

⁶⁴ Lucy J. 2011. *The Impact of 9/11 In Britain*. <http://mic.com/articles/1643/the-impact-of-9-11-in-britain> (Diakses pada 16 Juni 2015).

2.3.1 Terorisme

Salah satu ancaman terbesar pasca Perang Dunia ialah terorisme, baik dilakukan secara individu maupun yang mengatasnamakan suatu kelompok tertentu. Terorisme sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, dan karenanya tidak ada penjelasan tunggal yang dapat menjawab motif tindakan terorisme secara memuaskan. Sebagaimana dikemukakan Bruce Hoffman, tindakan teroris biasanya dirancang untuk mengemukakan sebuah pesan tertentu kepada masyarakat luas.⁶⁵ Biasanya, yang menjadi sasaran terorisme adalah orang yang tidak atau kurang berdaya, namun memiliki posisi yang berpengaruh terhadap keadaan. Perbuatan teror umumnya segera disertai pengumuman oleh pelaku atau kelompoknya agar umum tahu siapa yang menjalankan teror.⁶⁶

Tindakan terorisme senantiasa memiliki pesan politik tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Viotti dan Kauppi “*Terrorism, as politically motivated violences, aims at achieving a demoralizing effect on publics and governments*”.⁶⁷ Pasca era 1990-an, tren terorisme dan kekerasan politik mengalami perkembangan seperti yang tertera pada Tabel 2.1 berikut ini :

⁶⁵ Bruce Hoffman. 1998. *Inside Terrorism*. <http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html>. (Diakses pada : 16 Juni 2015).

⁶⁶ Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.* Hal.180-181.

⁶⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 2007. *International Relations and World Politics : Security, Economy, Identity, (Third Edition)*. New Jersey : Pearson Education Inc. Hal.276 dalam Budi Winarno. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta : CAPS. Hal.171.

Tabel 2.1 Tren Perkembangan Terorisme pasca Era 1990

No	Tren Terorisme	Penjelasan
1	<i>Terrorism and Insurgency</i>	Pada pola ini para teroris baik individu maupun kelompok biasanya memanfaatkan rezim berkuasa yang notabene cenderung radikal. Seperti contoh Afghanistan dan Iraq yang memiliki jaringan Al-Qaeda secara luas.
2	<i>Internationalism</i>	Kelompok teroris mulai mentransnasionalisasi paham radikal mereka terhadap negara lain. Akibat adanya tekanan di negara induk (Iraq dan Afghanistan) kelompok teroris menyebarkan paham radikalisme ke berbagai negara muslim lainnya seperti Mesir, Libya, Maroko, Pakistan, Arab Saudi, Indonesia, dan sebagainya.
3	<i>Suicide Terrorism</i>	Serangan bunuh diri, bukanlah hal baru dalam kerangka terorisme. Namun, serangan bunuh diri sangat sulit untuk diprediksi ataupun dihentikan. Hal ini berkaitan dengan motif para pelaku yang cenderung mengarah pada radikalisme agama dan etnis.
4	<i>Speed of Learning</i>	Pengalaman di berbagai negara yang dimiliki kelompok teroris, cenderung membuat mereka bereksperimen mengenai cara maupun peralatan yang akan dipakai dalam melancarkan aksi mereka. Sebagai contoh mereka mengembangkan berbagai macam bahan peledak.

No	Tren Terorisme	Penjelasan
5	<i>Media Development</i>	Pada pola ini kelompok teroris memanfaatkan keberadaan media satelit (dalam hal ini televisi, internet, dan sebagainya) sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi radikal mereka.
6	<i>Economic Targeting</i>	Kelompok teroris menjadikan sarana ekonomi sebagai target. Kelompok teroris menggunakan target ini dengan harapan dampak yang ditimbulkan dari adanya serangan di sektor ekonomi berpengaruh besar terhadap target serangan.

Sumber : Paul Rogers. *Terrorism*. dalam Paul D. Williams. 2008. *Security Studies: an Introduction*. New York : Routledge Taylor & Francos Group. Hal.182. (data diolah).

Terorisme di Inggris pada awalnya muncul ketika era akhir 1960-an dan mencapai puncaknya ketika era 1970-an. Pada saat itu Inggris menghadapi serangan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok separatis Irlandia Utara atau yang dikenal dengan *Irish Republican Army (IRA)*. IRA didirikan pada tahun 1919 oleh sukarelawan Irlandia yang tergabung dalam kelompok nasionalis militer yang ada sejak tahun 1913. Tujuan didirikannya IRA adalah untuk mewujudkan sebuah negara republik yang merdeka terlepas dari aturan kerajaan Inggris. Untuk mencapai tujuan dan kepentingannya kelompok IRA mengasosiasikan diri dengan Partai *Sin Fein* yang merupakan partai nasional Irlandia.⁶⁸ Dalam manifestonya yang tertuang dalam "*Irish Republican Army (IRA) Green Book*" kelompok ini menyebutkan bahwa musuh mereka adalah seluruh kelompok kepentingan kerajaan Inggris seperti media, kepolisian, dan

⁶⁸ Paul Arthur Kimberly dan Cowell-Meyers. 2014. *Irish Republican Army (IRA)*. <http://www.britannica.com/topic/Irish-Republican-Army> (Diakses pada 17 Juni 2015).

militer Inggris. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh IRA berupa penyiksaan fisik, seragan terhadap psikologis dan bentuk penghinaan lain.⁶⁹

Serangan IRA terhadap kerajaan Inggris terjadi antara tahun 1950 hingga 1962 di enam wilayah, serangan tersebut membuat pihak Inggris membalas serangan di wilayah Belfast dan Derry yang merupakan sarang kelompok IRA. Kelompok IRA merespon serangan pihak Inggris dengan melakukan serangan gerilya balasan antara tahun 1970-1971.⁷⁰ Inggris kembali merespon serangan IRA pada tahun 1971 dengan melibatkan Resimen Parasut militer Inggris, dalam peristiwa yang dikenal *Bloody Sunday* ini menewaskan 13 orang tak bersalah ketika demonstrasi damai kemerdekaan Irlandia berlangsung.⁷¹ Hingga saat ini pemerintah Inggris masih menganggap sisa peninggalan IRA sebagai salah satu ancaman yang berbahaya terhadap stabilitas keamanan domestik Inggris. Hal tersebut tertuang dalam dokumen strategi keamanan pemerintah Inggris "*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*". Dalam dokumen tersebut tercatat serangan yang melibatkan sisa-sisa gerilyawan IRA pada tahun 2009 sebanyak 22 serangan, dan meningkat sebanyak 37 serangan pada tahun 2010.⁷² Apabila dilihat dari segi tren, seperti yang tertera dalam Tabel 2.1 tersebut, tren yang dilakukan oleh kelompok IRA cenderung pada poin keenam yakni menjadikan sektor ekonomi Inggris sebagai target.

Ancaman terorisme selanjutnya terhadap Inggris adalah keberadaan kelompok ekstrimis radikal. Sebagai negara yang multikultural Inggris memiliki komunitas muslim yang cukup besar. Kehidupan muslim di Inggris terusik ketika pasca peristiwa 9/11. Sejak peristiwa 9/11 pemerintah Inggris mulai menaruh perhatian terhadap keberadaan komunitas muslim. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan bahaya aksi radikalisme dan ekstrimisme di kalangan muslim

⁶⁹ Manifesto kelompok *Republican Army (IRA)* tersebut dapat dilihat dalam *Republican Army (IRA) Green Book* yang dikeluarkan pada tahun 1918 pada bagian halaman 6-11.

⁷⁰ Michele Kuznicki, et.al. (Tanpa Tahun). *Terrorism: Irish Republican Army*. Domestic and Foreign Terrorism. Eastern Michigan University. Hal.21-22.

⁷¹ BBC. 1998. *The Troubles Thirty years of conflict in Northern Ireland, 1968 – 1998*. http://www.bbc.co.uk/history/troubles_(Diakses pada 17 Juni 2015).

⁷² HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited. Hal.41

Inggris. Pihak intelijen Inggris menyebutkan bahwa ada indikasi sebanyak 10.000 muslim Inggris mengikuti konferensi ekstrimis Islam pada tahun 2003. Sebelumnya, pada tahun 2001 sejumlah 700 terduga teroris ditahan di Inggris dan 119 diantaranya sebagai terdakwa.⁷³ Pada 7 Juli 2005, aksi terorisme di Inggris terjadi di London pada pukul 08.50. Serangan bom tersebut terjadi di tiga tempat stasiun kereta bawah tanah yakni Liverpool Street station, Edgware Road, dan Kings Cross and Russell Square. Satu jam berikutnya pada pukul 09.50, serangan kembali terjadi di bus tingkat di Tavistock Square. Ledakan bom London yang dikenal dengan peristiwa 7/7 menewaskan 52 orang and sekitar 700 orang terluka.⁷⁴ Para pelaku bom London merupakan anggota muslim ekstrimis bernama Mohammad Sidique Khan (30 tahun), Shehzad Tanweer (24 tahun) dan Germaine Lindsay (19 tahun) serta Hasib Hussain (18 tahun) yang merupakan pelaku peledakan terhadap bus tingkat di Tavistock Square.⁷⁵ Selain mengakibatkan kerugian di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata Inggris, bom London juga mengakibatkan komunitas muslim Inggris merasa khawatir saat mereka keluar di tempat publik atau untuk bekerja.⁷⁶

Setelah satu dekade peristiwa bom London, kini pemerintah Inggris menghadapi ancaman terorisme dalam bentuk baru. Ancaman tersebut adalah adanya para muslim Inggris yang pergi berperang di Suriah dan bergabung dengan kelompok radikal *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Para muslim yang bergabung dalam ISIS merupakan ancaman apabila mereka kembali ke Inggris. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri David Cameron dan Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May. Guna mengantisipasi hal buruk terkait isu terorisme pemerintah Inggris meningkatkan status siaga menjadi

⁷³ Nile Gardiner dan James Phillips. 2005. *The London Bombings: How the U.S. and the U.K. Should Respond*. http://www.heritage.org/research/reports/2005/07/the-london-bombings-how-the-us-and-the-uk-should-respond_ (Diakses pada 17 Juni 2015).

⁷⁴ History UK. 2005. *7/7 London Bombings*. http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/77-london-bombings_ (Diakses pada 17 Juni 2015).

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. 2005. *“The Impact of 7 July 2005 London Bomb Attacks on Muslim Communities in the Eu”*. Vienna : EUMC. Hal.16

genting (*severe*) dan menyiagakan polisi di berbagai wilayah di Inggris.⁷⁷ Jika mengacu pada Tabel 2.1 diatas, tren yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis dalam peristiwa Bom London 7/7 merupakan sebuah bentuk internasionalisme paham radikal akibat adanya transnasionalisasi yang dilakukan kelompok terorisme terhadap kelompok ekstrimis muslim di Inggris.

2.3.2 Masalah Perbatasan dan Imigran Gelap

Isu lain yang mengemuka terkait ancaman nasional Inggris adalah masalah perbatasan dan imigran gelap. Keadaan dunia yang *borderless* menyebabkan menyebarnya fenomena di satu negara ke negara lain, akibat adanya proses transnasionalisme. Semakin tingginya transnasionalisme membawa dampak bagi masyarakat dunia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari transnasionalisme bergerak lurus perkembangan globalisasi, antara lain dapat kita lihat seperti perkembangan teknologi informasi dan bidang industri. Sedangkan dilihat dari dampak negatif, transnasionalisme dapat membawa kerugian bagi masyarakat. Adapun contoh dampak negatif transnasionalisme adalah berkembangnya arus migrasi penduduk suatu negara ke negara lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustavo Cano yang menyebutkan transnasionalisme terbingkai dalam kajian migrasi internasional dengan unit analisa hubungan antara organisasi yang menangani isu-isu imigran dengan negara pengirim dan negara tujuan; atau dualitas agenda pimpinan dari organisasi tersebut.⁷⁸

Isu terkait isu imigran tersebut diantaranya adanya imigran ilegal yang masuk secara tidak resmi ke wilayah suatu negara. Keberadaan imigran ilegal ini baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada stabilitas keamanan nasional, seperti tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi yang dialami imigran

⁷⁷ Yansyah. 2014. *Ancaman terorisme, Inggris Umumkan Status "Genting"*.

<http://www.harianaceh.co/read/2014/08/30/35206/ancaman-terorisme-Inggris-umumkan-status-genting> (Diakses pada 17 Juni 2015).

⁷⁸ Gustavo Cano, "On Transnationalism".

[www.mexnor.org/programs/TRP/ Mexnor%20On%20Trans%20-%20Suggested%20Cit](http://www.mexnor.org/programs/TRP/Mexnor%20On%20Trans%20-%20Suggested%20Cit). dalam Mohammad Irvan Olii. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime". *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005*. Hal. 17

gelap. Begitu pun yang dialami oleh Inggris, sebagai negara yang multikultur dengan ditunjang keadaan ekonomi yang baik Inggris menjadi salah satu negara tujuan bagi para imigran gelap. Hal tersebut seperti yang dilaporkan Departemen Dalam Negeri Inggris sebagaimana dikutip *Mail Online*, sebanyak 863 ribu imigran datang ke Inggris dan sekitar 70 persen atau 604 ribu imigran ilegal menetap di London.⁷⁹ Data lain juga menunjukkan terkait mengenai keberadaan imigran ilegal di Inggris, sebanyak 50 imigran gelap ditahan setiap harinya. Pada tahun 2010 rata-rata 20 imigran gelap tertangkap setiap harinya, meningkat menjadi 40 imigran gelap pada tahun 2014. Statistik menunjukkan jumlah keseluruhan imigran gelap yang ditahan di Inggris pada tahun 2010 mencapai 7.920 orang dan menurun pada tahun 2011 dengan 7.792 orang namun kembali meningkat tajam dari tahun 2012 sejumlah 9.269 orang serta 15.098 orang di tahun 2013.⁸⁰

Masuknya imigran ilegal di Inggris juga tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan para penegak hukum Inggris di wilayah perbatasan. Tercatat pada tahun 2009 sejumlah total 220 juta orang dan 450 juta ton barang masuk ke Inggris melalui pelabuhan dan bandara, dari jumlah tersebut terdapat para imigran gelap dan kelompok kejahatan transnasional.⁸¹ Hal inilah yang selanjutnya dapat berakibat buruk terhadap keamanan dalam negeri Inggris. Guna mengantisipasi kejadian tersebut, pemerintah Inggris melalui dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review* juga memprioritaskan pengamanan wilayah perbatasan dengan memperkuat keberadaan komando polisi perbatasan dan membentuk agen penanggulangan

⁷⁹ Cornila Desyana. 2013. *Sebanyak 863 Imigran Gelap Serbu Inggris*. <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/01/07/117452652/sebanyak-863-imigran-gelap-serbu-Inggris>. (Diakses pada 19 Juni 2015).

⁸⁰ Camilla Turner. 2015. *Forty Illegal Immigrants a Day Arrested in Britain*. <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11517668/Forty-illegal-immigrants-a-day-arrested-in-Britain.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).

⁸¹ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. *Op.Cit.* Hal.53

kejahatan nasional, selain itu pemerintah Inggris juga memperketat sistem pembuatan visa.⁸²

2.3.3 Cyber Attack

Cyber Attack merupakan sebuah pola baru bentuk ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara pasca berakhirnya Perang Dingin. Dalam perspektif keamanan Inggris, ancaman dari *cyber attack* adalah bentuk ancaman baru yang dapat melemahkan berbagai sektor, baik dari segi teknologi informasi sistem keamanan, ekonomi maupun sektor penting lainnya. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan dari *cyber attack*, pemerintah Inggris memasukkan *cyber security* kedalam program strategi keamanan seperti yang tertulis dalam dokumen “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*”. Adapun jenis-jenis serangan terhadap sistem jaringan komputer sebuah negara atau *cyber attack* antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Serangan Terhadap Sistem Jaringan Komputer

No	Jenis Serangan	Keterangan
1	<i>Intrusion</i>	masuknya penyerobot kepada sistem dan aplikasi komputer tanpa seizin dan sepengetahuan pengguna serta berusaha mengubah sistem dari pengguna
2	<i>Fraud</i>	penipuan yang menggunakan satu atau lebih komponen internet dan telekomunikasi termasuk <i>email</i> , web, dengan bujukan transaksi keuangan. Termasuk memperdaya dengan berbuat seolah-olah dari individu atau organisasi resmi yang dikenal bersangkutan (<i>phishing</i>).
3	<i>Harrasment</i>	berisi pengiriman gambar porno atau kekerasan baik untuk sekedar mengganggu hingga bentuk ancaman

⁸² *Ibid.* Hal.54

No	Jenis Serangan	Keterangan
4	<i>Hack Threat</i>	berupa serangan ke atas sistem dan aplikasi komputer organisasi dengan tujuan melumpuhkan operasi sistem dan aplikasi komputer dari organisasi yang menjadi target serangan.
5	<i>Malicious Code</i>	serangan program komputer yang disusupkan ke komputer dan jaringan target untuk kemudian merusak sistem komputer target. <i>Malicious Code</i> termasuk virus, worm, Trojan, Horse, program Back Door dan program aktif berbahaya lainnya.
6	<i>Denial of Service</i>	serangan terhadap aplikasi atau sistem komputer yang menyebabkan para pengguna gagal untuk mendapatkan hingga gagal menggunakan sistem atau aplikasi yang dimilikinya.

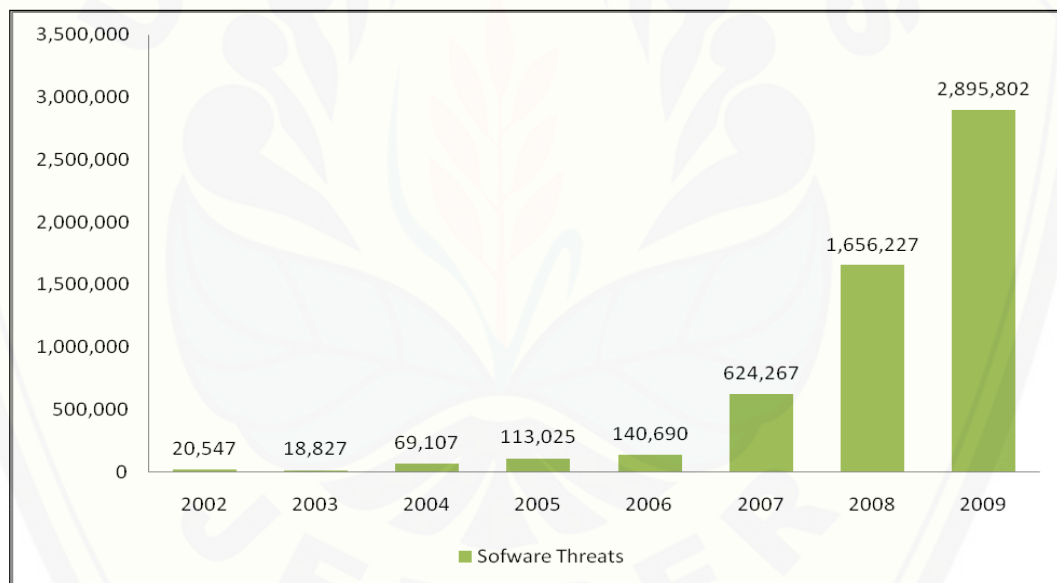
Sumber : Riant Nugroho. 2014. *National Security Policy : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hal.72

Kasus *cyber attack* di Inggris adalah hal serius yang mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat Inggris merupakan salah satu negara pengguna jaringan komputer dan internet terbesar di dunia. Sebagai gambaran, sebanyak 93 persen anak berusia 12-15 tahun di Inggris menggunakan layanan jaringan internet.⁸³ Tahun 2012 tercatat hampir seribu serangan *cyber* terjadi dalam kurun waktu hampir setiap jamnya. Hal yang menjadi target dari serangan sistem komputer tersebut berupa data intelijen dan sistem satelit serta pembajakan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi kejahatan.⁸⁴ Pada tahun berikutnya,

⁸³ Cabinet Office. 2011. *The UK Cyber Security : Strategy Protecting and Promoting the UK in a Digital World*. London : Crown. Hal.12.

⁸⁴ Tom Whitehead . 2012. *Britain Is Being Targeted By Up To 1,000 Cyber Attacks Every Hour*. <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9624655/Britain-is-target-of-up-to-1000-cyber-attacks-every-hour.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).

tepatnya pada tahun 2014 target sasaran serangan sistem komputer di Inggris merupakan yang terbesar di negara Uni Eropa, disusul kemudian dengan Jerman di tempat kedua.⁸⁵ *Cyber attack* yang terjadi di Inggris merupakan jenis kejahatan sistem komputer *Malicious Code*. Tercatat sebanyak 33.000 serangan terhadap *email* terjadi per bulan yang dilancarkan terhadap jaringan komputer pemerintahan Inggris dan dikalangan perusahaan Inggris.⁸⁶ Perusahaan di Inggris memainkan peranan penting dalam peningkatan ekonomi negara, dan hampir seluruh perusahaan Inggris memanfaatkan jaringan internet dan dapat menghemat biaya pengeluaran sebesar 460 juta Poundsterling.⁸⁷ Peningkatan ancaman *Malicious Code* terhadap sistem jaringan komputer di Inggris terjadi sejak tahun 2002 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2009, seperti yang terdapat dalam Gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 Peningkatan Ancaman *Malicious Code* terhadap Sistem Jaringan Komputer Inggris

Sumber : HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited. Hal.48 (data diolah).

⁸⁵ Sam Jones. 2014. *UK Prime Cyber Attack Target Of Europe And Middle East*. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7023c2d4-5481-11e4-bac2-00144feab7de.html#axzz3dIAIxQ5b> . (Diakses pada 19 Juni 2015).

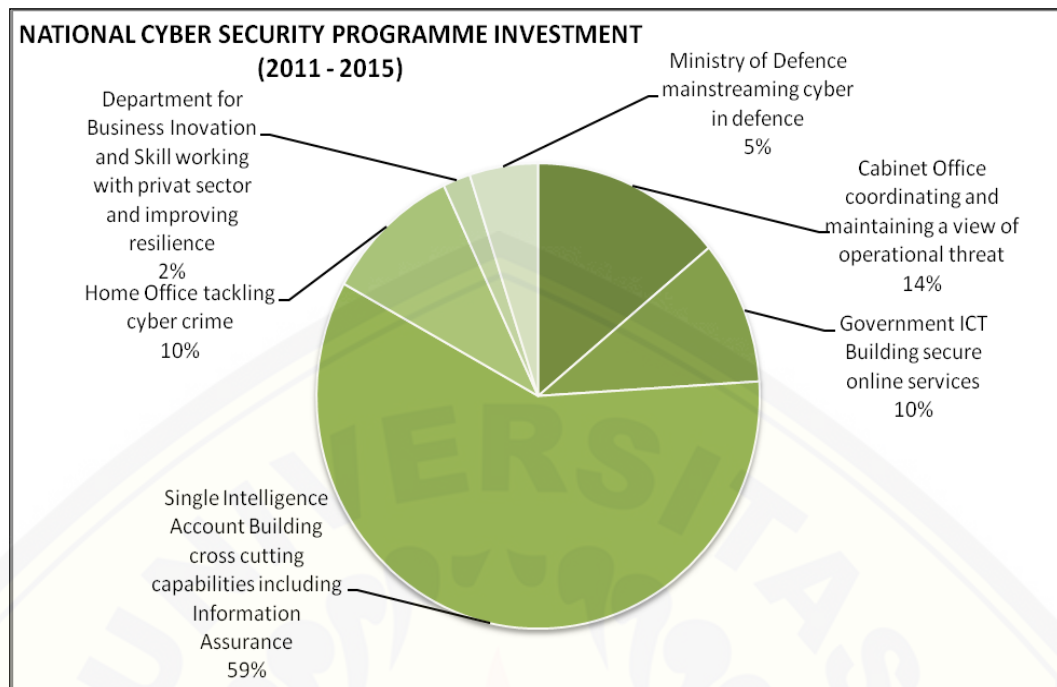
⁸⁶ Katie Hodge. 2013. *Government Faces Around 33,000 Cyber Attacks A Month, Reveals Cabinet Office Minister Chloe Smith*. <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-faces-around-33000-cyber-attacks-a-month-reveals-cabinet-office-minister-chloe-smith-8584636.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).

⁸⁷ Cabinet Office. *Op.Cit*. Hal.12.

Kekhawatiran pemerintah Inggris terhadap *cyber attack* bukanlah tanpa alasan, seiring berkembangnya teknologi kejahatan *cyber attack* dapat mengarah pada tindakan spionase sebuah negara terhadap Inggris. Para pelaku *cyber attack* dapat saja menggunakan sistem komputer untuk memata-matai berbagai tindakan dan menyebarkan dokumen rahasia pemerintah terkait kepentingan nasional Inggris.⁸⁸ Tindakan spionase melalui *cyber attack* dapat dilakukan oleh kelompok teroris atau kelompok kejahatan transnasional, bahkan hingga negara. Adapun negara yang seringkali terlibat dalam kejahatan *cyber attack* dan spionase diantaranya adalah Iran, Cina, dan Rusia. Mengenai *cyber attack* yang dilakukan oleh sebuah negara, pada tahun 2013 beberapa *hacker* yang merupakan bagian dari militer Cina diketahui mencoba mencuri informasi rahasia mengenai *Joint Strike Fighter* (JSF) jet tempur terancang militer Inggris. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan produsen pertahanan Lockheed Martin yang mengklaim bahwa terjadi ribuan serangan *cybers* setiap minggu yang berupaya mencuri data-data pesawat yang akan digunakan Royal Navy dan Royal Air Force pada tahun 2018.⁸⁹ Dalam menghadapi serangan terhadap dunia maya, pemerintah Inggris menganggarkan program investasi penanggulangan *cyber attack* di berbagai departemen pada tahun 2011 hingga 2015 seperti tertera pada Gambar 2.4 berikut:

⁸⁸ HM Government. 2010. *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*. London: The Stationery Office Limited. Hal.14

⁸⁹Tim Redaksi. "Peretas Cina Curi Info Jet Canggih Inggris". *Defender*. Edisi 67/2013. Hal.10



Gambar 2.4 Diagram Persentase Program Penanggulangan Cyber Attack

Sumber : Cabinet Office. 2011. *The UK Cyber Security : Strategy Protecting and Promoting the UK in a Digital World*. London : Crown. Hal.25 (data diolah).

Dari Gambar 2.4 diatas dapat dilihat bahwa anggaran penanggulangan *cyber attack* yang terbesar dialokasikan untuk keperluan sektor intelijen. Selanjutnya, pemerintah Inggris menganggarkan pada sektor kementerian pertahanan dengan memperkuat pertahanan *cyber*. Sektor berikutnya yang mendapat perhatian adalah sistem teknologi dan informasi pemerintahan. Pada sektor ini juga termasuk dalam bidang bisnis, dan memperkuat kordinasi dengan kabinet dalam menanggulangi kejahatan sistem teknologi dan informasi komputer (*cyber attack*).

BAB III

PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL INGGRIS (NATIONAL SECURITY COUNCIL OF UNITED KINGDOM)

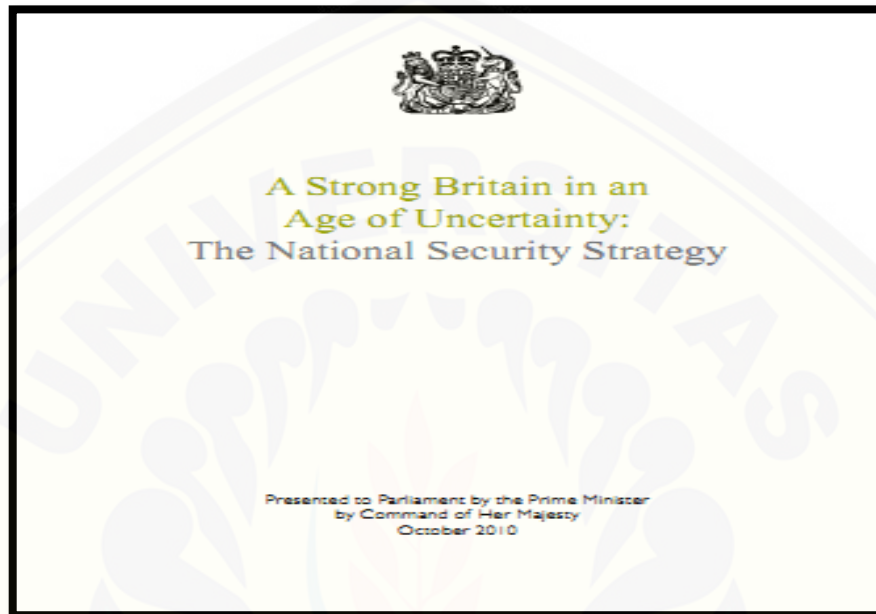
3.1 Landasan Hukum National Security Council Of United Kingdom

Perumusan dari suatu sistem pertahanan dan keamanan menjadi penting dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan alam, rakyat, serta kedaulatan suatu negara. Kebijakan pertahanan dan keamanan negara pada umumnya tertuang dalam sebuah format yang disebut dengan Buku Putih atau *White Paper* serta format lain seperti Undang-undang. Perumusan sistem pertahanan dan keamanan negara seperti yang tertuang dalam Buku Putih pertahanan negara dimaksudkan sebagai panduan dan landasan strategis negara dalam menjalankan tugas pokoknya. Dalam kaitannya mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris pada karya ilmiah ini, terdapat dua pedoman kebijakan yang dijadikan acuan pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council*. Kedua pedoman tersebut yaitu “*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*” dan “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*” yang dikeluarkan pada Oktober 2010.

3.1.1 Dokumen Rancangan Kebijakan Keamanan dan Tujuan Nasional : “A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy” Tahun 2010

Dokumen “*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*” merupakan dokumen pertama dalam melakukan perumusan kebijakan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan Inggris selama beberapa tahun kedepan (dan akan diperbaharui setiap lima tahun sekali). Dokumen tersebut dikeluarkan pada Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Deputy Perdana Menteri Nick Clegg.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa tugas utama sebuah negara (dalam hal ini Inggris) adalah keamanan negara itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas utama diperlukan suatu rancangan dan formulasi kebijakan yang komprehensif.



Gambar 3.1 Dokumen *“A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy”*

Sumber : HM Government. 2010. *A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*. London : The Stationery Office Limited.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, bentuk ancaman yang ada bertransformasi dari yang semula hanya melibatkan isu militer suatu negara melebar ke tindakan yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Bagi Inggris, seperti yang tertuang dalam dokumen *“A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy”* ancaman yang dihadapi negara saat ini diantaranya terorisme, *cyber attack*, penggunaan senjata kimia dan biologi yang dapat mengancam kehidupan manusia maupun lingkungan. Selain itu, ancaman terhadap negara juga mengarah pada adanya krisis energi. Krisis energi tersebut pada akhirnya akan mengancam terhadap ketersediaan pangan dan suplai air bagi warga negara jika tidak ditangani secara serius. Adanya krisis energi juga

menjadi ancaman terhadap keamanan energi (*energy security*) bagi suatu negara, mengingat energi merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian negara. Mendasari hal tersebut, konsep keamanan nasional Inggris juga mengalami perubahan dari konsep sebelumnya yang pernah dibuat sepuluh hingga duapuluh tahun bahkan lima puluh tahun yang lalu.⁹⁰

Pedoman kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris “*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*” terdiri dari beberapa bab. Bab tersebut diantaranya, *pertama* berisi tentang konteks strategis dalam pandangan Inggris. *Kedua*, mengenai peran dan posisi Inggris dalam dunia internasional. *Ketiga*, berisi tentang resiko dan ancaman yang dihadapi oleh Inggris. Bab *keempat* berisi tentang respon dan langkah yang dilakukan oleh Inggris dalam menghadapi ancaman yang datang. Selain itu, dalam dokumen ini juga ditekankan pentingnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, badan intelijen, dan angkatan bersenjata Inggris dalam penanganan ancaman secara efektif.⁹¹ Dalam hal ini, pemerintah Inggris melakukan pendekatan secara holistik berdasarkan pemikiran individu, lembaga dan departemen untuk mengambil perspektif yang lebih luas dari keseluruhan struktur kelembagaan nasional.⁹²

3.1.2 Dokumen Panduan Pelaksanaan Keamanan Nasional : “Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review” Tahun 2010

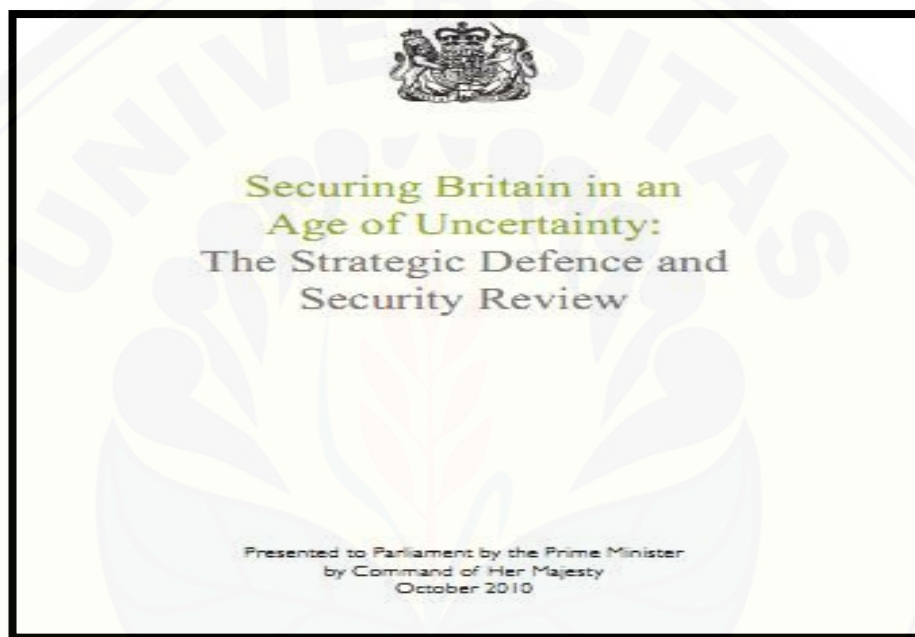
Pedoman selanjutnya mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris adalah dokumen “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*”. Dokumen tersebut merupakan pengejawantahan dari dokumen sebelumnya atau “*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*”. Dalam dokumen ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Inggris dalam

⁹⁰ HM Government. 2010. *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*. Op. Cit. Hal.03

⁹¹ *ibid*

⁹² Tim Redaksi. “*Dewan Keamanan Nasional : The National Security Council Of United Kingdom*.” Defender. Edisi 57/2012. Hal.57

menghadapi segala bentuk ancaman. Selain itu, juga dibahas mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembagian tugas terhadap lembaga dan instansi yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dijelaskan secara terperinci dalam dokumen ini. Pembagian tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan Inggris terbagi dalam beberapa instansi seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian serta Badan Intelijen.



Gambar 3.2 Dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*.

Sumber : HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited.

Sama halnya dengan dokumen dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sebelumnya (*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*), dokumen kedua ini juga terdiri dari beberapa bab. Bab yang ada pada dokumen ini lebih menekankan pada kerangka tugas (*task force*) dari beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada bab *pertama* berisi tentang *National Security Tasks and Planning Guidelines*. Bab tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah Inggris mengambil kebijakan

terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional, intelijen, serta pengembangan kebijakan luar negeri. Manajemen pertahanan dan keamanan dan pendekatan yang harus dilakukan menjadi agenda penting pada bab ini, selain itu juga diulas mengenai pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang baru.⁹³

Bab *kedua* berisi tentang gambaran umum pertahanan (*defense*) Inggris dari segi kapabilitas dan kekuatan nasional. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai anggaran pertahanan yang akan digunakan selama kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan luar negeri, pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana keterlibatan Inggris dalam menjaga perdamaian internasional dibawah mandat PBB serta aliansinya dengan NATO. Fokus Inggris dalam menjaga perdamaian internasional menitikberatkan pada pembangunan stabilitas keamanan di Irak dan Afghanistan. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan panjang lebar mengenai, prinsip, pendekatan, dan perencanaan terkait tugas angkatan bersenjata Inggris dalam menjaga wilayah teritori Inggris baik di segi internal maupun eksternal yang merupakan bagian teritorial Inggris.⁹⁴

Pada Bab *ketiga* merupakan salah satu bab yang menarik dalam rancangan pembuatan kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris. Bab ini menjelaskan mengenai pemanfaatan energi nuklir. Bagi Inggris, nuklir merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan *deterrent effect* (daya tangkal) terhadap ancaman yang akan datang. Namun, pemanfaatan nuklir tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan senjata pembunuh massal. Keberadaan suplai energi nuklir yang dimiliki Inggris akan digunakan untuk pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Pemanfaatan energi nuklir untuk kapal selam dimaksudkan untuk efisiensi bahan bakar dan sumber daya. Dalam hal ini Inggris juga akan mengurangi jumlah pengoperasian kapal selam dari sebelumnya berjumlah 48 menjadi 40 unit pada tahap pertama. Untuk selanjutnya, dari 160 unit menjadi sekitar 120 unit. Pengurangan jumlah armada kapal selam tersebut

⁹³ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited. Hal.09

⁹⁴ *Ibid.* Hal.15

diharapkan dapat mengalihkan anggaran untuk keperluan pertahanan dan keamanan lain yang lebih mendesak.⁹⁵

Bab keempat dari dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review* berisi tentang konsep keamanan nasional yang lebih luas. Konsep keamanan yang lebih luas ini dibuat berdasarkan penilaian terhadap resiko keamanan nasional yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah Inggris dalam menghadapi masalah keamanan. Adapun resiko ancaman terhadap keamanan nasional bagi Inggris teridentifikasi kedalam beberapa sektor, yang mana sektor tersebut mendapatkan prioritas utama terhadap resiko yang ditimbulkan.⁹⁶ Ancaman yang mendapatkan prioritas utama di Inggris dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Prioritas Ancaman Utama terhadap Inggris

NO	Jenis Ancaman	Keterangan
1	Terorisme	Ancaman terorisme yang paling signifikan terhadap Inggris berasal dari Al-Qaeda dan residu teroris yang berkaitan dengan Irlandia utara yang meningkatkan perhatian. Dimana terdapat kampanye kekerasan dari kelompok kecil anggota republikan yang tidak sepakat
2	Instabilitas dan Konflik di Luar Negeri	Instabilitas dan konflik luar negeri dapat menimbulkan resiko bagi Inggris. Negara yang mengalami konflik seperti Somalia dan Yaman berpotensi mengacaukan perdagangan dan pasokan energi Inggris.
3	<i>Cyber Security</i>	Resiko terhadap adanya <i>cyber attack</i> dapat membahayakan sistem informasi bagi data intelijen dan keamanan Inggris.

⁹⁵ *Ibid.* Hal.38

⁹⁶ Tim Redaksi. “*Undang-undang Kamnas Inggris : Perspektif Perbandingan*”. Defender. Edisi 56/2012. Hal. 59

NO	Jenis Ancaman	Keterangan
4	Darurat Sipil	Pada hal ini keadaan darurat sipil diantaranya adalah ancaman bencana alam, kecelakaan besar, dan tindakan kejahatan yang dapat merusak kesejahteraan penduduk maupun lingkungan Inggris.
5	Keamanan Energi	Inggris menghadapi resiko terkait dengan kemampuan terhadap akses suplai yang beragam yang sangat penting bagi stabilitas dan ekonomi Inggris.
6	Kejahatan Terorganisir	Akibat kemajuan teknologi, aktivitas kejahatan terorganisir di Inggris diperkirakan akan meningkat selama lima tahun mendatang
7	Keamanan Perbatasan	Seiring meningkatnya arus globalisasi mengakibatkan pula arus kejahatan yang melewati perbatasan Inggris.
8	Pengawasan Senjata dan Kontra Proliferasi	Ancaman terhadap Inggris juga dimungkinkan berasal dari teroris yang menggunakan persenjataan nuklir, biologi, kimia dan radiologi (CBRN).

Sumber : Tim Redaksi. “*Undang-undang Kamnas Inggris : Perspektif Perbandingan*”. Defender. Edisi 56/2012. Hal. 59-61

Pada bab kelima dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review* berisi tentang *Alliance and Partnership*. Bab ini menjelaskan penedekatan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dalam berinteraksi dengan negara lain dalam dunia internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Terdapat penekanan mengenai aliansi dan peran serta Inggris dalam mengatasi masalah keamanan internasional, penekanan tersebut diantaranya:⁹⁷

⁹⁷ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal. 59

- membangun kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat
- menerapkan model baru dalam membangun kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dengan negara aliansi
- mengefektifkan peranan dalam dunia internasional melalui PBB
- menjadikan NATO sebagai dasar kerjasama dalam bidang pertahanan
- mempromosikan keamanan dan kemakmuran terhadap Uni Eropa.

Pada bab *keenam*, atau bab terakhir berisi tentang *Structural Reform and Implementation*. Bab ini menjelaskan mengenai reformasi struktur instansi dan pembentukan instansi atau lembaga baru dalam menangani ancaman yang dihadapi Inggris. Adapun instansi atau lembaga yang mengalami reformasi diantaranya adalah dalam bidang intelijen dan badan keamanan lainnya seperti kepolisian. Seiring meningkatnya ancaman yang dihadapi Inggris, maka pemerintah Inggris merasa perlu untuk membentuk unit baru disamping unit yang ada. Unit baru yang ada tersebut diantaranya adalah Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council Of United Kingdom*. Tujuan dibentuknya lembaga baru tersebut tidak lain adalah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Inggris baik di wilayah internal (domestik) maupun wilayah eksternal teritori Inggris di luar negeri yang tergabung dalam persemakmuran (*commonwealth*).⁹⁸

3.2 Pembentukan National Security Council Of United Kingdom

Munculnya isu-isu hubungan internasional baru pasca Perang Dingin dalam perkembangannya mendorong negara-negara untuk mendefinisikan kembali kebijakan pertahanan, keamanan negara dan tujuannya serta kebijakan luar negerinya. Termasuk mendefinisikan kembali ancaman yang dapat membahayakan negara. Dalam masalah pertahanan dan keamanan Inggris yang menjadi fokus dalam karya ilmiah ini, penulis melihat bahwa terdapat dua tujuan utama strategi keamanan Inggris yaitu *pertama* menjamin keamanan dan ketahanan Inggris melalui perlindungan terhadap penduduk, ekonomi,

⁹⁸ *Ibid.* Hal.67

infrastruktur, serta teritorial dari seluruh ancaman dan resiko yang dapat mempengaruhi Inggris secara langsung. *Kedua*, membentuk dunia yang stabil melalui tindakan pencegahan terhadap kemungkinan resiko yang dapat membahayakan kepentingan Inggris di dalam dan diluar negeri. Selain itu juga diperlukan adanya penerapan kekuatan instrumen yang dimiliki dalam rangka membentuk lingkungan global yang dapat menangkal segala potensi ancaman.⁹⁹

Untuk mewujudkan konsepsi pertahanan dan keamanan yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya diatas, pemerintah Inggris membentuk satuan komite kabinet yang menangani masalah pertahanan dan keamanan. Komite kabinet tersebut adalah Dewan Keamanan Nasional atau yang dikenal dengan *National Security Council of United Kingdom*. *National Security Council of United Kingdom* merupakan forum utama pemerintah untuk secara bersama-sama membahas atau mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional serta bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya.¹⁰⁰

3.2.1 Sejarah Pembentukan

Sejarah pembentukan Dewan Keamanan Nasional Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* pertama kali muncul pada tahun 1916. Sejarah panjang yang perlu untuk di analisis kembali guna mempelajari evolusi kebijakan koordinasi pusat terhadap bidang Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, ketahanan, dan Intelijen untuk memahami perbedaan konfigurasi kebijakan yang telah di terapkan di Inggris guna untuk menilai seberapa inovatif dewan keamanan nasional yang baru dibentuk dan untuk menentukan masalah apa yang tengah dihadapi oleh Inggris

⁹⁹ Tim Redaksi. “*Undang-undang Kamnas Inggris : Perspektif Perbandingan*”. *Op.Cit*

¹⁰⁰ Tim Redaksi. “*Dewan Keamanan Nasional : The National Security Council Of United Kingdom*.” *Op.Cit*.

3.2.1.1 Sejarah Komite Koordinasi : The Committee of Imperial Defence

Dalam menganalisis NSC dengan tepat, perlu dimulai dari sejarah Sekretariat Kabinet di tahun 1916 dan badan yang telah dibentuk lebih awal yakni The Committee of Imperial Defence (CID).¹⁰¹ Sebelum tahun 1916, Kabinet Inggris bekerja tanpa ada dukungan dari Sekretariat khusus, sidang kabinet pada era tersebut berjalan sangat lama, dikarenakan para menteri hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai kebijakan apa yang tengah dibahas.¹⁰² Sehingga dibentuklah Sekretariat Kabinet guna memudahkan para menteri dalam berkoordinasi. Wilyah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan mendapat keuntungan pertama ketika Sekretariat Kabinet dibentuk, sejak tahun 1885 Colonial Defence Committee (CDC) telah berusaha mengkoordinasi perjanjian pertahanan wilayah metropolitan, dominion dan koloni.¹⁰³ Hingga Perdana Menteri Arthur Balfour di tahun 1904 mengubah CDC yang ‘lemah dan informal’ menjadi CID dan membentuk sekretariat kecil permanen untuk mendukung kerja CID.¹⁰⁴

Pecahnya Perang Dunia I di tahun 1914, kepala sekretariat CID Maurice Hankey hanya ditugaskan Perdana Menteri Asquith untuk mengatur jalannya koordinasi pengambilan keputusan masa perang. Namun usaha Perdana Menteri Asquith dalam mengkoordinasi pihak sipil dan militer dalam menciptakan kebijakan masa perang tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya pada bulan Desember 1916 Penerus PM Asquith, Lloyd George, membentuk “*War Cabinet of Five*” untuk menghindari terulangnya pembagian otoritas pemerintahan.¹⁰⁵

¹⁰¹ Strachan, H., 'A War Examined: Allies and ethics: British national strategy: Who does it?', *Parameters*, vol.43 (2), 2013, Hal.49

¹⁰² Naylor, J.F., 'The Establishment of the Cabinet Secretariat', *The Historical Journal*, vol.14, no.4, 1971., Hal.783

¹⁰³ Gordon, D.C. 1962. 'The Colonial Defence Committee and Imperial Collaboration: 1885-1904' *Political Quarterly*, Vol.77, No.4 (December), pp.526-545

¹⁰⁴ Johnson, F.A. 1961. 'The British Committee of Imperial Defence: Prototype of U.S. Security Organization'. *The Journal of Politics*, Vol.23, No.2 (May), p.235

¹⁰⁵ Naylor, J.F. 2004. *Hankey, Maurice Pascal Alers, first Baron Hankey (1877-1963)*, Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, 2004; online edn, Jan 2008 [http://www.oxforddnb.com/view/article/33683, diakses pada 10 september 2016]

Perubahan tersebut menjadi awal mula dibentuknya *Cabinet Office* dan *Cabinet Secretary* di masa sekarang.

CID terus berkembang hingga pecah perang dunia II di tahun 1939, CDC bergabung dengan CID dengan menjadi salah satu sub-komite, dan membentuk beberapa sub-komite lain di CID termasuk, *The Chief of Staff Committee*.¹⁰⁶ Setelah *Foreign Office* mencoba membuat satuan tugas intelijen politik yang hanya berumur pendek, akhirnya CID membentuk sub-komite *Joint Intelligence Comite* (JIC) di tahun 1936. Walaupun JIC murni organisasi militer namun di tahun 1940 pihak Intelijen sipil juga termasuk sebagai salah satu anggota. Dan di tahun 1957 JIC berada dibawah pengawasan *Cabinet Office*, mengingat pertumbuhan keterlibatan sipil dan meningkatnya kepentingan intelijen politik.¹⁰⁷

Kunci CID dalam mengkoordinasi dan menyampaikan fungsinya adalah dengan memilih tokoh – tokoh pemimpin dari setiap departemen dan layanan dalam setiap pertemuan CID. Di tahun 1947, berubah nama menjadi *Defence Committee* (Komite Pertahanan), namun keanggotaannya sedikit berbeda dari CID di dekade sebelumnya, yang beranggotakan:¹⁰⁸

- Prime Minister
- Minister of Defence
- Lord President of the Council
- Foreign Secretary
- Chancellor of the Exchequer
- The Service Minister
- Minister of Labour
- Minister of Supply
- The Chief of Staff

¹⁰⁶ Stanbridge, B.G.T., 'The Chiefs of Staff Committee: 50 years of joint direction', *RUSI Journal*, 118.4, 1973, pp.25-31.

¹⁰⁷ Goodman, M. 'Learning to Walk: The origins of the UK's Joint Intelligence Committee', *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, vol.21(1), 2007, pp.40-56.

¹⁰⁸ Johnson. F. A, *Op.cit* p.254

Sama seperti dengan NSC, menteri lainnya yang menghadiri pertemuan CID harus atas perintah Perdana Menteri, sesuai dengan masalah yang tengah di bahas.

Kepala CID yang pertama Sir George Clarke, telah mampu membawa CID kedalam Rutinitas birokratik. Clarke mengakui bahwa tantangan dari setiap penasihat perdana menteri adalah menghadapi departemen pusat yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.¹⁰⁹ Sekretaris CID Maurice Hankey menggunakan model CID untuk membentuk dasar dari struktur komite kabinet dan kesekretariatan yang masih digunakan hingga sekarang. Struktur dari masalah pertahanan dan keamanan telah dan masih tetap terikat erat dengan hubungan antara Perdana menteri, kementerian dan kabinet terpilih yang bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tensi antar departemen dan layanan, dukungan perdana menteri menjadi krusial dalam keefektifitasan kerja CID. Pada awal dekade CID sering menderita atas kurangnya komitmen dari perdana menteri untuk memastikan keputusan yang dibuat di-implementasikan. Walaupun dengan catatan yang buruk, CID secara signifikan membuat gebrakan yang mampu merubah kebiasaan pada pusat pemerintahan, diantaranya :¹¹⁰

- Sekretariat CID menyediakan dukungan yang sangat dibutuhkan Perdana Menteri dalam memfasilitasi rencana strategis dan pembuatan keputusan
- Politisi dan pemangku jabatan lainnya baik militer ataupun sipil diperlakukan secara sama dan menjadi anggota aktif.
- Pada masa rivalitas antar departemen, komite koordinasi menyatukan para perwakilan dari militer dan departemen sipil, dengan sistem keanggotaan yang fleksibel yang ditentukan oleh Perdana Menteri atas dasar Ad hoc.

Kunci dari tantangan operasional dan fitur struktural dari NSC banyak dibayangi oleh Lloyd George *War Cabinet* dan CID pada era sebelum perang. Sebagai sekretaris CID, Hankey dibutuhkan untuk menumbuhkan reputasi kepercayaan antara PM, Menteri Departemen, dan Kepala Militer. CID dan

¹⁰⁹ Gooch, J., 'Sir George Clarke's career at the Committee of Imperial Defence', *The Historical Journal*, vol.18, no.3, 1975, p.557

¹¹⁰ Johnson F.A, *Op.cit*, p.235

Skretariat Kabinet adalah bagian permanen dari mesin pemerintahan, namun seperti lembaga baru lainnya keberadaan dua lembaga ini masih memiliki tanda pribadi Lloyd George yang sangat kuat. Hal ini merefleksikan posisi dari NSC dan *National Security Secretariat* yang akan menghadapi pemilu di bulan mei 2015. Keberadaan CID dan Sekretariat Kabinet sempat diragukan setelah kekalahan Lloyd George di tahun 1922, namun Perdana Menteri Hankey ternyata cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri.¹¹¹ Sekretariat dibutuhkan untuk melihat keseimbangan secara cermat untuk menjaga kerjasama antar departemen terkait, jika sekretaris dan staff-nya menjadi departemen yang memiliki kepentingan yang independen dan kekuatan untuk membuat kebijakan maka CID akan gagal. Pada kesempatan lain sama seperti NSC, CID juga menjadi bipartisan forum dimana para pemimpin oposisi beberapa kali ikut bergabung dalam diskusi sub-komite.¹¹²

Selain itu sekretariat CID dirancang untuk tidak mengambil tindakan, melainkan melihat tindakan yang diambil oleh departemen yang bertanggung jawab setelah kebijakan dibuat.¹¹³

CID menunjukkan adanya tantangan abadi untuk mengtur berkoordinasi dalam bidang Luar Negeri dan Pertahanan dalam pemerintahan Inggris. Dukungan aktif dari perdana menteri sangat penting demi menunjang keberhasilan setiap komite. Namun, keberadaan komite koordinasi pusat saja tidak cukup untuk menjaga keharmonisan hubungan antar departemen, koordinasi yang efektif membutuhkan sosok yang memiliki pengalaman dan diplomasi di pemerintahan pusat. Perlu waktu 20 tahun untuk Hankey menjalankan fungsi ini, pada saat yang sama sekretaris Hankey harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada kabinet serta menetapkan penggantinya yang tepat, yang memiliki pengalaman panjang dalam segi Pertahanan, Intelijen dan Kebijakan luar negeri.

¹¹¹ Naylor J.F, *Op.cit*

¹¹² Johnson F.A *Op.cit* p.236

¹¹³ Johnson F.A *ibid.* p.284

3.2.1.2 Mempersiapkan keamanan Nasional 1979 – 2010

Walaupun tergambar jelas kesamaan antara NSC dengan CID, namun juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara NSC dengan pendahulunya tersebut. NSC ingin berusaha membawa semua aspek kebijakan strategis seperti Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Ketahanan dan Intelijen kedalam naungan sebuah struktur komite dan sekretariat yang tidak diatur dalam fitur kesekretariatan dan komite sebelumnya. Hal ini dilakukan karena konsep keamanan nasional telah berubah, lebih dari seabad lalu, komite kabinet dan struktur lainnya telah mengatur semua aspek secara individu. Sebelumnya terdapat koneksi yang berbeda antara pertahanan, luar negeri, keamanan, ancaman nuklir dan Intelijen. Ancaman terorisme mencerminkan arti penting dari keamanan nasional yang memiliki fokus signifikan pada koordinasi intelijen dan upaya anti-terorisme. Pada bagian berikut terdapat tiga aspek yang berhubungan dengan keamanan nasional: i.) Koordinasi Intelijen dan respon terhadap terorisme; ii.) Tugas *Senior Adviser* kepada Perdana Menteri; dan iii.) Koordinasi di masa perang. Tiga hal tersebut mengilustrasikan sedikit tantangan yang dihadapi NSC sekarang, juga tentang sistem yang telah mampu untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai gaya pemerintahan perdana menteri dan prioritas.

i. Pusat Koordinasi Intelijen dan Respon terhadap Terorisme

Pengawasan dan penentuan arah kebijakan, prioritas dan kapabilitas intelijen adalah bagian penting dari koordinasi keamanan nasional. Badan intelijen berkontribusi memberikan informasi dan operasi untuk mengamankan negara dari ancaman *serious organised crime*, terorisme, dan badan intelijen negara musuh. Keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas dalam strategi intelijen dan lebih berfokus pada masalah operasional membutuhkan koordinasi yang efektif dari empat badan intelijen utama yakni *The Security Service* (SyS/MI5), *The Secret Intelligence Service* (SIS/MI6), *Government Communication Headquarter* (GCHQ) dan *Defence Intelligence* (DI). Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah banyak terlihat perubahan dalam struktur organisasi dan kepemimpinan di dalam komunitas intelijen dan hubungannya dengan berbagai bagian keamanan nasional yang berbeda. Pemerintah memiliki tujuan untuk membawa intelijen

kedalam pembuatan kebijakan untuk memaksimalkan kegunaannya. Namun intelijen dan kebijakan menjadi terlalu dekat, pernyataan resmi seperti *1983 Falklands Island Inquiry* dan *2004 Review of Intelligence on Weapon of Mass Destruction* menekankan akan perlunya untuk menegakan independensi dan obyektifitas penilaian intelijen.

Pada era Perang Dingin, masalah intelijen dan keamanan diawasi oleh *Ministerial Committee* di ketuai oleh Perdana Menteri dan beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, *Home Secretaries*, dan Menteri Keuangan. Komite ini didukung oleh *Committee of Senior Official* yang diketuai oleh *Cabinet Secretary* dan beranggotakan *permanent secretaries* dari Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri, bersama dengan Ketua JIC dan *Intelligence Coordinator*.¹¹⁴

Ketua dari JIC dipilih oleh *Foreign Office*, setelah perang Falkland, seperti yang tertuang dalam *The Franks Report* di tahun 1983 berpendapat bahwa penilaian Intelijen membutuhkan pemisahan dari kebijakan *Foreign Office*. Frank merekomendasikan ketua JIC harus dipilih langsung oleh Perdana Menteri dan bertugas dibawah *Cabinet Office* yang memiliki akses langsung ke perdana Menteri.¹¹⁵ Perdana Menteri Margaret Thatcher kemudian menunjuk Sir Percy Cradock sebagai ketua JIC di tahun 1985, pada era Thatcher ketua JIC memiliki peran ganda sebagai penasihat Perdana Menteri bidang kebijakan luar negeri.¹¹⁶ Pada era Perdana Menteri Tony Blair, Peter Ricketts memiliki posisi ganda dengan memegang kendali JIC dan *Intelligence Coordinator* yang kemudian berubah menjadi *National Security Adviser* (NSA). Pada dekade berikutnya, pemimpin JIC tidak selalu memiliki posisi ganda.¹¹⁷

¹¹⁴ Cabinet Office, 2010, *Notes on the Central Intelligence Machinery Division of Cabinet Office Records and Other Intelligence-related Cabinet Office Records*, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60940/notes-on-cim-division.pdf (diakses pada 15 september 2016)

¹¹⁵ Franks, O.S., *Falklands Islands Review: Report of a Committee of Privy Councillors, Command 8787 (The Franks Report)*, January 1983, London: HMSO, <http://www.margaretthatcher.org/document/109481> (diakses pada 15 September 2016)

¹¹⁶ Cradock, P, 1997, *In Pursuit of British Interests*, London: John Murray, Hal..43.

¹¹⁷ BBC News, 'New JIC chair William Ehrman profiled', http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3911385.stm (diakses pada 16 September 2016)

Selain dalam bidang intelijen, telah terjadi perubahan yang signifikan di dalam koordinasi pemerintahan dalam respon terhadap terorisme dan pendekatan terhadap isu – isu keamanan dan ketahanan yang lebih luas. Sejak terjadinya serangan teroris di Amerika di tahun 2001 dan di London di tahun 2005, ancaman terorisme telah didefinisikan menjadi masalah keamanan nasional dan menimbulkan peningkatan signifikan dalam investasi di bidang intelijen dan keamanan. Kebutuhan Inggris akan adanya respon yang terkoordinasi mendorong dibentuknya *Counter-Terrorism Strategy* (CONTEST) di tahun 2003, dan pembentukan *Join Terrorism Analysis Centre* (JTAC) di tahun 2007. Dua lembaga tersebut menjadi titik awal dibentuknya *Office for Security and Counter Terrorism* (OSCT) di bawah naungan *Home Office*.¹¹⁸

Hingga tahun 2007, pembuatan keputusan di dalam kabinet terfokus kepada terorisme internasional dibawah koordinasi *Overseas and Defence Policy* (OD) sub-komite di bidang *International Terrorism* (OD(IT)), dipimpin oleh Perdana Menteri. Sebelum mendurnya Tony Blair sebagai Perdana Menteri di tahun 2007 Tony Blair menata kembali sistem keamanan nasional, dengan mengganti OD(IT) sub-komite dengan *Ministrial Committee on Security and Terrorism*, yang juga mencakup aspek redikalisasi dari *Cabinet Domestic Affair Committee*.¹¹⁹

ii. Penasihat Perdana Menteri

Didalam jalannya roda pemeritahan Inggris terdapat *Senior Adviser* yang berfungsi sebagai penasihat Perdana Menteri. Walaupun terdapat menteri kabinet yang memiliki kemampuan di bidangnya, Perdana Menteri memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan pendekatan koheren dalam keamanan nasional untuk membuat kebijakan dan mengawasinya dalam merespon krisis. Terdapat berbagai perbedaan susunan pejabat senior yang mengisi tugas sebagai penasihat Perdana Menteri. Posisi penasihat pada NSA dibuat untuk memperoleh fokus

¹¹⁸ Home Office, 2011, *Policy Paper: Counter-terrorism strategy (CONTEST)*, <https://www.gov.uk/government/publications/counter-terrorism-strategy-contest> (diakses pada 16 September 2016)

¹¹⁹ Hennessy P, 2002, *The Secret State: Preparing for the worst, 1945-2010*, London : Penguin, Hal.378-381

tunggal pada tiap koordinasi di setiap isu yang tengah dibahas, namun masukan – masukan lain dari kementerian tetap berpengaruh. Posisi – posisi penasihat Perdana Menteri di dalam tubuh NSA dijabat oleh pejabat senior dalam pemerintahan dan militer; kepala dari berbagai Sekretariat, Layanan dan Agensi; Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Perdana Menteri dan Penasihat politik lainnya.

Sebelum terbentuk NSA penasihat perdana menteri telah ada dan menjadi satu dengan sekretaris pribadi kementerian luar negeri, yang memiliki peran memberikan saran–saran penting dalam pembuatan kebijakan departemen luar negeri. Namun di tahun 1980-an terjadi perubahan, Margaret Thatcher yang kecewa atas kinerja kementerian luar negeri dalam perang Falkland, menginginkan sosok pejabat senior yang menjadi penasihat di dalam staf pribadinya yang bertugas untuk memperingatkan Thatcher tentang masalah yang akan datang dan jika diperlukan akan memberikan saran-saran yang independen.¹²⁰

Sampai akhir dekade 1980-an *Private Office* hanya mengandalkan satu sekretaris pribadi kementerian luar negeri, tidak mendapatkan sekretaris tambahan hingga era Perdana Menteri John Major.¹²¹ Pada awal dekade 1990-an Sir Stephen Wall ditunjuk sebagai sekretaris kementerian luar negeri dalam *Private Office* dalam pemerintahan PM John Major, Wall menjelaskan bahwa tanggung jawabnya sangat luas, dari pembuatan kebijakan luar negeri hingga masalah Irlandia Utara dan pertahanan. Walaupun Stephen Wall berada di bawah kendali *Private Office*, namun Wall merasa dia tidak memiliki kapasitas untuk merubah tanggung jawabnya untuk dapat menambah kontribusinya terhadap Kementerian Luar Negeri.¹²²

Perubahan signifikan terjadi ketika Tony Blair terpilih kembali untuk yang kedua kalinya, tepatnya di bulan Juni 2001 Sekretaris Kabinet mengakui kapasitas urusan luar negeri yang tersedia untuk perdana bisa ditambahkan dengan memanggil kedua pemimpin dari *Cabinet Office European Secretariat* dan OD

¹²⁰ Cradock, P, 1997, *In Pursuit of British Interests*, London: John Murray, Hal.8

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wall, S, 2008, *A Stranger in Europe: Britain and the EU from Thatcher to Blair*, Oxford: OUP, Hal. 196

Secretariat menjadi penasihat perdana menteri di bidang Eropa dan kebijakan luar negeri. Sir Stephen Wall yang memiliki tugas ganda di pemerintahan selain menjadi sekretaris kementerian luar negeri juga menjabat sebagai penasihat perdana menteri di bidang eropa, mencerminkan bahwa tugas yang di berikan oleh perdana menteri adalah hal yang wajar bagi perdana menteri untuk membentuk tim-kecil demi menyelesaikan masalah luar negeri dari pada menyerahkannya kepada satu orang. Wall berpendapat perubahan yang dilakukan oleh perdana menteri Blair menciptakan kapasitas yang lebih besar bagi ide organisasi independen untuk bernegosiasi atas nama perdana menteri dan untuk pelaksanaan kebijakan yang ada sebelumnya.¹²³

iii. Mengatasi konflik dan peperangan

Koordinasi dalam pengambilan keputusan selama masa konflik merupakan ujian yang cukup besar bagi setiap pemerintahan. Selama masa Perang Dingin pengiriman pasukan militer Inggris untuk operasi militer di luar negeri harus dengan kebijakan khusus. Di dalam negeri, pengiriman pasukan dalam Operasi Banner terus dilakukan tanpa harus ada aturan khusus terutama di wilayah Irlandia Utara yang berlangsung dari bulan Agustus 1969 sampai Juli 2007. Namun fakta menunjukkan sejak era Perang Dingin, Angkatan bersenjata Inggris yang telah bertugas di luar negeri kadang tanpa adanya kebijakan khusus seperti diantaranya invasi atas Iraq dan Afganistan. Selama Perang Dunia 2, mesin pemerintah yang mengatur kebijakan perang sangat luas dengan menyatukan seluruh pejabat di komite pemerintahan dan militer menjadi satu di dalam *War Cabinet*. Semasa perang kabinet kerja pemerintah di buat seminim mungkin dibandingkan kabinet di masa damai, perdana menteri yang seringkali merangkap sebagai menteri pertahanan diberikan pengaruh yang kuat pada saat pengambilan keputusan didalam kebijakan *War Cabinet*.

Selama era Perang Dingin, ancaman nuklir Uni Soviet mengharuskan perluasan birokrasi di dalam komite kabinet, militer, dan intelijen, selama perang dunia dua, kabinet inggris telah memisahkan komite kebijakan pertahanan dan luar negeri sampai tahun 1963. Ketika *Defence and Overseas Policy Committee*

¹²³ *Ibid.* Hal. 197

(OD atau DOPC) dibentuk. Sepanjang periode Perang Dingin, DOPC duduk didalam forum utama dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan dan luar negeri.¹²⁴ DOCP di bantu oleh kelompok sekretaris permanen yakni *Overseas Policy and Defence Official Committee (OD(O))*, yang juga didukung oleh kantor sekretariat kabinet OD. Di tahun 2007 perdana menteri Gordon Brown mengubah nama DOPC menjadi *the Ministerial Committee on National Security, International Relation and Development (NSID)*.¹²⁵

OD berkerja sebagai koordinator utama dalam *War Cabinet* selama berbagai konflik. Selama invasi Argentina terhadap kepulauan Falkland di bulan April 1982, sekretaris kabinet Sir Robert Amstrong mengerjakan beberapa fungsi dari *National Security Adviser*, dengan mengkoordinasi pejabat militer dan sipil di dalam pemerintahan untuk persiapan transisi menuju *War Cabinet*. Amstrong menganjurkan untuk membuat *War Cabinet* bayangan di bawah OD sub-komite dari pada membuat *War Cabinet* yang resmi, yang dinamai OD (*South Atlantic*) (OD(SA)) yang beranggotakan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Pertahanan, dan Luar Negeri, dan *Paymaster General*. Menteri – menteri lainnya turut hadir apabila diperlukan. Beberapa penasihat senior ikut hadir dalam pertemuan OD(O)(SA) dan juga beberapa menteri dan pejabat sipil dan militer ikut hadir didalam termasuk Sir Amstrong.¹²⁶ *War Cabinet* yang dipimpin oleh Sir Amstrong, didukung oleh komite pendamping dari OD(O)(SA). tugas Amstrong adalah memastikan bahwa OD(O)(SA) dan pejabat lainnya untuk tidak bertindak melawati batas kewenangan mereka didalam merancang program dan juga memastikan kebijakan pemerintah telah dijalankan.¹²⁷

Sebagai perdana menteri Margaret Thatcher bergantung kepada penasihat pribadinya dan para menterinya dari pada memilih sub-komite formal yang ada didalam kabinet. Sir Percy Cradock mencatat terdapat perbedaan signifikan antara Margaret Thatcher dan penggantinya John Major. Kabinet Thatcher dalam setiap

¹²⁴ Cabinet DOPC, 1979, *Northern Ireland: The overall situation*, The Margaret Thatcher Foundation.

¹²⁵ Davies, P., 2011, 'Twilight of Britain's Joint Intelligence Committee?' *International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence*, No. 24 vol. 3. Hal.428

¹²⁶ Hastings M., & Jenkins S., 2012, *Battle for the Falklands*, London: Pan Macmillan, hal.103

¹²⁷ Hensey P. *Op.cit.* Hal. 228

rapatnya jarang sekali membahas kebijakan luar negeri. Pembuatan keputusan yang sebenarnya terjadi di tubuh sub-komite OD atau sering juga didalam kelompok-kelompok *ad hoc* kecil yang terdiri dari menteri dan penasihat. cara-cara ini lebih disukai oleh perdana menteri.¹²⁸ Tony Blair juga menggunakan OD “*War Cabinet*” di awal konflik militer yang terjadi di masa pemerintahannya, tetapi lebih banyak menggunakan proses informal dalam memutuskan untuk mengambil langkah militer terhadap Irak yang menghasilkan kritikan dari para pejabat hingga pernyataan resmi.¹²⁹

iv. Jalan menuju NSC

Di awal pemerintahannya perdana menteri Gordon Brown menghapus komite yang dibentuk oleh Tony Blair yaitu Ministerial Committee on Security and Terrorism, dan menggantinya di bulan Juli 2007 dengan *Ministerial Committee on National Security, International Relations and Development* - NSID munculnya *development* menjadi salah satu bagian terlihat dari ketertarikan Brown dengan pembangunan internasional (*International Development*). Di akhir tahun 2009 NSID memiliki sembilan sub-komite, terdapat lima NSID sub-komite yang dipimpin oleh Gordon Brown Sendiri, dua sub-komite dipimpin oleh Menteri luar negeri dibidang pambangunan internasional dan dua sub-komite dipimpin oleh menteri dalam negeri dan menteri luar negeri.

Sub-komite NSID di bidang intelijen dibentuk pada tahun 2009 mengikuti hasil dari laporan dari *Cabinet Office* tentang koordinasi intelijen. Pada waktu yang sama sekretaris permanen dalam komite intelijen (PSIS) digantikan dengan dua NSID sub-komite yaitu NSID(I – Intelligence) dan (O – *Official Committee*), dua sub-komite ini berasumsi akan mengambil tugas pengawasan terhadap komunitas intelijen yang sebelumnya merupakan tugas dari JIC. Hal tersebut akan berdampak pada pelepasan tanggung jawab JIC hingga ke dasar tugasnya seperti pengaturan persyaratan dan prioritas intelijen, dan memberi masukan standar

¹²⁸ Cradock P, *Op.cit.* Hal. 10

¹²⁹ Brown, C.,2004. ‘Lord Butler lambasts Blair over bad government’, *The Independent*, [http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/lord-butler-lambasts-blair-over-bad-government-](http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/lord-butler-lambasts-blair-over-bad-government-6156229.html)

6156229.html (diakses pada 18 september 2016)

profesional dalam analisis intelijen.¹³⁰ Sekretariat Intelijen dan Keamanan ikut berpindah menjadi bagian dari Cabinet Office National Security Secretariat dengan nama Direktorat Intelijen.

Gordon Brown menyempurnakan reformasi dari komite kabinetnya dengan cara pembuatan kebijakan keamanan nasional yang lebih terbuka bagi ahli di luar pemerintahan. Pertama dia menawarkan untuk membuat National Security Forum (NSF) untuk ahli-ahli diluar pemerintahan di bulan maret 2009, namun hingga tanggal 9 mei 2009 baru dapat diadakan pertemuan yang pertama yang akhirnya harus berakhir di era David Cameron.

Selain NSID dan NSF perdana menteri Gordon Brown juga memiliki tiga pejabat senior didalam *Cabinet Office* untuk memimpin tiga sekretariat yaitu *Europe & Global Issues*, *Foreign & Defence*, dan *Intelligence & Security*. Didalam laporan pra-pemilu di tahun 2010 mengindikasikan perdana menteri Gordon Brown tengah mempertimbangkan reformasi jangka panjang didalam *National Security Adviser* guna memberikan pegangan yang kuat didalam menghadapi isu-isu keamanan internasional.¹³¹

NSC dibentuk untuk mengintergrasikan pekerjaan pemerintah yang memiliki kepentingan yang tinggi seperti bidang luar negeri, pertahanan, energi, pembangunan dalam dan luar negeri. Sebelum pemilu Mei 2010 *The Institute for Government* mengatur beberapa seminar untuk mencari formasi potensial dalam upaya perbaikan organisasi keamanan nasional. Hasil dari seminar *The Institute for Government* adalah perlu adanya perluasan kesepakatan antar pejabat, penasihat politik, dan ahli dari luar bahwa inggris membutuhkan organisasi keamanan nasional dengan struktur yang lebih kuat, dengan didukung oleh sekretariat sebagai penguat organisasi, Untuk mencari model dan strategi yang sukses dalam mengatur koordinasi kontra-terorisme yang dipimpin oleh *Office of Security and Counter-Terrorism*.¹³²

¹³⁰ Davies P. *Op.Cit.* hal.436

¹³¹ Blitz, J., 'National security chief planned', *Financial Times*, Jumat 16 April 2010, hal.2

¹³² Institute for Government & Libra Advisory Group, 2010, 'Written evidence submitted by the Institute for Government and the Libra Advisory Group (GS 06)', <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmpublicadm/memo/grandstrat/gso6.htm> (Diakses pada 19 September 2016)

Partai Konservatif telah memiliki pandangan mengenai NSC sejak tahun 2006 yang di tuangkan ke dalam *policy paper* partai konservatif, yang ditujukan kepada ketua partai konservatif David Cameron oleh Dame Paul Neville-Jones yang merupakan mantan diplomat dan anggota JIC.¹³³ Didalam *Green Paper*-nya Partai Konservatif berjanji bahwa posisi didalam NSA akan ditempati oleh pejabat resmi bukan pengangkatan secara politis. NSC partai Konservatif akan menggabungkan organisasi peninggalan Gordon Brown yaitu NSID dan *Ministerial Civil Contingencies Committee*.¹³⁴ NSC David Cameron merupakan versi lain dari NSID Gordon Brown yang sedikit diperbesar dan direkonstitusi pada bagian sub-komite dan komite pendukungnya. NSC milik David Cameron adalah bentuk pengemasan ulang dan mengubah susunan mekanisme dan prosedur *Cabinet Office*.¹³⁵

3.2.2 Struktur Organisasi dan Tugas

Sebagai sebuah lembaga negara yang menangani masalah di bidang keamanan dan pertahanan, Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC) memiliki struktur organisasi dan tugas tertentu. Jabatan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri selaku kepala Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC). Anggota lain diantaranya Deputy Perdana Menteri, Bendahara Konselor, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran, Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan, Sekretaris Negara bidang Pembangunan Internasional (*International Development*). Selain itu terdapat pula anggota yakni dari Sekretaris Negara bidang Energi dan Perubahan Iklim, Kepala Sekretariat dan Bendahara dari Kementerian yang menangani tentang kebijakan pemerintah. Sementara itu, tugas dari Kementerian lain tergantung dari kebutuhan dari NSC. Kepala Bidang Pertahanan, dan Kepala Agen Intelijen juga dilibatkan dalam

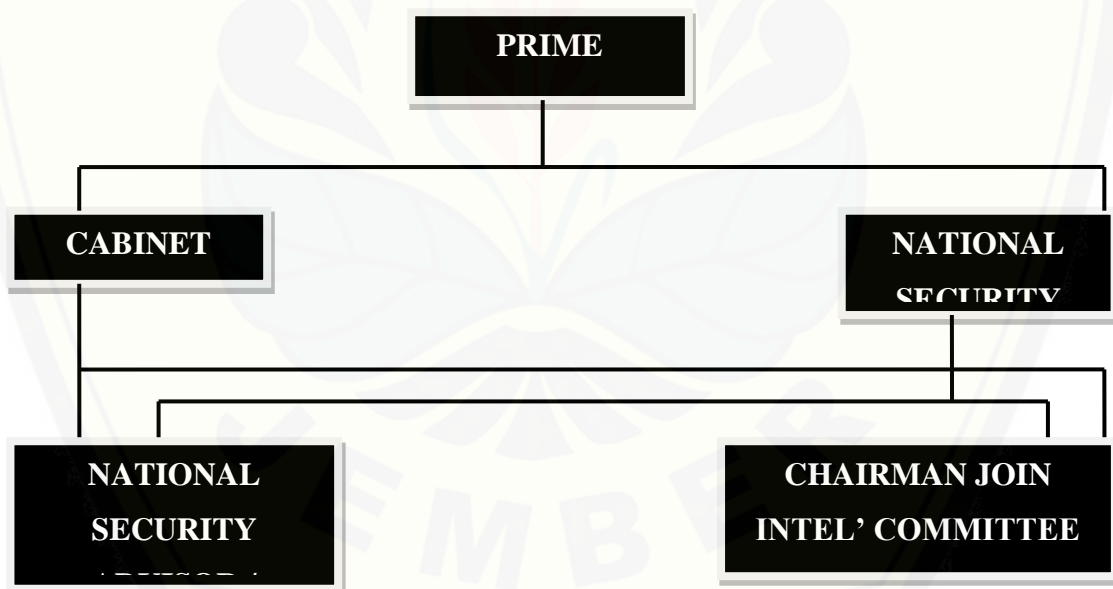
¹³³ Neville-Jones, P., 2006. *Security Issues: Interim position paper*, National and International Security Policy Group, Conservative Party.

¹³⁴ Conservative Party, 2010, *A Resilient Nation: National security green paper – policy green paper No.13*, London: Conservative Party. Hal. 09

¹³⁵ Davies P. *Op.Cit.* Hal.438.

satuan tugas NSC.¹³⁶ Para petinggi NSC tersebut membawahi staf ahli yang diambil dari kementerian yang menjadi anggota tetap maupun anggota tambahan Dewan Keamanan Nasional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Mereka ditunjuk oleh kementerian masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Kantor Sekretariat Dewan Keamanan Nasional (NSC). Pada umumnya, penugasan staf ahli berkisar pada dua hingga tiga tahun yang selanjutnya dilakukan promosi dan rotasi.¹³⁷

Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC) dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh organisasi pendukung. Apabila digambarkan, adapun struktur organisasi dari Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC) dan organisasi pendukung dapat dilihat pada gambar bagan berikut



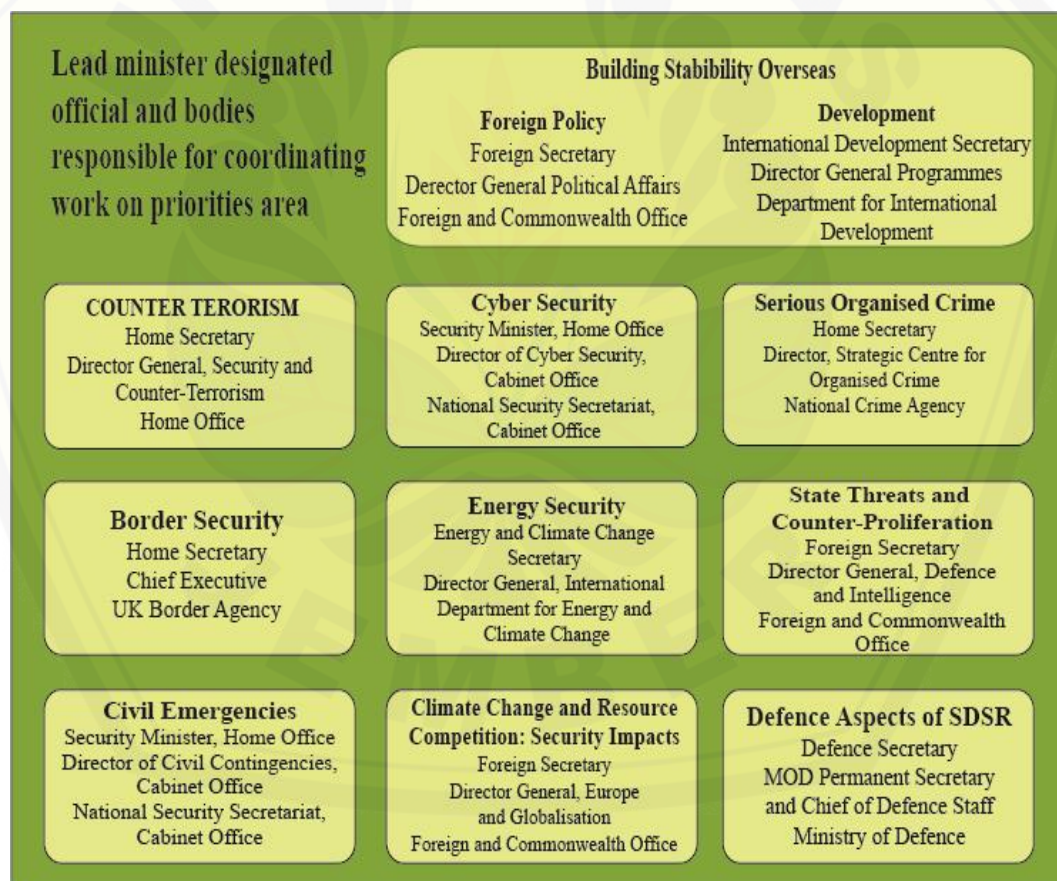
Gambar 3.3 Bagan Organisasi Pendukung *National Security Council Of United Kingdom*
 Sumber : Tim Redaksi. “*Dewan Keamanan Nasional : The National Security Council Of United Kingdom.*” Defender. Edisi 57/2012. Hal.57

¹³⁶ Hasan-Azkari Rivzvi. 2012. “National Security Council : A Debate on Institutions and Processes fot Decision Making on Security Issues.” *PILDAT Discussion Papper. Civil-Military Relation. April 2012.* Hal.12

¹³⁷ Tim Redaksi. “*Dewan Keamanan Nasional : The National Security Council Of United Kingdom.*” *Op.Cit.* Hal58

Jika melihat pada Gambar 3.3 diatas, NSC juga memiliki penasihat harian yang dijalankan oleh seorang Penasehat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*). Kedudukan dan fungsi dari Penasehat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*) adalah sebagai pensehat keamanan nasional, memberikan saran kepada Perdana Menteri terkait keamanan nasional. Selain itu juga sebagai kepala sekretariat NSC, bertugas dalam menghadiri sidang dewan dan memberikan dukungan secara teknis dan administratif yang dibutuhkan oleh anggota NSC.¹³⁸

Adapun fokus dari satuan kerja kementerian serta lembaga terkait dalam susunan Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC) dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut :



Gambar 3.4 Satuan Kerja Tugas *National Security Council Of United Kingdom* (NSC)

Sumber : HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited. Hal.69 (data diolah)

¹³⁸ *Ibid.* Hal.57

Berdasarkan pada Gambar 3.3 tersebut, dalam pelaksanaannya adapun tugas dari NSC terbagi atas beberapa bagian yang didalamnya terdapat beberapa kementerian dan lembaga terkait yang menaunginya. Bidang yang berkaitan dengan pembangunan stabilitas luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran, dan Sekretaris Negara bidang Pembangunan Internasional (*International Development*). Penanggulangan terorisme berada dalam wilayah tugas Sekretariat Dalam Negeri dan Lembaga Penanggulangan Terorisme. *Cyber Security* berada dalam wilayah tugas Kementerian Keamanan dibantu oleh Lembaga Penanggulangan *cyber security* dan Sekretariat Keamanan Nasional. Pada bidang penanggulangan kejahatan terorganisir, berada dalam wilayah tugas Pusat Strategi Kejahatan Terorganisir Lembaga Nasional Penanggulangan Kejahatan dan Kriminal.¹³⁹

Selain itu, dalam Gambar 3.4 tersebut juga disebutkan bahwa bidang penanggulangan masalah keamanan perbatasan, berada dalam wilayah tugas Kepala Satuan Sekretariat Nasional Agen Perbatasan Inggris. Pada bidang keamanan energi, berada dalam wilayah tugas Sekretariat Energi dan Perubahan Iklim, serta Departemen Internasional bidang Energi dan Perubahan Iklim. Hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dan proliferasi berada dalam wilayah tugas Sekretariat Luar Negeri, Lembaga Pertahanan dan Intelijen Luar Negeri dan Persemakmuran. Penanggulangan masalah darurat sipil berada pada wilayah tugas Kementerian Keamanan, Lembaga Negara urusan Darurat Sipil, Sekretariat Keamanan Nasional, dan Kabinet. Permasalahan mengenai perubahan iklim, sumber daya alam, dan dampak keamanan berada dalam wilayah tugas Sekretariat Luar Negeri, serta Lembaga Luar Negeri dan Persemakmuran bidang Eropa dan Pembangunan. Aspek Pertahanan berada dalam wilayah tugas Sekretaris Pertahanan, Sekretaris Tetap Kementerian Pertahanan, dan Kepala Staf Pertahanan Kementerian Pertahanan.¹⁴⁰

¹³⁹ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal. 69

¹⁴⁰ *Ibid*

3.3 Mitra Kerja National Security Council Of United Kingdom

Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan permasalahan pertahanan dan keamanan negara, Dewan Keamanan Inggris atau *National Security Council Of United Kingdom* (NSC) dibantu oleh unit-unit terkait. Unit tugas tersebut berasal dari militer baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan badan intelijen serta pihak kepolisian Inggris. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan sekilas mengenai satuan unit tugas yang membantu NSC dalam melaksanakan tugasnya.

3.3.1 Badan Intelijen Inggris : MI5/MI6

Badan intelijen di Inggris, mengalami perkembangan dalam pelaksanaan tugas pada era Perang Dingin tahun 1980-an. Badan intelijen tersebut terbagi atas dua unit satuan tugas yakni MI5 dan MI6. MI5 merupakan suatu badan intelijen yang berfokus pada penanganan masalah keamanan Inggris. Sedangkan MI6 merupakan unit yang berfungsi sebagai unit intelijen rahasia. MI6 berbeda dengan MI5, tugas dari MI6 hanyalah berfokus pada misi rahasia yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Dalam Undang-Undang Keamanan Inggris tahun 1989 atau *Security Service Act* fungsi dan tugas dari MI5 adalah sebagai berikut:¹⁴¹

1. menjaga keamanan nasional Inggris
2. melakukan pencegahan terhadap tindakan yang membahayakan seperti spionase, terorisme, dan sabotase
3. menjaga dan melindungi aset dan ekonomi Inggris terhadap ancaman yang datang dari luar.

Pada saat itu, terjadi timpang tindih fungsi dan tugas antara MI5 dengan MI6 dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keamanan Inggris tahun 1989 atau *Security Service Act*. Dalam beberapa kasus, MI5 lebih mendapatkan tempat di pemerintahan Inggris daripada MI6. Sebagai contoh pada Perang Dingin, dalam menangani kasus terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal Irlandia Utara

¹⁴¹ Mark Phythian. 2007. *Intelligence oversight in the UK : The case of Iraq*. dalam Loch K. Johnson. 2007. *Handbook of Intelligence Studies*. New York : Routledge. Hal.303

MI5 sangat berperan penting. Berdasarkan *Security Service Act* tahun 1989 tersebut, MI5 berada dalam otoritas Sekretaris Dalam Negeri.¹⁴²

Lain halnya dengan MI5, MI6 juga memiliki tugas sebagai lembaga intelijen khusus. Nama lain dari MI6 adalah *The Secret Intelligence Service* (SIS) yang bertugas mengumpulkan data intelijen rahasia terkait operasi-operasi pemerintah Inggris di luar negeri. Setelah beberapa lama mengalami tumpang tindih tugas dengan MI5, MI6 memiliki landasan tugas berdasarkan pada *Intelligence Services Act* 1994. Landasan tugas tersebut meliputi :¹⁴³

- Dalam menjaga kepentingan nasional, dengan arahan pemerintah menjaga pertahanan dan keamanan serta kebijakan luar negeri dari ancaman
- Menjaga kepentingan ekonomi Inggris
- Mendeteksi adanya ancaman kejahatan serius yang datang baik dari dalam dan luar negeri.

Dalam mengumpulkan data intelijen, MI6 atau *The Secret Intelligence Service* (SIS) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dikeluarkan oleh Komite Intelijen Gabungan (*Joint Intelligence Committee*) dan dengan persetujuan Pemerintah Inggris. MI6 atau *The Secret Intelligence Service* (SIS) menggunakan sumber daya manusia untuk mengumpulkan data intelijen dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan intelijen asing lainnya. Dengan dikeluarkannya dokumen strategi keamanan nasional Inggris pada bulan Oktober 2010 yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, MI6 atau *The Secret Intelligence Service* (SIS) menjadi salah satu lembaga intelijen yang berperan sangat penting dalam Dewan Keamanan Nasional Inggris (NSC).¹⁴⁴

¹⁴² Christopher Andrew. 2014. *MI5: Changes and Reforms*. <https://www.mi5.gov.uk/home/about-us/who-we-are/mi5-history/mi5-today/changes-and-reforms.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)

¹⁴³ The Secret Intelligence Service. 2014. *Our Roles and Responsibilities*. <https://www.sis.gov.uk/about-us/what-we-do.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)

¹⁴⁴ The Secret Intelligence Service. 2014. *UK National Security Strategy*. <https://www.sis.gov.uk/about-us/what-we-do/uk-national-security-strategy.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)

3.3.2 Angkatan Darat Inggris (*British Army*)

Angkatan Darat Inggris merupakan salah satu bagian utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan Angkatan Darat Inggris (*British Army*) memiliki hubungan stabil dengan para institusi sipil atau yang lebih dikenal dengan *civil-military relation* sejak abad ketujuhbelas. Namun, stabilitas hubungan antara sipil dan militer sempat mengalami ketegangan ketika terjadi aksi massa dan tindakan terorisme yang dilancarkan oleh sekelompok organisasi radikal di Irlandia Utara sejak 1969.¹⁴⁵ Sejak peristiwa di tahun 1969 tersebut, Angkatan Darat Inggris (*British Army*) gencar melakukan kampanye melawan terorisme, terutama gerakan kelompok radikal di wilayah Irlandia Utara atau yang dikenal dengan IRA seperti yang telah penulis uraikan pada Bab II sebelumnya.

Setelah peristiwa tahun 1969 yang meregangkan hubungan antara militer dengan pihak sipil, pemerintah Inggris kemudian merubah kembali sistem organisasi dan administrasi hubungan militer dengan sipil. Pemerintah Inggris mencoba mengintegrasikan dan mendekatkan kembali antara pemimpin militer dengan pemerintahan sipil dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan arahan pihak pemerintahan sipil.¹⁴⁶ Sebagai salah satu hasilnya, pemerintah Inggris pada pertengahan tahun 1971 menerapkan sistem baru dalam penanggulangan terorisme yakni Angkatan Darat Inggris (*British Army*) tidak lagi bertindak sendiri. Pihak intelijen serta kepolisian dilibatkan untuk mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Pada era pasca Perang Dingin yang juga memunculkan ancaman baru, pemerintah Inggris menempatkan terorisme sebagai ancaman utama. Persitiwa 11 September 2001 menjadi titik awal pemerintah Inggris menghadapi bentuk baru

¹⁴⁵ Adam Roberts, "The British Armed Forces and Politics: A Historical Perspective," *Armed Forces and Society* 3, no. 4 (August 1977): 531–32. sebagaimana dikutip Diddy R. M. Hitchens and William A. Jacobs. 1996. *The Political Role of the Military : United Kingdom* dalam Constantine P. Danopoulos and Cynthia Watson. 1996. *The Political Role of the Military : An International Handbook*. London : Greenwood Press. Hal.404

¹⁴⁶ *Ibid.* Hal.407

dari terorisme, dimana terdapat 67 warga Inggris menjadi korban dalam peristiwa tersebut.¹⁴⁷ Berdasarkan peristiwa serangkaian terorisme yang diawali dari serangan terhadap gedung WTC di Amerika Serikat dan peristiwa Bom London, pemerintah Inggris bergabung dengan negara-negara lain berkomitmen untuk memerangi segala bentuk terorisme. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah dengan aktif terlibat dalam operasi militer di Afghanistan. Selain terlibat langsung dalam operasi militer, pihak Angkatan Darat Inggris (*British Army*) juga melakukan aktivitas diplomasi dan pembangunan untuk menanggulangi serta mengurangi aktivitas gerakan radikal di Afghanistan.¹⁴⁸ Dalam hal ini penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Angkatan Darat Inggris (*British Army*) bersama badan intelijen merupakan implementasi dari pedoman kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*”. Dengan demikian Angkatan Darat Inggris (*British Army*) adalah salah satu bagian penting dalam struktur kemitraan Dewan Keamanan Nasional Inggris (NSC), terutama dalam pengumpulan data dan mendeteksi ancaman yang datang dari luar.

3.3.3 Angkatan Laut Inggris (Royal Navy)

Salah satu mitra dari NSC dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, khususnya di wilayah perairan adalah Angkatan Laut Inggris atau *Royal Navy*. Kehadiran Angkatan Laut Inggris dalam dunia internasional, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Inggris dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan dan laut sangatlah tinggi. Komitmen tersebut diantaranya ialah menjaga stabilitas, dalam hal ini berusaha menjaga dan melindungi wilayah perairan dari adanya konflik yang berdampak pada perekonomian negara yang selama ini memanfaatkan akses perairan sebagai jalur utama selain jalur udara. Seperti yang dilansir dalam situs resminya, Angkatan Laut Inggris memiliki beberapa tugas pokok untuk menjaga keamanan wilayah perairan dari berbagai ancaman. Tugas

¹⁴⁷ UK Government. 2014. *The UK's work in Afghanistan*. <https://www.gov.uk/government/publications/uks-work-in-afghanistan/the-uks-work-in-afghanistan>. (Diakses pada 12 Juli 2015).

¹⁴⁸ *Ibid*

pokok tersebut terbagi dalam empat hal yang utama yaitu mencegah konflik, menyediakan keamanan di wilayah perairan dan melindungi perekonomian Inggris yang mengandalkan lalu lintas laut, serta kesipasiagaan dalam menghadapi serangan dari pihak lain apabila diplomasi gagal dilaksanakan.¹⁴⁹

Penjagaan wilayah perairan Inggris yang menjadi salah satu bagian prioritas utama bukanlah tanpa alasan. Data yang dilansir oleh Pemerintah Inggris menunjukkan bahwa sebanyak 17.3 juta ton barang impor masuk ke Inggris dan melibatkan sebanyak 600.000 pekerja secara langsung berhubungan dengan jalur perdagangan maritim. Selain itu 95% aktivitas perekonomian Inggris bergantung pada wilayah perairan laut dan setiap tahun barang impor Inggris tercatat sebesar 524 juta Poundsterling.¹⁵⁰ Hal inilah yang membuat Angkatan Laut Inggris merasa perlu untuk memainkan peranan dalam dunia internasional, salah satunya dengan menjaga wilayah perairan Inggris. Dalam melaksanakan penjagaan di wilayah perairan Inggris, pihak Angkatan Laut Inggris berkoordinasi dan bekerjasama dengan NATO serta negara sekutu lainnya. Bentuk kerjasama dilakukan dengan mengadakan latihan gabungan di berbagai penjuru dunia termasuk di wilayah teluk dan semenanjung Afrika. Tujuan dari adanya kerjasama dengan NATO dan negara sekutu ialah untuk memperkuat kemampuan militer Inggris. Ini dimaksudkan apabila terjadi konflik, dan penyelesaian melalui jalur diplomasi gagal Angkatan Laut Inggris siap untuk melindungi kepentingan nasionalnya dengan jalan peperangan. Sebagai anggota dari NATO dan PBB, Angkatan Laut Inggris juga mendukung upaya dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB dalam menjaga perdamaian dunia.¹⁵¹ Oleh karena itu, keberadaan Angkatan Laut Inggris merupakan bagian terpenting dari struktur satuan tugas Dewan Keamanan Inggris (NSC) terutama dalam menjaga kedaulatan negara serta menjaga keamanan negara khususnya di wilayah perairan Inggris.

¹⁴⁹ Royal Navy. 2015. *Royal Navy : What We Do*. <http://www.royalnavy.mod.uk/what-we-do/>. (Diakses pada 12 Juli 2015).

¹⁵⁰ Royal Navy. 2015. *Royal Navy : Protecting Our Economy*. <http://www.royalnavy.mod.uk/what-we-do/protecting-our-economy>(Diakses pada 12 Juli 2015).

¹⁵¹ Royal Navy. 2015. *Royal Navy : Ready to fight* <http://www.royalnavy.mod.uk/what-we-do/ready-to-fight> (Diakses pada 12 Juli 2015).

3.3.4 Angkatan Udara Inggris (Royal Air Force)

Pada akhir Perang Dunia I yakni pada tahun 1918-1939 perkembangan pesawat terbang mengalami peningkatan. Perkembangan tidak hanya terjadi dari segi teknologi, melainkan juga terjadi pada taktik, strategi dan doktrin mengenai kekuatan pertahanan udara (*air power*). Para pengamat Pasca Perang Dunia I meramalkan bahwa Inggris merupakan salah satu kekuatan dominan dalam hal kekuatan udara sehingga berpengaruh pula terhadap pertahanan negara.¹⁵² Mengacu pada perkembangan tersebut maka dibentuklah satuan Angkatan Udara Inggris (*Royal Air Force*) pada tanggal 1 April 1918. Angkatan Udara Inggris (*Royal Air Force*) terdiri atas Korps Penerbang Kerajaan Inggris (*Royal Flying Corps*) dan Penerbang Angkatan Laut (*Royal Naval Air Service*).¹⁵³ Pasca Perang Dingin, Angkatan Udara Inggris (*Royal Air Force*) mengurangi kekuatan satuan tempurnya dan saat ini hanya memiliki sekitar 40.000 personil serta 300 pesawat tempur. Angkatan Udara Inggris (*Royal Air Force*) juga turut serta dalam berbagai operasi militer dunia seperti di Afghanistan dan Iraq, serta bersama NATO pada tahun 2011 melancarkan operasi militer di Libya.¹⁵⁴

Adapun beberapa strategi yang merupakan prioritas bagi Angkatan Udara Inggris (*Royal Air Force*) selama lima hingga sepuluh tahun mendatang adalah sebagai berikut :¹⁵⁵

- Melaksanakan operasi militer maupun non-militer
- Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan udara serta menyesuaikan postur pertahanan, konsep serta teknologi pertahanan udara dengan ancaman yang dihadapi
- Meningkatkan kemampuan tempur dengan mengandalkan akurasi untuk memberikan daya tangkal yang tangguh

¹⁵² Chappy Hakim. 2012. *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia*. Jakarta : Red & White Publishing. Hal.261

¹⁵³ History UK. 2015. *1918 : British Royal Air Force is Founded*. <http://www.history.com/this-day-in-history/british-royal-air-force-is-founded>. (Diakses pada : 29 Juli 2015)

¹⁵⁴ Britannica Encyclopedia. 2014. *The Royal Air Force (RAF) British Air Force*. <http://www.britannica.com/topic/The-Royal-Air-Force>. (Diakses pada : 29 Juli 2015)

¹⁵⁵ Royal Air Force. 2015. *Royal Air Force Strategy*. <http://www.raf.mod.uk/role/Strategyprototype.cfm> (Diakses pada : 23 Juli 2015)

- Membangun kerjasama dalam bidang kekuatan udara terkait doktrin dan konsep dengan militer Amerika Serikat
- Meningkatkan kualitas operasional Angkatan Udara dari segi teknik dengan memanfaatkan infrastruktur domestik
- Membangun kerjasama antara industri pertahanan dan pihak pemerintah dalam melaksanakan pengembangan dan penelitian teknologi pertahanan udara
- Meningkatkan kemampuan personil dalam berkontribusi menjaga kedaulatan dan pertahanan udara Inggris dari berbagai ancaman.

Berdasarkan prioritas strategi diatas, keberadaan Angkatan Udara Inggris merupakan salah satu bagian terpenting dari struktur satuan tugas Dewan Keamanan Inggris (NSC) terutama dalam menjaga kedaulatan negara serta menjaga keamanan negara khususnya di wilayah udara Inggris dari berbagai ancaman. Sebagai implementasi, Angkatan Udara Inggris terlibat dalam berbagai operasi militer dalam kampanye melawan terorisme bersama pasukan koalisi. Dalam Perang Irak Angkatan Udara Inggris melibatkan sebanyak 113 pesawat militer, termasuk 66 pesawat tempur.¹⁵⁶ Pihak Inggris mensinyalir Irak sebagai sarang teroris yang dapat membahayakan bagi keamanan global pada umumnya, dan Inggris pada khususnya. Mengingat Inggris merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan memiliki komunitas muslim yang cukup besar. Sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa kaum ekstrimis muslim yang berasal dari Irak dapat menyebarkan pengaruhnya ke Inggris.

3.3.5 *Kepolisian Inggris*

Mitra terpenting lainnya bagi NSC dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ialah kepolisian Inggris. Kepolisian Inggris dibentuk pada abad ke-19, sebelumnya dalam pemerintahan Inggris permasalahan mengenai keamanan dalam negeri terkait isu kriminalitas ditangani oleh unit keamanan terbatas yang disebut *City of Glasgow Police* di tahun 1800 dan *The Royal Irish Constabulary*

¹⁵⁶ Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.* Hal.316

yang didirikan tahun 1822. Seiring berkembangnya kesuksesan unit tersebut dalam menjaga keamanan dari kriminalitas di Inggris, maka pada tahun 1829 Sekretaris Dalam Negeri Inggris pada saat itu Sir Robert Peel membentuk satuan kepolisian negara yang selanjutnya dikenal dengan Metropolitan Police. Pembentukan unit kepolisian negara tersebut bertujuan aset-aset vital dan tempat-tempat penting di Inggris.¹⁵⁷ Kepolisian Inggris memiliki tiga prinsip utama dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisiannya. Tiga prinsip utama tersebut yaitu¹⁵⁸

1. Tujuan utama dari kepolisian ialah melayani masyarakat, bukan mengontrol masyarakat
2. Integritas dan kejujuran merupakan hal mendasar dalam menjalankan tugas dan hubungannya dengan masyarakat
3. Kepolisian haruslah menghormati hak-hak setiap warga negara.

Dengan meningkatnya arus globalisasi, masyarakat di negara-negara besar seperti Inggris turut pula merasakan dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi adalah peningkatan arus ekonomi yang semakin meluas. Perluasan ekonomi tersebut tidaklah selalu dinikmati oleh warga negara, akibatnya banyak para warga negara tetap berada pada garis kemiskinan dan mendorong mereka melakukan berbagai tindakan kriminal salah satunya perampokan. Perampokan yang terjadi di wilayah Inggris mengalami peningkatan sepanjang tahun 1991 hingga 2002 sebanyak 105 persen.¹⁵⁹ Hal ini membuat kepolisian Inggris merasa perlu untuk melakukan kebijakan menanggulangi masalah kriminal dengan menjalankan operasi penertiban, operasi tersebut dikenal dengan *Operation Safer Streets*.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Ben Johnson. 2013. *Sir Robert Peel*.

<http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Sir-Robert-Peel/> (Diakses pada : 25 Juli 2015)

¹⁵⁸ O.W. Wilson. "The British Police". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Volume 40/Issue 5. Hal.638

¹⁵⁹ Norman Dennis. *et.al*. 2003. *The Failure of Britain's Police : London and New York Compared*. Wiltshire : The Cromwell Press. Hal.07

¹⁶⁰ *Ibid*. Hal.08

Dalam perkembangannya kejahatan kriminal di Inggris mengalami transformasi dari yang sebelumnya, tindakan kejahatan kini melibatkan organisasi-organisasi kriminal (*organize crime*). Para kelompok pelaku kriminal ini tidak jarang melakukan tindakan penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, serta kejahatan lainnya dengan menggunakan senjata api. Kejahatan lain yang mereka lakukan adalah *cyber crime* dan tindakan pencucian uang. Menanggapi fenomena tersebut pemerintah Inggris dalam dokumen “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*” berinisiatif untuk membentuk satuan unit terpadu dibawah pihak Kepolisian. Satuan unit tersebut ialah *National Crime Agency* yang mulai beroperasi pada Oktober 2013.¹⁶¹ Dalam laporannya, *National Crime Agency* (NCA) merilis pemetaan terhadap organisasi kriminal dari sejumlah 36.600 organisasi kriminal, 5.300 diantaranya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan Inggris.¹⁶² Wilayah ruang gerak dari organisasi kriminal ini seringkali terdapat di wilayah perbatasan Inggris. Oleh karena itu *National Crime Agency* dibantu dengan satuan unit lain yaitu *Organised Crime Command* serta Kepolisian Inggris mulai menitikberatkan pengamanan di wilayah perbatasan, hal ini dimaksudkan karena tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dampak berdampak pada perekonomian Inggris. Dengan demikian Kepolisian Inggris beserta satuan unit keamanan yang berada dibawah struktur organisasi Kepolisian Inggris merupakan salah satu bagian terpenting dalam Dewan Keamanan Nasional (NSC). Terutama dalam mengidentifikasi dan mendeteksi adanya ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar, khususnya tindakan kriminalitas yang dapat merugikan bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional Inggris.

¹⁶¹ National Crime Agency. 2013. *National Crime Agency : About Us*. <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us>. (Diakses pada : 28 Juli 2015)

¹⁶² National Crime Agency. 2014. *National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime 2014*. London : Crown. Hal.08

BAB IV

ALASAN PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL INGGRIS (*NATIONAL SECURITY COUNCIL*)

4.1 Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Nasional Inggris

Peperangan di masa mendatang tidak akan sama dengan peperangan yang terjadi dalam peperangan sebelumnya. Walaupun prinsip-prinsip peperangan tetap berlaku namun dimensi keamanan mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan dari dimensi keamanan dipengaruhi oleh berkembangnya doktrin militer konvensional ke arah doktrin *Revolution in Military Affairs* atau revolusi dunia kemiliteran. Elemen-elemen dari *Revolution in Military Affairs* meliputi *precision strike* terkait target penyerangan, *information warfare* atau perang data intelijen, *dominating maneuveres* atau dominasi pergerakan serangan, dan *space warfare*.¹⁶³ Oleh karena itu, peperangan tidak dapat bersandar pada kekuatan militer semata, namun dapat pula lebih mengarah ke aktor lain yakni keberadaan individu dan kelompok kejahatan lainnya hingga organisasi teroris internasional dengan menggunakan empat elemen tersebut. Hal serupa juga dirasakan oleh Inggris, serangkaian serangan terorisme dan kejahatan internasional membuat Pemerintah Inggris memprioritaskan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman. Bagian ini akan menganalisis bagaimana kaitan antara pembentukan *National Security Council* (NSC) terhadap penjagaan keamanan dan kedaulatan nasional sebagaimana argumentasi pertama dalam karya ilmiah ini.

¹⁶³ Agus Widjojo. "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara" dalam Indria Samego. 2001. *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara : Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta : The Habibie Center. Hal.46

4.1.1 Definisi Keamanan dan Ancaman Keamanan bagi Inggris

Keamanan nasional yang diterapkan di berbagai negara, tentunya memiliki konsep dan strategi yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh aspek-aspek yang mendukung dalam pelaksanaan strategi keamanan dan pertahanan negara. Aspek-aspek tersebut dapat berupa aspek geografis, pembangunan ekonomi suatu negara, dan aspek politis (ideologi) serta aspek sosial budaya. Seperti yang telah penulis paparkan pada Bab II karya ilmiah ini, pengertian keamanan sendiri memiliki pemahaman yang sangat luas. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh W.B Gallie dalam tulisannya ‘*Essentially Contested Concepts*’ yang menyebutkan bahwa istilah keamanan sama halnya seperti kita membicarakan istilah ‘keindahan’. Kata tersebut (keamanan) memiliki makna yang subjektif dan dapat memiliki makna yang berbeda terutama dalam ilmu-ilmu sosial.¹⁶⁴ Banyak ilmuwan dalam studi Hubungan Internasional berpendapat bahwa esensi dari makna keamanan ialah bagaimana sebuah negara berusaha untuk mengurangi ancaman seminimal mungkin. Pada sisi lain, *term* mengenai keamanan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor politik, faktor politik inilah yang menurut Harold Lasswell menentukan dalam pembuatan kebijakan keamanan terkait dengan tujuan dibentuknya kebijakan, apa yang didapat negara dari kebijakan tersebut, kapan kebijakan keamanan tersebut dijalankan serta bagaimana konsepnya.¹⁶⁵

Apabila kita mengulas kembali pada Bab II dan menyitir pernyataan Ullman, yang menyatakan bahwa keamanan nasional merupakan seperangkat kebijakan yang mengatur tentang bagaimana sebuah negara melindungi diri dari ancaman yang dapat menyebabkan konflik dengan melibatkan individu, kelompok bahkan negara dan pendapat Lasswell pada paragraf diatas, intinya adalah negara harus memiliki rancangan strategis untuk menangkal ancaman yang dapat merugikan negara tersebut. Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap

¹⁶⁴ W.B.Gallie. 1956. ‘Essentially Contested Concepts’, *sProceedings of the Aristotelian Society*, 56: 167–198 dalam Paul D. Williams. *Op.Cit.* Hal.1

¹⁶⁵ Harold D. Lasswell. (1936), *Politics: Who Gets What, When and How*. New York: McGraw-Hill. dalam *ibid*

keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan luar (*external threat*) tetapi juga ancaman *azymutal* atau tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam yang bersifat global. Senada dengan paragraf pembuka pada bab ini ancaman (*nature of threat*) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. Ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan kultural merupakan dimensi yang menjadi isu penting.

Ancaman ideologi dan atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan-bentuk atau struktur institusi-institusi politiknya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan terhadap prinsip antar negara yang dapat memicu antagonistik dan perselisihan.¹⁶⁶ Selain itu ancaman ekonomi juga menjadi isu sentral, walaupun sebagian pengamat menyatakan ambigu bentuk terhadap ancaman ekonomi. Namun, ancaman ekonomi memiliki implikasi langsung terhadap keamanan nasional. Inggris juga memiliki potensi terhadap ancaman ekonomi sewaktu-waktu. Mengingat kondisi dunia internasional saat ini sering berubah dengan cepat.

Selain ancaman ekonomi, sebagai negara besar Inggris juga memiliki ancaman keamanan berbentuk ideologi dan terorisme. Ancaman berbentuk ideologi di Inggris telah muncul sejak beberapa dekade silam, baik yang berasal dari dalam (*internal threat*) maupun dari luar (*external threat*). Salah satu contoh yang berasal dari internal ialah adanya kemunculan kembali residu dari kelompok separatis yang berasal dari Irlandia atau *Irish Republican Army* (IRA) yang menjadi kekhawatiran bagi Inggris. Wilayah Irlandia jika kita melihat pada Gambar 2.1, sebagian wilayahnya termasuk dalam kedaulatan Inggris. Namun

¹⁶⁶ Kusnanto Anggoro. 2013. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM-RI di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003

sebagian masyarakat Irlandia tidak menghendaki pemerintah Inggris mencampuri wilayah mereka. Maka dari itu, seperti yang telah dipaparkan pada Bab II tujuan didirikannya IRA adalah untuk mewujudkan sebuah negara republik yang merdeka terlepas dari aturan kerajaan Inggris. Untuk melaksanakan ideologi IRA yang menginginkan negara berdaulat dibawah konstitusi mereka sendiri dan dibawah ideologi yang berlandaskan keagamaan, IRA melaksanakan serangkaian serangan terhadap pemerintah Inggris (lihat Bab II karya ilmiah ini).

Sementara dari segi ancaman dari luar (*external threat*), ancaman yang dihadapi Inggris cukup besar diantaranya ialah terorisme. Terorisme di Inggris semakin terlihat pasca peristiwa 11 September 2001. Jika sebelumnya ancaman teror dilakukan oleh kelompok separatis dan residu dari kelompok IRA, maka pasca peristiwa 9/11 pelaku teror di Inggris semakin beragam. Banyak diantara pelaku teror ini memiliki jaringan dengan kelompok teroris lintas negara seperti Al-Qaeda. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian terhadap ancaman keamanan bagi Inggris adalah terjadinya Bom London pada tahun 2005. Serangan bom tersebut terjadi di tiga tempat stasiun kereta bawah tanah yakni Liverpool Street station, Edgware Road, dan Kings Cross and Russell Square. Satu jam berikutnya pada pukul 09.50, serangan kembali terjadi di bus tingkat di Tavistock Square. Ledakan bom London yang dikenal dengan peristiwa 7/7 menewaskan 52 orang and sekitar 700 orang terluka (lihat kembali Bab II karya ilmiah ini).

Ancaman keamanan lain bagi Inggris ialah adanya ancaman yang bersifat *azymutal* atau tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam yang bersifat global. Penulis melihat ancaman serangan terhadap dunia siber (komputer) atau yang dikenal dengan *cyber attack* di Inggris sebagai salah satu kategori ancaman yang bersifat *azymutal* tersebut. Seperti yang telah penulis paparkan dalam Bab II sebelumnya, dalam perspektif keamanan Inggris, ancaman dari *cyber attack* adalah bentuk ancaman baru yang dapat melemahkan berbagai sektor, baik dari segi teknologi informasi sistem keamanan, ekonomi maupun sektor penting lainnya. Ancaman *azymutal* ini juga berimbas pada stabilitas nasional Inggris. Dari berbagai ancaman tersebut, membuat pemerintah Inggris

lebih memperhatikan ancaman keamanan baik yang bersifat ancaman dari dalam (*internal threat*) dan luar (*external threat*) juga ancaman *azymutal*. Untuk menanggulangi ancaman keamanan tersebut pemerintah Inggris meresponnya dengan berbagai macam upaya dan strategi yang akan diulas oleh penulis dalam sub-bab selanjutnya pada Bab IV karya ilmiah ini.

4.1.2 Definisi Kedaulatan dan Ancaman Kedaulatan bagi Inggris

Salah satu unsur terpenting bagi eksistensi negara adalah adanya sebuah kedaulatan. Kedaulatan negara menjadi salah satu unsur terpenting bagi negara sejak diterapkannya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Sejak adanya Perjanjian Westphalia tersebut, negara lebih memperhatikan dan mempertahankan setiap obligasi internal atau aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan bernegara, serta bagaimana negara tersebut melindungi warga negara yang hidup didalamnya dari ancaman negara lain. Para ilmuwan politik internasional berpendapat bahwa Perjanjian Westphalia merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi lahirnya sebuah *nation* atau negara. Negara tersebut memiliki atura-aturan yang dibuat untuk melaksanakan suatu hubungan denganS negara lain dalam politik dunia.

Mengacu pada Perjanjian Westphalia dan dengan dikomparasikan dengan berbagai macam literatur, adapun pengertian mengenai kedaulatan secara konvensional sebagai berikut :¹⁶⁷

1. Sebuah wilayah yang diatur oleh suatu badan politik
2. Badan politik tersebut terdiri dari sebuah institusi dan atau diwakili oleh seseorang
3. Dan ditetapkan oleh lembaga atau otoritas tertinggi dari suatu wilayah tersebut.

¹⁶⁷ Winston P.Nagan & Aitza M.Haddad. "Sovereignty in Theory and Practice". *San Diego International Journal* (Vol.13: 429, 2012). hal 435-436

Kedaulatan juga mengandung pengertian dan juga diterapkan pada berbagai bidang tertentu seperti hubungan internasional, politik dunia (antar bangsa), hukum internasional dan ranah diplomasi.¹⁶⁸ Kedaulatan sendiri tidaklah statis, namun dapat berubah seiring perkembangan kat dan zaman, keadaan politik dunia dan perkembangan hubungan internasional yang terbingkai dalam ranah globalisasi sangat berdampak pada pemahaman akan kedaulatan. Ranah globalisasi tersebut meliputi perpindahan barang dari tempat satu ke tempat lain, masyarakat dan komunikasi yang pada akhirnya menyentuh pula pada masalah kedaulatan.¹⁶⁹

Pada era saat ini, adapun aturan yang mengatur mengenai kedaulatan negara tercantum dalam Piagam PBB. Piagam ini merupakan sebuah aturan isntitusi formal dalam mengatur tentang tata cara bagaimana negara berperilaku seharusnya dalam suatu komunitas internasional. Selain itu apabila negara menjadi member dalam PBB maka legitimasi akan kedaulatan akan semakin kuat. Karena dalam kedaulatan sendiri tidak hanya dibutuhkan secara *de facto*, namun juga diperlukan adanya pengakuan dari negara lain secara *de jure*. Walaupun Piagam PBB memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara anggota dalam hal kedaulatan, sebagian para pengamat politik internasional menilai aturan yang terdapat dalam Piagam PBB juga memilki kelemahan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan negara besar yang mendominasi dalam sistem internasional.¹⁷⁰ Sehingga terkadang negara-negara besar tersebut dapat memainkan peran dalam menentukan nasib negara lain yang lebih lemah. Apabila kita lihat dalam sejarahnya, Inggris merupakan salah satu kekuatan besar yang ada dalam sistem internasional. Namun demikian, walaupun Inggris menjadi salah

¹⁶⁸ Janice E. Thomson. "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research, 39 *Int'l Studies Q.* 213-33 (1995). dalam *ibid.* Hal. 437

¹⁶⁹ David Held & Anthony G. McGrew, "Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance" *Polity* (2002); dan Stephen M. Walt, "International Relations: One World, Many Theories", 110 *Foreign Policy* 29-32, 34-46 (special ed.: *Frontiers of Knowledge* 1998). dalam *Ibid.* Hal. 438

¹⁷⁰ Winston P. Nagan and Craig Hammer ." The Changing Character of Sovereignty in International Law and Internationa Relations". Penulis mengutip naskah yang disampaikan Winston P. Nagan dalam kuliah umum 8 March 2003 pada University of Asmara - Eritrea. Hal.41

satu kekuatan besar sistem internasional tidak membuat Inggris lepas dari ancaman kedaulatan. Situasi internasional seiring berkembangnya proses globalisasi seperti yang telah penulis ulas pada paragraf sebelumnya di sub-bab ini, menjadikan tingkat ancaman kedaulatan Inggris semakin meningkat dalam beberapa tahun.

Mengenai ancaman kedaulatan bagi Inggris, penulis telah memaparkannya dalam Bab II pada karya ilmiah ini. Namun, pada bagian ini penulis akan mengulas kembali ancaman pada Bab II tersebut guna mempermudah dalam menarik beberapa analisis yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pada Bab II terkait ancaman kedaulatan Inggris, adapun ancaman tersebut yang memiliki tingkat ancaman cukup tinggi ialah masuknya imigran gelap dan masalah perbatasan. Mengenai masalah imigran gelap ini, pemerintah Inggris dituntut untuk lebih mewaspadai ancaman yang ada. Hal ini dikarenakan para imigran gelap sebagian melakukan penyelundupan dan sebagian dari para imigran tersebut terlibat dalam organisasi kejahatan transnasional. Selain itu, pengamanan wilayah perbatasan juga menjadi titik fokus dari pemerintah Inggris, dikarenakan perbatasan merupakan pintu masuk bagi para imigran yang akan masuk wilayah kedaulatan Inggris. Apabila kedua hal ini tidak mendapatkan pengawasan dari pemerintah Inggris, dalam hal ini pihak keamanan maka tidak menutup kemungkinan stabilitas nasional Inggris akan terpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah Inggris melakukan berbagai macam upaya dalam merespon ancaman terhadap kedaulatan nasional Inggris tersebut. Adapun mengenai respon Inggris dalam menghadapi ancaman kedaulatan akan dibahas pada sub-bab selanjutnya pada bagian ini.

4.1.3 Respon Inggris dalam Menghadapi Ancaman Keamanan dan Kedaulatan

Setelah menguraikan mengenai ancaman yang dihadapi oleh Inggris dalam bab dua sebelumnya dan dikemukakan kembali diawal bab ini, bagian ini penulis akan mengulas mengenai bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah Inggris menghadapi setiap ancaman yang datang. Dua aspek mengenai ancaman keamanan yang menjadi prioritas utama adalah terkait ancaman keamanan dan kedaulatan. Dalam melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dalam menghadapi ancaman tersebut, penulis menitikberatkan acuan pada dokumen resmi pemerintah Inggris yakni "*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*" tahun 2010. Pada dokumen tersebut, terutama dalam bab empat terdapat delapan langkah utama terkait respon Inggris terhadap ancaman kedaulatan dan keamanan. Adapun kedelapan poin tersebut pada intinya adalah:¹⁷¹

1. Mengidentifikasi dan memantau peluang dan tantangan keamanan nasional.
2. Menanggulangi tindakan instabilitas hingga ke akar permasalahan.
3. Meningkatkan pemahaman dalam menciptakan peluang dan manajemen resiko.
4. Menegakkan hukum domestik dan memperkuat norma internasional untuk mencegah setiap ancaman terhadap kepentingan nasional Inggris.
5. Melindungi Inggris beserta kepentingan nasionalnya baik dalam negeri, wilayah perbatasan, dan dunia internasional dalam kaitannya terhadap ancaman fisik dan elektronik dari negara lain maupun aktor non-negara.
6. Membantu dalam resolusi konflik dan berkontribusi dalam penciptaan stabilitas dengan berpartisipasi dalam dunia internasional termasuk dengan menggunakan tindakan koersif yang berdasarkan undang-undang dalam

¹⁷¹ HM Government. 2010. *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*. Op. Cit. Hal.33

melindungi kepentingan utama Inggris serta melindungi wilayah teritori Inggris di luar negeri dan masyarakat Inggris.

7. Memperkuat daya tanggap Inggris dalam menghadapi bermacam keadaan darurat dan kemampuan memulihkan keadaan kembali dari keterpurukan dan menyelenggarakan pelayanan dasar.
8. Bekerjasama dalam aliansi dan kemitraan dalam memperkuat respon terhadap ancaman.

Berdasarkan poin penanggulangan dan respon Inggris diatas, maka selanjutnya penulis menguraikan implementasi poin tersebut dengan rangkaian tindakan respon yang dilakukan oleh Inggris. Pada poin pertama diatas, disebutkan langkah awal adalah pengidentifikasian dan memantau antara peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inggris. Dalam kaitannya dengan hal ini, penulis menitikberatkan pada faktor ekonomi sebagai langkah identifikasi awal dalam memantau peluang dan tantangan Inggris. Sebagai negara yang maju dari segi ekonomi sebagaimana dilansir majalah *Tempo*, dengan PDB sebesar 2.67 triliun dan menempati urutan ke-enam negara dengan PDB tertinggi dunia dan ketiga di Eropa setelah Jerman dan Perancis¹⁷², Inggris memiliki daya tarik bagi siapa saja, terutama para imigran dan pencari suaka. Keberadaan kota London yang menduduki peringkat kelima PDB tertinggi dunia tingkat perkotaan¹⁷³, juga membuat London menjadi salah satu tujuan utama imigran di Eropa. Dengan potensi yang ada tersebut sepengamatan penulis, Inggris memang memiliki peluang untuk lebih meningkatkan ekonominya. Keberadaan para imigran dapat dipandang sebagai potensi untuk mendapatkan tenaga kerja guna meningkatkan pendapatan ekonomi perusahaan yang selanjutnya bermuara pada peningkatan ekonomi nasional. Namun disisi lain, keberadaan para imigran juga dapat mengancam perekonomian dan stabilitas nasional. Hal ini dikarenakan para imigran tersebut terkadang membawa dampak negatif, seperti adanya keterkaitan dan keterlibatan para imigran ini dengan jaringan organisasi kejahatan internasional. Inilah yang menjadi perhatian sebagai tantangan yang dihadapi

¹⁷² Tim Redaksi. "Poros Baru". *Tempo* edisi 20-26 April 2015. Hal.119

¹⁷³ Tim Redaksi. "Kota yang Kian Padat". *Tempo* edisi 10-16 Juni 2013. Hal. 12

pemerintah Inggris dalam menjaga stabilitas keamanan sebagaimana poin pertama diatas.

Berangkat dari pengidentifikasian masalah dan pemantauan terhadap peluang serta tantangan tersebut, segi selanjutnya adalah mengarah pada poin dua hingga kedelapan diatas yang saling berkaitan. Dalam menindak lanjuti hal tersebut terdapat berbagai rangkaian program. Program tersebut diantaranya mengacu pada tingkat prioritas ancaman yang terhadap Inggris diantaranya terorisme, *cyber crime* dan keadaan darurat lainnya seperti yang telah dipaparkan dalam bab kedua. *Pertama*, meningkatkan kapabilitas dalam penanggulangan teroris pada tataran intelijen dan kebijakan keamanan, dan penggunaan teknologi guna menunjang upaya tersebut. *Kedua*, mengembangkan program transformatif terhadap kemandirian *cyber (cyber security)* yang mengarah pada ancaman yang dilakukan negara lain, jaringan teroris dan kriminal, serta memanfaatkan ruang *cyber* untuk kemakmuran bersama. *Ketiga*, fokus pada kerjasama antar negara dalam menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam dan penyakit. *Keempat*, berfokus terhadap pengintegrasian diplomatik, intelijen, pertahanan dan kapabilitas terkait lainnya dalam mencegah ancaman dari krisis militer internasional.¹⁷⁴

Mengenai program pertama, Inggris memiliki strategi pencegahan terhadap terorisme dengan istilah *Countering International Terrorism* atau CONTEST. Dalam program CONTEST adapun yang menjadi fokus program yaitu *pursue* (memburu), yang menitikberatkan pada tindakan menghentikan serangan teroris. *Prevent* (pencegahan), menghentikan dan mencegah seseorang untuk menjadi teroris. *Protect* (melindungi), yakni upaya penguatan perlindungan dalam upaya melawan terorisme. *Prepare* (mempersiapkan diri) yakni upaya meredakan dampak yang ditimbulkan akibat serangan teror. Program CONTEST ini lebih menitikberatkan pada pola-pola pencegahan tindakan terorisme dalam negeri dengan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, Dewan Keamanan

¹⁷⁴ HM Government. 2010. *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*. Op. Cit. Hal.34

Nasional (NSC) dan pemerintahan lokal (daerah).¹⁷⁵ Pencegahan dilakukan antara lain program deradikalisasi terhadap ideologi-ideologi ekstrimis. Mengingat yang para imigran seperti penulis sebutkan diatas tidak jarang mereka terlibat dalam tindakan kejahatan dan terorisme, sehingga terkadang para imigran inilah yang menyebarkan paham-paham radikal ke warga Inggris lainnya seperti dalam kasus Bom London. Termasuk juga peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan negara baik jalur darat maupun jalur laut.

Langkah penanggulangan ancaman selanjutnya adalah menitikberatkan pada pengembangan program pencegahan terhadap *cyber crime* yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Inggris dengan tingkat perekonomian yang tinggi merupakan salah satu destinasi bisnis terbesar dunia. Oleh karena itu, arus informasi dan transaksi ekonominya melalui internet dan komputer (*cyber*) juga tergolong tinggi dan ini merupakan peluang bagi teroris untuk melancarkan aksinya terutama dalam membuat kehancuran ekonomi negara. Salah satu aksi yang dilakukan adalah dengan membajak sistem komputer yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Selain itu pengamanan yang minim mengakibatkan bocornya rahasia negara ke tangan teroris.¹⁷⁶ Untuk itu Kementerian Pertahanan Inggris, Kabinet, serta jajaran terkait yang tergabung dalam Dewan Keamanan Nasional (NSC) membuat upaya pendekatan pencegahan sebagaimana tertera pada Tabel 4.1 berikut:

¹⁷⁵ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal.42

¹⁷⁶ Mengenai aksi pembajakan sistem jaringan komputer beserta jenis-jenis ancaman sistem komputer dapat dilihat kembali dalam Bab II, terutama pada *Tabel 2.2 Jenis-Jenis Serangan Terhadap Sistem Jaringan Komputer*.

Tabel 4.1 Pencegahan dan Pertahanan terhadap Serangan Cyber Inggris

Pertahanan Infrastruktur Nasional terhadap Cyber Crime	Peningkatan Kapabilitas dalam Melindungi Kepentingan Nasional dalam Ranah Cyber
<p>Memperkuat Pertahanan sektor <i>cyberspace</i></p> <p>Menekan dan mengurangi dampak dari serangan <i>cyber</i></p> <p>Menghalau penggunaan internet oleh teroris</p>	<p>Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman <i>cyberspace</i></p> <p>Mengembangkan kemampuan untuk menghalau kekacauan akibat serangan <i>cyber</i> di Inggris</p>

Sumber : Cabinet Office. 2011. *The UK Cyber Security : Strategy Protecting and Promoting the UK in a Digital World*. London : Crown. Hal.39

Terkait fokus terhadap pengintegrasian diplomatik, intelijen, pertahanan dan kapabilitas terkait lainnya dalam mencegah ancaman dari krisis militer internasional, Inggris memiliki beberapa agenda program. Pasca peristiwa 9/11 yang membuat negara-negara Barat seperti Inggris mengubah pandangannya terkait terorisme dengan menempatkan pasukan di negara-negara yang dinilai dapat mengancam bagi keamanan nasional Inggris. Pada tahun 2003, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Irak guna memerangi terorisme. Tercatat pasukan Inggris yang tergabung dalam komando koalisi Amerika Serikat ketika awal operasi sejumlah 40.906 personil, dengan kekuatan udara sebanyak 113 pesawat termasuk 66 jet tempur serta kapal induk *Ark Royal*.¹⁷⁷ Selain menempatkan pasukannya di Irak dalam program misi penanggulangan teror yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan, Inggris juga menempatkan pasukannya di Afghanistan yang disinyalir sebagai sarang dari kelompok teroris Al-Qaeda. Inggris menempatkan pasukannya di Afghanistan dengan jumlah 9.500 personil. Kemudian pada rentang tahun 2006-2009, Inggris

¹⁷⁷ Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.* Hal.315-316

kembali menerjunkan personel militer dalam skala medium ke Irak dan Afghanistan.¹⁷⁸ Sementara itu dari ranah intelijen, pemerintah Inggris mengucurkan dana sebesar US\$ 3,5 miliar setahun untuk operasional 11.000 mata-mata dan staf pendukung lainnya yang disebar di seluruh dunia.¹⁷⁹

4.2 Memperkuat Aliansi Inggris dengan NATO dan Uni Eropa

Dunia hubungan internasional mencakup seluruh penduduk dunia yang terbagi ke dalam wilayah komunitas politik atau negara-negara yang terpisah dan secara bersama-sama membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.¹⁸⁰ Hubungan internasional juga terjadi karena saling ketergantungan (interdependensi) antar negara dunia, sehingga tidak mungkin ada suatu negara yang menutup diri dari dunia luar.¹⁸¹ Ketergantungan antar negara tersebut terjadi karena keterkaitan antar masalah tiap negara terhadap isu-isu sensitif yang menyangkut berbagai aspek. Begitupula halnya dengan aspek pertahanan dan keamanan, negara-negara juga melakukan kerjasama baik ranah bilateral, regional maupun multilateral. Pada umumnya, negara melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan karena adanya beberapa faktor seperti ekonomi hingga faktor ideologis. Dalam segi faktor ekonomi, kerjasama pertahanan dilakukan untuk mendorong industri pertahanan yang dapat menghasilkan *output* pendapatan negara baik melalui *transfer of technology* maupun proyek bersama.¹⁸²

Sementara, kerjasama pertahanan dalam kaitannya dengan faktor ideologis biasanya dilakukan karena adanya persepsi terhadap keberadaan musuh bersama. Kita dapat mengambil contoh dari kerjasama pertahanan dan keamanan model kedua ini pada era Perang Dunia II. Negara-negara sekutu yang dipimpin oleh

¹⁷⁸ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal.15

¹⁷⁹ Abdul Manan. "Fokus Baru Intel Amerika". *Tempo* edisi 10-16 Juni 2013. Hal. 119

¹⁸⁰ Robert Jackson dan George Sorensen. *Op.Cit.* Hal 2.

¹⁸¹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal 2-3.

¹⁸² A. Hasnan Habib. 1997. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Hal.114

Amerika Serikat melakukan kerjasama untuk memerangi musuh yang sama yakni negara-negara poros (*axis*). Bagi negara-negara sekutu mereka bekerjasama karena adanya pandangan kesamaan ideologi dalam melawan kelompok negara *axis* yang berhaluan fasisme. Penulis melihat bahwa hingga saat ini, kerjasama pertahanan dan keamanan model kedua ini masih diterapkan dalam dunia internasional. Model tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk aliansi. Sebagai salah satu negara besar dunia Inggris merasa perlu untuk memperkuat aliansinya dengan negara lain. Dalam bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana Inggris dalam memperkuat aliansinya sebagaimana argumentasi utama kedua dalam karya ilmiah ini.

4.2.1 Pengertian Aliansi

Sebelum menginjak pada argumen utama pada karya ilmiah ini, yakni terkait penguatan hubungan aliansi antara Inggris dengan Uni Eropa dan NATO terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai pengertian aliansi itu sendiri. Edwin H. Fedder menggambarkan aliansi sebagai sebuah proses atau bagaimana teknik yang digunakan sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara lain, atau dapat pula dikatakan bahwa aliansi merupakan tipe dari sebuah organisasi internasional.¹⁸³ Arnold Wolfer mendefinisikan aliansi sebagai sebuah kerjasama militer yang saling menguntungkan antara dua negara berdaulat atau lebih.¹⁸⁴ Aliansi tercipta karena adanya sebuah musuh yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup negara, dan hal itu pula dirasakan oleh negara lain yang senasib.

Karena aliansi tercipta akibat adanya persepsi ancaman yang sama, maka ada dua konsep dalam melihat negara mencegah ancaman melalui aliansi dalam ranah neorealisme yakni melalui keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan *balance of threat*. Pada bagian ini penulis akan memaparkannya dengan mengacu

¹⁸³ Edwin H. Fedder. 1968. "The Concept of Alliance". *International Studies Quarterly*, 12(1). Hal.68 dalam Sangit Sarita Divedi. 2012. "Alliances in International Relations Theory". *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*. Vol.1 Issue 8. Hal.225

¹⁸⁴ Arnold Wolfer. 1968. Alliances. In David L. Sills, ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillan. Hal.268 dalam *ibid*

pada tulisan Abubakar Eby Hara dalam bukunya berjudul *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Dalam konsep *balance of power*, memang erat kaitannya dengan aliansi. Hal ini disebabkan karena *balancing* dapat dilakukan selain melalui aspek internal dengan mobilisasi kapabilitas domestik, yakni melalui aliansi antarnegara untuk membendung kekuatan yang mengancam.¹⁸⁵ Selanjutnya, mengenai *balance of threat* merupakan penyempurnaan dari konsep *balance of power* oleh Stephan Walt. Menurut Walt, negara membentuk aliansi bukan hanya untuk menyeimbangkan kekuatan semata tetapi juga menyeimbangkan untuk mampu melawan ancaman eksternal.¹⁸⁶

Salah satu teoritikus studi hubungan internasional berpendapat lain, Kenneth Waltz berasumsi bahwa pembentukan aliansi adalah sulit tercapai, karena negara yang tergabung dalam aliansi akan memperhitungkan untung-rugi.¹⁸⁷ Keuntungan dari adanya aliansi adalah negara dengan kapabilitas keamanan yang kecil akan merasa terlindungi oleh negara dengan kapabilitas yang lebih besar. Tetapi disisi lain, suatu negara juga akan merasa dirugikan karena kedaulatan negara sebagian akan diserahkan kepada aliansi. Aliansi memiliki tingkat perbedaan dalam pelaksanaannya diantaranya dipengaruhi oleh keadaan yang mengerakkan negara-negara anggota aliansi, komitmen tiap negara, derajat kerjasama dan batasan-batasan antar negara. Hal ini juga termasuk diantaranya ialah faktor ideologi, ukuran (dalam hal ini kapasitas yang dimiliki suatu negara), kapabilitas, kepemimpinan dalam suatu negara dan lain sebagainya.¹⁸⁸ Sebagai gambaran, penulis mencontohkan NATO sebagai organisasi yang menekankan pada pentingnya aliansi militer bagi negara anggotanya. Derajat kerjasama antar negara NATO dipengaruhi oleh faktor ideologi, komitmen tiap negara anggotanya, serta faktor kepemimpinan. Hal tersebut dapat kita contohkan adanya persepsi ancaman yang sama bagi anggota

¹⁸⁵ Abubakar Eby Hara. *Op. Cit.* Hal.43

¹⁸⁶ *Ibid.* Hal.44

¹⁸⁷ Kenneth N. Waltz. "Structural Realism After the Cold War". *International Security*, Vol. 25, No.1 (Summer 2000). Hal.41

¹⁸⁸ Sangit Sarita Divedi. *Op.Cit.* Hal.227

NATO di kawasan bergejolak Timur Tengah. Para negara anggota NATO beranggapan bahwa ancaman tersebut dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan stabilitas negara anggota. Oleh karena itu, komitmen antar negara anggota untuk membendung ancaman sangatlah kuat. Pembendungan tersebut juga didukung oleh kapabilitas militer negara anggota yang juga dapat dibilang cukup kuat.

4.2.2 Hubungan Inggris dengan NATO

Pada bagian ini penulis akan mengulas hubungan antara Inggris dengan NATO yang menjadi titik pembicaraan pada argumen utama kedua. Hubungan antara Inggris dengan NATO memiliki dinamika dalam perkembangannya. Berdasarkan pengamatan penulis, hubungan Inggris dengan NATO yang cukup dekat dipengaruhi oleh faktor sejarah yang kuat. Latar belakang dibentuknya NATO ialah adanya kekhawatiran akan ancaman Uni Soviet yang melakukan ekspansi di wilayah Eropa pasca Perang Dunia II. Hal ini terlihat ketika Uni Soviet melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Cekoslovakia pada tahun 1948. Hal tersebut mendapat pertentangan dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dan Amerika Serikat sehingga pihak Uni Soviet merasa geram dan terus melancarkan okupasi di wilayah Eropa Timur.¹⁸⁹ Melihat peristiwa ini, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman kala itu merasa khawatir dan melakukan formulasi serta pendekatan dengan negara Eropa lainnya untuk membuat suatu kerjasama guna membendung pengaruh Soviet.

Hasil dari usaha yang digagas Presiden Truman tersebut membuat negara-negara Eropa Barat kemudian bersama Amerika Serikat membentuk sebuah aliansi militer pada tanggal 4 April 1949. Pada awal terbentuknya, NATO dimotori oleh Amerika Serikat beserta negara besar Eropa Barat seperti Inggris, Perancis, dan Italia. Selain itu juga terdapat negara Eropa lainnya seperti Belanda, Belgia, Luksemburg, Portugal, Denmark, Islandia, Norwegia serta negara

¹⁸⁹ Charles Phillips dan Alan Axelrod. 2006. *Encyclopedia of Historical Treaties and Alliances, Second Edition*. New York : Facts On File. Hal.718

Amerika Utara lainnya yaitu Kanada. Negara tersebut melakukan pertemuan di Washington D.C Amerika Serikat pada 6 Oktober 1949. Selain fokus kerjasama dalam bidang kemiliteran, NATO juga berkomitmen pada kerjasama politik, ekonomi, dan sosial bagi negara anggotanya.¹⁹⁰ Mengingat dalam sejarahnya Inggris merupakan salah satu kekuatan besar berpengaruh dalam NATO, membuat persaingan internal semakin terlihat. Hal ini terjadi pada era 1950-an yang mana persaingan tersebut terjadi antara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang bersaing untuk membebaskan pengaruh bagi negara anggota lainnya.¹⁹¹ Akibat adanya persaingan ini membuat sembilan negara anggota lainnya merasa tidak nyaman. Dalam persaingan tersebut, dalam tubuh NATO tiga negara tersebut besar kemudian mendominasi kepemimpinan dalam misi-misi NATO. Seperti contoh, Perancis memiliki ambisi untuk mendominasi dalam misi yang dilaksanakan NATO di wilayah barat Mediterania pada tahun 1951. Sementara Amerika Serikat dan Inggris memperbutkan dominasi dalam misi-misi di wilayah Mediterania. Namun pada akhirnya, Inggris-lah yang mendominasi di wilayah Mediterania.¹⁹²

Melihat fakta pada paragraf di atas sebelumnya, memperlihatkan bahwa hubungan Inggris dengan NATO sangatlah dinamis dan cukup erat. Penulis berpandangan, kedekatan tersebut dikarenakan antara Inggris dan NATO memiliki keterikatan berdasarkan faktor sejarah. Pemerintah Inggris berkomitmen tinggi untuk dapat memainkan perannya dalam keanggotaan NATO serta dapat memberikan pengaruh dalam kaitannya pada Dewan Atlantik Utara (*North Atlantic Council*), Komite Kemiliteran, serta dalam segala aktivitas NATO. Adapun wakil Inggris dalam NATO ialah Sir Adam Thomson sebagai delegasi urusan misi diplomatik, militer Inggris yang diwakili oleh Ian Corder CB.¹⁹³ Pada

¹⁹⁰ *Ibid*

¹⁹¹ NATO International Military Staff. 2006. *The Beginnings Of NATO's Military Structure: Birth Of The Alliance To The Fall Of The Berlin Wall*. Brussels : NATO Public Diplomacy Division. Hal.3

¹⁹² *Ibid*. Hal.6

¹⁹³ UK Government. 2015. *United Kingdom Joint Delegation to NATO*.

<https://www.gov.uk/government/world/organisations/uk-joint-delegation-to-nato> (Diakses pada : 17 Januari 2016, 13:25)

era saat ini, peranan Inggris dalam NATO juga masih sangat terlihat terutama dalam misi-misi perdamaian dan resolusi konflik. Salah satunya adalah misi perdamaian yang dilaksanakan Inggris bersama NATO di Afghanistan. Misi perdamaian NATO di Afghanistan dilaksanakan berdasarkan Resolusi PBB No.1386 pada tanggal 20 Desember 2001 yang menyebutkan bahwa perlu adanya pembentukan pasukan perdamaian yang selanjutnya disebut *International Security Assistance Force* (ISAF).¹⁹⁴ Menindak lanjuti hal tersebut, berdasarkan kertas kerja yang penulis peroleh dari situs pemerintah Inggris, adapun misi kontingen Inggris yang tergabung dalam NATO memprioritaskan pada perlindungan terhadap para personel keamanan serta meningkatkan kemampuan terkait sarana dan prasarana di medan tempur seperti helikopter tempur, penambahan armada Tornado. Serta memperkuat pasukan di wilayah Afghanistan.

4.2.3 Hubungan Inggris dengan Uni Eropa

Perjalanan Uni Eropa menjadi sebuah organisasi multilateral memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mulai menata kehidupannya kembali di berbagai sektor seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam rangka membangun ekonomi negara, di Eropa kala itu terdapat dua komoditas yang mempengaruhi jalannya pembangunan yakni batubara dan baja. Pada awal pembangunan kembali Eropa pasca perang, terjadi perbedaan pandangan dikalangan para pejabat dan kalangan ilmuwan Eropa terkait proyek rekonstruksi pasca perang. Kalangan pejabat yang mewakili pemerintahan negara-negara Eropa melihat bahwa kontrol terhadap sumber energi merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan industri. Perhatian politis saat itu berfokus pada dua sumber energi utama yakni batubara sebagai sumber energi tradisional masyarakat Eropa dan nuklir yang dipandang sebagai sumber energi di masa depan. Sementara dikalangan ilmuwan meminta untuk menyediakan sebuah rancangan penelitian terhadap sumber energi yang memungkinkan untuk diperoleh dan diproduksi di wilayah Eropa Barat. Namun,

¹⁹⁴ NATO. 2013. *NATO in Focus : An Introduction to the Transatlantic Alliance*. Brussels : NATO Public Diplomacy Division. Hal.18

kala itu biaya untuk melakukan penelitian tersebut tidaklah sedikit dan pendapatan ekonomi terbatas akibat perang sebelumnya. Mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya kolaborasi antara pihak pemerintah dengan kalangan ilmuwan menjalankan proyek pembangunan Eropa.¹⁹⁵

Guna mendorong kerjasama regional dalam pembangunan tersebut dibentuklah Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951 yang terdiri dari enam negara anggota yakni Perancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara ini bermaksud untuk membuat kompleks industri di wilayah Ruhr, yang merupakan jantung Industri di Jerman dibawah kendali internasional dengan harapan kerjasama lebih mudah.¹⁹⁶ Selain dibentuk Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau *European Coal and Steel Community* (ECSC) juga dibentuk Komunitas Energi Atom Eropa atau *European Atomic Energy Community* (EAEC) oleh enam anggota pendiri ECSC.¹⁹⁷ Tujuan yang lebih luas dibentuknya dua organisasi tersebut adalah untuk kerjasama poliik dan ekonomi, disamping itu juga sebagai kerjasama dibidang penelitian energi.¹⁹⁸

Sebagai tindaklanjut dari keberhasilan kedua komunitas didirikanlah Komunitas Ekonomi Eropa atau *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957. EEC kemudian dikenal dengan sebagai pasar bersama, dengan artian suatu penyatuan bea yang menciptakan pasar bebas diantara negara-negara anggota dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Inggris sendiri masuk menjadi anggota EEC pada tahun 1973.¹⁹⁹ Seiring perkembangan waktu EEC bertransformasi kearah lebih baik pasca Perang Dingin dengan bersatunya kembali bangsa Jerman dan pecahnya Uni Soviet. Transformasi EEC menjadi Uni Eropa tertuang dalam *Maastricht Treaty* yang ditandatangani negara anggota EEC

¹⁹⁵ Luca Guzzeti. 1995. *A Brief History of European Union Research Policy*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Hal.1

¹⁹⁶ Marvin Perry. 2013. *Peradaban Barat : Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global* (terjemahan). Bantul : Kreasi Wacana. Hal.415

¹⁹⁷ Luca Guzzeti. *Op.Cit.* Hal.7

¹⁹⁸ *Ibid.* Hal.2

¹⁹⁹ Marvin Perry. *Op.Cit.* Hal.416

pada Desember 1991 dan mulai berlaku pada tahun 1993. Adapun program yang tertuang dalam *Maastricht Treaty* tersebut diantaranya penyatuan aspek moneter tahun 1999, kebijakan bersama, masyarakat Eropa, kebijakan bersama dalam bidang keamanan dan politik luar negeri, serta keamanan internal. Uni Eropa juga memiliki sejumlah forum tersendiri dalam organisasinya yang mencakup Dewan Menteri, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.

Bagi Inggris sendiri, keberadaan Uni Eropa dapat menjadi sebuah peluang untuk dapat memainkan perannya sebagai negara besar di Eropa namun di lain pihak ada yang kurang sependapat dengan anggapan tersebut. Sebagian kalangan justru menilai, masuknya Inggris sebagai anggota EEC pada tahun 1973 justru akan mengurangi derajat kedaulatan Inggris sebagai negara besar. Hal inilah yang menjadi dinamika hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa hingga kini. Pada tahun 1975 untuk menentukan apakah Inggris akan tetap bergabung dengan Uni Eropa atau tidak, diadakanlah referendum oleh pemerintah Inggris dibawah PM Harold Wilson dari Partai Buruh. Hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa 66 persen responden memilih agar Inggris tetap bergabung dalam EEC atau Uni Eropa. Beberapa dekade kemudian, pada 1 Januari 2002 penggunaan mata uang tunggal Euro mulai digunakan dan Inggris juga menjadi negara percobaan. Opini publik Inggris pun tidak nampak mendukung terhadap kebijakan penggunaan Euro tersebut.²⁰⁰ Satu dekade sebelumnya, pada tahun 1992 merupakan titik kritis antara hubungan Inggris dengan Uni Eropa yang ditandai dengan peristiwa "*Black Wednesday*". *Black Wednesday* adalah suatu peristiwa anjloknya nilai mata uang Poundsterling di Eropa dengan tingkat inflasi yang tinggi namun suku bunga rendah pada 16 September 1992. Hal ini memicu Inggris keluar dari *Exchange Rate Mechanism* (ERM) yang membuat Inggris mendapat sentimen negatif dari negara anggota Uni Eropa.

²⁰⁰ C.N. Trueman. 2014. *A History of the European Union and Great Britain*. <http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/a-history-of-the-european-union-and-great-britain/>. (Diakses pada : 17 Januari 2016, 13:56)

4.2.4 Upaya Inggris Memperkuat Aliansi dengan NATO dan Uni Eropa

Dalam dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review* disebutkan bahwa salah satu prioritas agenda Inggris dalam tataran dunia internasional adalah memperkuat aliansi dengan NATO dan memperkuat kerjasama multilateral dengan Uni Eropa.²⁰¹ Peningkatan hubungan kerjasama multilateral dengan Uni Eropa merupakan kunci dari upaya Inggris dalam memainkan perannya di dunia internasional. Hal tersebut dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mempromosikan aspek keamanan dan kemakmuran, terutama dalam wilayah Eropa²⁰². Salah satu langkah dari aspek keamanan adalah upaya terhadap adanya integrasi antara sipil dan militer sebagai respon terhadap ancaman. Dalam meningkat hubungan kerjasama dengan Uni Eropa dan menguatkan aliansi dengan NATO, ada berbagai program dan agenda seperti yang tertrea dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Program Penguatan Kerjasama dan Aliansi Inggris – NATO & Uni Eropa

Program Penguatan Inggris-NATO	Program Penguatan Inggris-Uni Eropa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin jalannya garis politik yang ditetapkan NATO dan meningkatkan kemampuan dalam merespon ancaman saat ini dan masa mendatang serta bekerjasama dalam pemahaman pengambilan resiko dan tanggungjawab sebagaimana mestinya. 2. Mensukseskan misi yang dipimpin NATO dalam misi pendampingan terhadap penciptaan keamanan dan perdamaian di Afghanistan serta membantu dalam menciptakan dan rekonstruksi pemerintahan Afghanistan yang efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung terhadap perluasan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. 2. Berpartisipasi dalam penanganan konflik melalui program <i>EU External Action Service</i> dan mengembangkan kerjasama dengan PBB-NATO. 3. Mendukung misi Uni Eropa baik dalam aspek militer maupun program sipil dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Inggris.

²⁰¹ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal.59

²⁰² *Ibid.* Hal.62

Program Penguatan Inggris-NATO	Program Penguatan Inggris-Uni Eropa
<ol style="list-style-type: none"> 3. Melanjutkan dukungan terhadap peningkatan kemampuan dan kecakapan dengan pihak sekutu untuk bersama dalam berbagai operasi. Termasuk pula dengan mengajak negara non-anggota NATO. 4. Memahami aturan-aturan penting NATO kaitannya dengan segi keamanan yang lebih luas dalam merespon ancaman baru seperti <i>cyber attack</i>, yang didukung dengan penekanan terhadap Pasal IV Washington Treaty. 5. Melanjutkan program pembaharuan NATO termasuk peningkatan mengenai kinerja, rasionalisasi NATO Agencies, dan mengembangkan struktur komando pasukan yang mana hal tersebut dapat digunakan dalam merespon tantangan keamanan. 6. Membangun hubungan yang lebih efektif dan efisien antara NATO, organisasi dan lembaga lainnya serta negara dalam rangka menyelaraskan kapabilitas sipil dan militer secara efektif guna mengembangkan respon terhadap berbagai ancaman. 7. Dalam hal tertentu, kerjasama Uni Eropa-NATO dapat membantu dalam mengembangkan perencanaan militer dan sumber daya manusia, kerjasama dalam meningkat keahlian dan mengembangkan kemampuan lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melanjutkan dukungan terhadap program Uni Eropa dalam operasi Atalanta dalam rangka memberantas pembajakan. Termasuk berkontribusi aktif dengan mengirimkan kapal Angkatan Laut. 5. Mendorong implementasi <i>Energy Strategy for Europe 2011-2020</i> dalam meningkatkan keamanan energi Eropa. 6. Melaksanakan kerjasama dengan Uni Eropa dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. 7. Meningkatkan pelayanan bersama Uni Eropa dalam melindungi masyarakat sipil. 8. Memberikan kontribusi secara efektif terhadap pihak-pihak terkait dalam mengamankan wilayah perbatasan Eropa

Sumber : HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. London : The Stationery Office Limited. Hal.62-63 (data diolah).

Implementasi dari penguatan aliansi antara Inggris dengan NATO dapat dilihat dari partisipasi aktif Inggris dalam misi yang dijalankan oleh NATO. Sebagai salah satu negara besar dalam Dewan Keamanan PBB (DK-PBB), peran Inggris sangat menentukan dalam berbagai misi terutama kemiliteran seperti misi perdamaian di berbagai belahan dunia. Mengenai masalah misi perdamaian, Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri dan Wilayah Persemakmuran mengemukakan bahwa misi perdamaian haruslah memiliki kerangka aturan tertentu baik militer maupun yang dilakukan oleh pihak sipil sebagai pendukung. Oleh karena itu, pemerintah Inggris mengkategorikan ranah operasi dan misi perdamaian kedalam beberapa *term* seperti tertera pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penggolongan Kategori Misi Perdamaian Menurut Pemerintah Inggris

Kategori	Penjelasan
<i>Conflict Prevention</i>	Mengidentifikasi penyebab konflik dan mencegah konflik terjadi secara terus menerus (seperti : menempatkan pasukan)
<i>Peacemaking</i>	Melakukan pengamanan melalui diplomasi, gencatan senjata, penyelesaian secara damai, mengakhiri kekerasan
<i>Peacekeeping</i>	Militer dan kepolisian melakukan operasi bersama pihak negara yang ditempati dalam mendukung penyelesaian secara damai, gencatan senjata dan mengerahkan kekuatan dalam batasan-batasan tertentu
<i>Peace Enforcement</i>	Pengerahan kekuatan militer secara koersif guna dengan persetujuan, menekankan upaya perdamaian, melindungi masyarakat sipil terhadap pertikaian
<i>Peacebuilding</i>	Mendukung secara jangka panjang pemulihan kondisi masyarakat pasca perang dan menciptakan perdamaian secara berkelanjutan melalui jalur administrasi, yudisial (hukum), militer, ekonomi dan pembangunan kapasitas politik

Sumber : Paul D. Williams. 2008. *Security Studies: an Introduction*. New York : Routledge Taylor & Francos Group. Hal. 410. (data diolah).

Konsep pengkategorian yang dikemukakan oleh pemerintah Inggris pada Tabel 4.3 tersebut, hingga saat ini dijadikan sebuah kerangka atau acuan bagi NATO dan PBB dalam melaksanakan misi perdamaian. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan kategori misi perdamaian tersebut berdasarkan analisis penulis sebagai salah satu upaya penguatan aliansi sebagaimana tertuang dalam poin-poin pada Tabel 4.2. Penguatan aliansi juga diperkuat dengan adanya perhatian terhadap penanggulangan *cyber attack*. Mengingat banyaknya serangan *cyber* pada awal 2007, membuat NATO lebih aktif dalam membantu upaya pemberantasan serangan *cyber* bagi negara anggotanya melalui konsep strategi baru.²⁰³ Implementasi dari hal tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara proaktif antara Dewan Keamanan Nasional bersama NATO dalam memerangi *cyber attack* sesuai dengan konsep strategi terbaru NATO dalam pertemuan anggota NATO di Lisbon pada 2001.²⁰⁴ Penulis melihat langkah tersebut merupakan salah satu implementasi penguatan aliansi terhadap NATO terutama berkaitan dengan poin keempat Tabel 4.2 diatas.

4.3 Menjaga Sumber Daya Mineral

Peningkatan penggunaan sumber daya mineral di Inggris diawali sejak kemunculan Revolusi Industri. Sejak bergulirnya Revolusi Industri di Inggris pada akhir abad kedelapan belas, keadaan sosial dan struktur masyarakat mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selama periode Revolusi Industri, berbagai penemuan dalam bidang teknologi dan transportasi telah berhasil mendorong pola perilaku negara Inggris yang sebelumnya bercorak negara agraris berubah kearah industri. Dalam memajukan industri tersebut bagi Inggris diperlukan adanya bahan baku (dalam hal ini bahan bakar) untuk menghidupkan mesin-mesin industri, oleh

²⁰³ NATO. 2013. *Op.Cit.* Hal.39

²⁰⁴ Adapun salah satu isi dari Konsep Strategi NATO berdasarkan pertemuan di Lisbon pada 2001 terkait *cyber attack* adalah “*develop further our ability to prevent, detect, defend against and recover from cyber-attacks, including by using the NATO planning process to enhance and coordinate national cyber-defence capabilities, bringing all NATO bodies under centralized cyber protection, and better integrating NATO cyber awareness, warning and response with member nations*”. Dikutip dari Cabinet Office. 2011. *The UK Cyber Security : Strategy Protecting and Promoting the UK in a Digital World.* London : Crown. Hal.25

karena itulah sumber daya mineral sangatlah diperlukan. Untuk mencukupi sumber daya mineral, Inggris melakukan ekspansi ke negara-negara Mediterania hingga benua Afrika untuk mencari sumber daya mineral terutama bahan bakar bagi perindustrian.²⁰⁵ Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa abad penggunaan sumber daya mineral bagi Inggris merupakan salah satu hal yang vital bagi kelangsungan hidup negara hingga saat ini. Semakin menurunnya ketersediaan sumber daya mineral dan meningkatnya kebutuhan menyebabkan adanya krisis energi yang dapat mengarah pada terjadinya *energy security*. Bagian ini menganalisis bagaimana Inggris memandang *energy security* sebagai salah satu isu penting bagi negara dari segi non-militer.

4.3.1 Deskripsi Sumber Daya Mineral Dunia

Secara umum, sumber daya mineral dapat diartikan sebagai bahan kimia alami yang terletak didasar bumi. Terdapat lebih dari dua ribu jenis mineral yang teridentifikasi dalam perut bumi, dari sekian banyak jenis mineral tersebut yang terbanyak adalah dapat dikategorikan kedalam delapan jenis elemen yakni O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, dan Mg. Kedelapan elemen tersebut 98.5 persen terbentuk dalam perut bumi. Delapan puluh persen industri bergantung pada bahan mineral perut bumi tersebut.²⁰⁶ Konsentrasi mineral yang terdapat dalam perut bumi berupa benda padat, cair, serta bahan material gas. Berdasar penggunaannya, secara umum dapat pula diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Adapun yang termasuk kedalam kategori yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis logam seperti baja, tembaga, dan aluminium serta jenis non-logam seperti jenis batuan.

Sementara itu berdasarkan tipe, sumber daya mineral dapat digolongkan kedalam tiga jenis yakni, bahan bakar, logam, dan non logam. Mineral tipe bahan bakar seperti batubara, minyak dan gas alam merupakan yang terbesar dari segi

²⁰⁵ Marvin Perry. *Op.Cit.* Hal. 47-48

²⁰⁶ Puja Monda. 2010. *Mineral Resources: Definition, Types, Use and Exploitation (with statistics and diagram)*. <http://www.yourarticlelibrary.com/environment/minerals/mineral-resources-definition-types-use-and-exploitation-with-statistics-and-diagram/28169/>. (Diakses pada : 17 Januari 2016, 14:24)

produksi yakni sebesar 87 persen, sementara tipe logam dan non-logam hanya sekitar enam hingga tujuh persen dari total nilai produksi.²⁰⁷ Mengenai tipe mineral bahan bakar dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.4 Tipe Bahan Bakar Mineral

Jenis	Keterangan
Batubara	Cadangan energi batubara menurut data per Januari 1994 sebanyak 68 milyar ton. Setiap tahun sebanyak 250 ton batubara dieksploitasi, dan diperkirakan meningkat hingga 400-450 ton hingga 2010.
Minyak Mentah	Minyak mentah terbentuk akibat adanya mikroorganisme dasar laut yang hidup selama jutaan tahun. Satu juta ton minyak mentah menghasilkan 0,8 juta ton minyak setelah mengalami proses penyulingan untuk produksi. Sementara kandungan minyak dunia terbatas hanya sekitar 700 juta ton. Empat puluh persen total konsumsi minyak digunakan untuk sektor transportasi jalan raya. Enam puluh persen sisanya digunakan untuk industri dan lainnya.
Gas Alam	Cadangan gas alam per April 1993 tercatat sebanyak 700 milyar meter kubik. Rata-rata penggunaan sebanyak 80-90 persen dari total yang ada. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari berbagai negara dunia untuk mengurangi penggunaan gas alam secara berlebihan.

Sumber : Puja Monda. 2010. *Mineral Resources: Definition, Types, Use and Exploitation (with statistics and diagram)*. <http://www.yourarticlelibrary.com/environment/minerals/mineral-resources-definition-types-use-and-exploitation-with-statistics-and-diagram/28169/>

Sementara untuk bahan mineral tipe logam dan non-logam sangat beragam di setiap negara. Negara yang paling banyak menggunakan mineral non-logam ialah negara-negara berkembang hingga maju seperti China, Jepang, dan negara industri lainnya. Seperti sumber daya mineral yang lainnya, bahan logam tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebagian negara memiliki cadangan mineral jenis ini, namun di negara lainnya memiliki kandungan logam yang sedikit. Bahan logam

²⁰⁷ *Ibid*

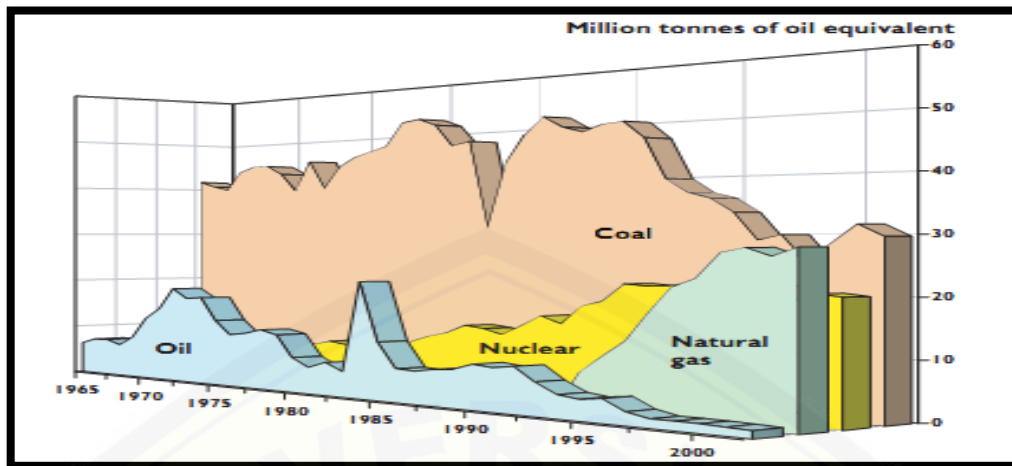
digunakan untuk industri berat seperti pesawat, mobil, mesin, elektronik serta peralatan industri lainnya.

4.3.2 Sumber Daya Mineral dan Krisis Energi di Inggris

Sebagai negara yang tergolong kecil dari kondisi geografis, Inggris memiliki keuntungan memiliki sumber daya mineral, terutama energi dan sumber daya energi untuk industri. Diperkirakan batubara dan gas alam memberikan sebanyak sepertiga dari keseluruhan mineral yang ada untuk bahan bakar listrik Inggris. Persebaran gas alam di Inggris mengalami peningkatan sejak tahun 1990 dan diharapkan akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, namun persediaan minyak dan gas alam mengalami penurunan disatu sisi dan membuat Inggris melakukan impor gas sejak tahun 2005. Sementara cadangan batubara mengalami penurunan sejak era 1950-an, hal ini terutama banyaknya penutupan sebagian besar tambang batubara. Tahun 1986 pertambangan batubara kembali dibuka dan menghasilkan seperdelapan dari sumber daya mineral Inggris.²⁰⁸ Pembukaan kembali tersebut sangat beralasan mengingat batubara di Inggris digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan listrik, sebagaimana tertera pada Gambar 4.1 yang menunjukkan penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama selama kurun waktu 1965 hingga 2002. Menyusul selanjutnya adalah gas alam, nuklir, dan minyak. Nuklir sendiri memiliki peran vital bagi Inggris namun keberadaan nuklir tersebut hanya sebatas digunakan untuk keperluan industri dan sumber tenaga listrik semata, tercatat Inggris memiliki 19 reaktor nuklir untuk menggerakkan energi sebesar 63 Gigawatt atau sekitar 19 persen dari kebutuhan energi nasional.²⁰⁹

²⁰⁸ D.E Highley, *et.al.* 2004. *British Geological Survey report CR/04/070N : The Economic Importance of Minerals to the UK*. Nottingham : Hawthornes. Hal.8

²⁰⁹ Geoff Hiscock. 2012. *Earth Wars : The Battle for Global Resources*. Singapore : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. Hal.119



Gambar 4.1 Penggunaan Mineral Untuk Bahan Bakar Listrik Inggris Kurun Waktu 1965-2002

Sumber : D.E Highley, *et.al.* 2004. *British Geological Survey report CR/04/070N : The Economic Importance of Minerals to the UK.* Nottingham : Hawthornes. Hal.14

Sementara untuk sumber daya mineral non-logam seperti minyak dan gas alam, memiliki sejarah yang panjang terhadap perekonomian dan ketersediaan energi. Pada tahun 1970-an hingga awal dekade 1980-an persediaan minyak Inggris mengalami peningkatan, namun di akhir 1980-an pasokan menurun. Kemudian kembali naik pada awal dekade 1990-an dan stabil hingga akhir 1990-an mengalami penurunan. Begitupula dengan gas alam yang mengalami peningkatan pada awal tahun 1970-an dan stabil hingga tahun 1990-an. Namun seiring perkembangan penggunaan energi untuk bahan bakar industri persediaan gas alam semakin menipis dan membuat Inggris harus menimpor dari negara lain. Begitupun dengan batubara yang memiliki peran vital di Inggris. Oleh karena itu, ketiga sumber daya mineral ini memiliki nilai yang tinggi bagi perekonomian Inggris seperti terlihat pada Gambar 4.2. Pada Gambar 4.2 tersebut terlihat bahwa minyak memiliki nilai ekonomi pertama tertinggi sebesar 14.523 juta Poundsterling. Kemudian ditempat kedua ditempati oleh gas alam yang memiliki nilai ekonomi bagi Inggris sejumlah 8.199 juta Poundsterling, disusul ditempat ketiga yakni batubara dengan jumlah nilai 899 juta Poundsterling.

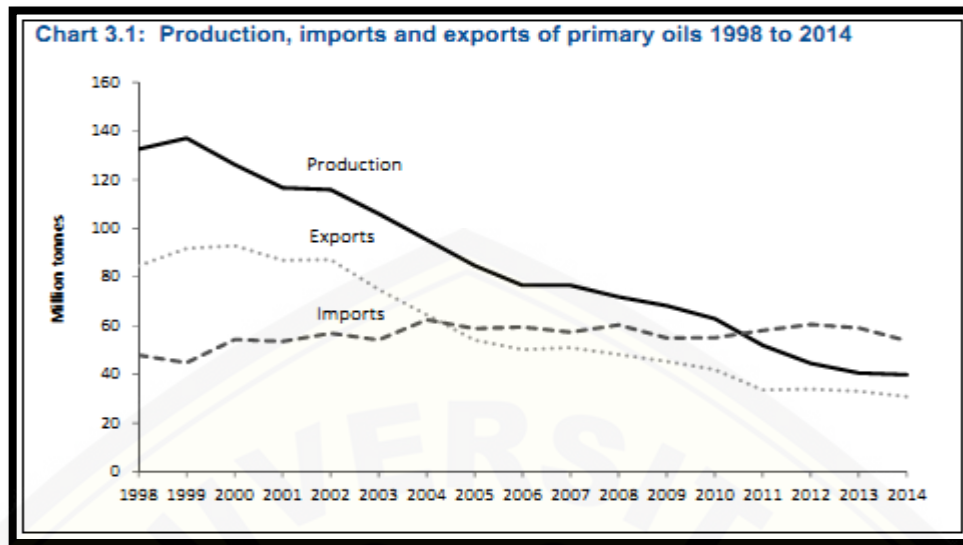
	Thousand tonnes	Value £ million
ENERGY MINERALS		
Coal: Deep-mined	16 391	889
Opencast	13 148	
Oil: Onshore	2 767	14 523
Offshore	113 768	
Gas: Onshore (oil equivalent)	471	8 199
Offshore (oil equivalent)	103 106	

Gambar 4.2 Produksi dan Nilai Ekonomi Sumber Daya Mineral Inggris

Sumber : United Kingdom Minerals Yearbook, British Geological Survey dalam E Highley, *et.al.* 2004. *British Geological Survey report CR/04/070N : The Economic Importance of Minerals to the UK*. Nottingham : Hawthornes. Hal.12

Seiring meningkatnya penggunaan dan kebutuhan akan energi, dari tahun ke tahun antara produksi, konsumsi, dan persediaan tidaklah sejalan. Pada satu sisi penggunaan energi meningkat secara drastis, namun persediaan yang ada semakin menipis dan hal ini pula berdampak pada sektor produksi energi nasional. Hal tersebut pada akhirnya membuat pemerintah Inggris mengimpor pasokan energi dari negara lain guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Produksi energi dalam negeri Inggris terutama minyak, mengalami masa puncaknya pada tahun 1999 dan pada tahun itu pula juga merupakan awal dari penurunan produksi energi Inggris terutama minyak. Tahun 1999 juga menjadi awal meningkatnya impor Inggris akan minyak. Sejalan dengan hal itu, ekspor pun juga mengalami penurunan terlihat sejak awal dekade 2000-an tepatnya pada tahun 2002.²¹⁰ Untuk mengetahui gambaran umum mengenai segi produksi, ekspor, dan impor energi Inggris dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 4.3. Dalam gambar tersebut rentang waktu yang diambil adalah mulai tahun 1998 hingga tahun 2014.

²¹⁰ UK Government. 2014. *Oil and Gas UK Field Data*. www.gov.uk/oil-and-gas-uk-field-data. (Diakses pada : 20 Januari 2016, 19:25).



Gambar 4.3 Grafik Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Inggris tahun 1998-2014

Sumber : UK Government. 2014. *Oil and Gas UK Field Data*. www.gov.uk/oil-and-gas-uk-field-data

Dengan semakin meningkatnya permintaan ekspor, menurunnya daya produksi serta kemampuan impor tersebut pada akhirnya menyebabkan berkurangnya pasokan energi bagi Inggris. Berkurangnya energi di Inggris inilah yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak terutama pemerintah serta kalangan industri akan menyebabkan masalah baru terhadap *energy security*. *Energy Security* menjadi sebagai salah satu ancaman yang mengemuka dalam dunia hubungan internasional terutama pasca berakhirnya Perang Dingin. Oleh karena itu, negara-negara besar di dunia termasuk Inggris salah satunya berusaha untuk mencari cara untuk bagaimana mengamankan sumber pasokan dan cadangan energi untuk masa mendatang. Bahasan ini akan menjadi fokus penulis dalam bagian selanjutnya.

4.3.3 Upaya Inggris Mengamankan Pasokan Energi

Pasca berakhirnya Perang Dingin pergeseran ancaman negara yang semula bersifat militeristik yang mana kekuatan militer menjadi tolok ukur utama, seakan mengalami pergeseran. Isu-isu demokratisasi, terorisme kini mewarnai ancaman terhadap negara di dunia internasional. Keamanan akan pasokan energi juga menjadi ancaman yang serius seiring berjalannya waktu. Ketersediaan yang semakin menipis serta permintaan yang semakin meningkat membuat negara-negara besar dunia termasuk Inggris mulai memfokuskan bagaimana menanggulangi krisis energi. Adapun beberapa program bagi pemerintah Inggris dalam memperkuat *energy security* antara lain terdapat dalam Tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5 Program Pemerintah Inggris dalam Menangani *Energy Security*

Program	Langkah yang Dilakukan
Menjamin adanya <i>energy security</i> dan memprioritaskan dalam Badan Urusan Luar Negeri dan Wilayah Persemakmuran	Mengusahakan diplomasi dengan mengedepankan strategi yang mana berhubungan dengan kepentingan energi dan keamanan pasokan energi. Dalam beberapa hal pemerintah Inggris menginginkan adanya kerjasama jangka panjang dengan negara lain dalam menjaga pasokan energi
Memasukkan agenda <i>energy security</i> dalam kerangka tugas Angkatan Bersenjata	Kementerian Pertahanan diharapkan juga melibatkan Angkatan Bersenjata dalam mengamankan pasokan energi. Seperti pelibatan Angkatan Laut dalam mengamankan wilayah jalur laut kaya minyak milik Inggris

Program	Langkah yang Dilakukan
Mengembangkan peran dalam NATO	NATO diharapkan dapat mengembangkan doktrin dan aturan main, serta konsep solidaritas dan hubungan saling menguntungkan dalam konteks ancaman terhadap <i>energy security</i> sebagai bagian dari operasi. Melalui kerjasama antar Angkatan Laut anggota NATO mendukung kebijakan pengamanan jalur pasokan energi
Menekan koordinasi kebijakan Eropa	Inggris menolak kebijakan permainan harga yang dimotori oleh pemasok besar Eropa seperti Rusia dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
Meningkatkan kapasitas penyimpanan gas	Mencegah segala resiko dalam memantau permintaan dan penawaran pasar global. Serta memastikan penambahan kebutuhan kapasitas untuk kecukupan pembangunan penyimpanan pasokan gas

Sumber : Diambil dari kertas kerja Partai Konservatif Inggris yang merupakan partai yang berkuasa di Inggris dengan demikian kebijakan partai tersebut dijadikan kebijakan nasional pemerintah Inggris sebagaimana tertuang dalam kertas kerja berjudul “*A Resilient Nation National Security Green Paper. Policy Green Paper No.13*”. Hal.27

Berdasarkan pada Tabel 4.5 diatas maka langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah Inggris diantaranya adalah sebagai berikut. Pada poin pertama terdapat penekanan mengenai diplomasi dan strategi guna menjamin pasokan energi dilakukan dengan menkankan pada metode liberalisasi pasar energi bagi negara-negara Uni Eropa.²¹¹ Dengan demikian dapat tercipta kerjasama jangka panjang dalam mengamankan pasokan energi Inggris. Langkah ini mulai dilakukan pada 10 Agustus 2009 saat pemerintah Inggris mengeluarkan laporan

²¹¹ Jenny Bird. 2007. *Energy Security in the UK*. London : Institute for Public Policy Research. Hal.16

atau *review* mengenai situasi terkini tentang keamanan energi Inggris. Hasil dari laporan tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya ketergantungan impor energi Inggris. Berdasarkan hal tersebut, strategi yang digunakan Inggris adalah dengan menggunakan pendekatan bersifat geopolitik dalam melakukan dialog antara negara produsen dan konsumen terkait masalah energi dan diferseifikasi antara Inggris dengan negara Uni Eropa.²¹² Tindak lanjut dari strategi tersebut adalah pemerintah Inggris berencana meningkatkan investasi aset dan lain infrastruktur energi dan gas sebesar tiga milyar Poundsterling, dan merupakan investasi terbesar dalam tiga dekade terkahir.²¹³ Selain itu Inggris juga mengedepankan investasi sejumlah 20 persen setiap tahun untuk energi terbarukan.²¹⁴

Poin kedua dari Tabel 4.5 diatas adalah melibatkan angkatan bersenjata dalam mengamankan *energy security*, dalam hal ini angkatan laut. Sebagaimana ditulis oleh Donna J. Nincic dalam *Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security* menjelaskan bahwa pada umumnya pelibatan angkatan bersenjata adalah untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kaya akan sumber daya energi.²¹⁵ Hal ini cukup beralasan, karena dari sekian banyak kasus terkait masalah energi dalam ZEE, hanya 39 persen yang dapat diselesaikan. Oleh karena itu melihat hal tersebut, Inggris merasa sumber daya yang ada di wilayah lautan Inggris terutama di wilayah laut Utara menjadi wilayah yang mendapat prioritas utama untuk pengawasan Angkatan Laut dalam menjamin pasokan energi dan mineral, serta mengamankan ZEE Inggris. Inggris mengalokasikan dana sebesar

²¹² Sandu-Daniel Kopp. 2014. *Politics, Markets and EU Gas Supply Security : Case Studies of the UK and Germany*. Berlin : Springer VS. Hal.149

²¹³ *ibid.* Hal.173

²¹⁴ Edward Davey. 2014. *How the United Kingdom Pursues Energy Security*.
<http://www.iea.org/ieaenergy/issue6/how-the-united-kingdom-pursues-energy-security.html>
(Diakses pada 13 Februari 2016, 20:15)

²¹⁵ Donna J. Nincic. *Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security* dalam Gal Luft and Anne Korin. 2009. *Energy Security Challenges for the 21st Century : A Reference Handbook*. California : ABC-CLIO. Hal.32

450.000 Poundstreling untuk mengamankan wilayah perairannya bekerjasama dengan lembaga terkait dibawah naungan NSC.²¹⁶

Poin ketiga dalam Tabel 4.5 diatas terkait langkah kongkrit yang dilakukan Inggris dalam mengamankan pasokan energinya dalam hal *energy security* adalah melalui kerjasama antar Angkatan Laut anggota NATO mendukung kebijakan pengamanan jalur pasokan energi. Langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris tersebut sebagai tindak lanjut dan bentuk dukungan dari program yang telah dijalankan oleh NATO dalam mengamankan pasokan energi bagi negara anggotanya. Pada 30 Juli 2007, armada NATO berlayar mengitari perairan Afrika seluas 12.500 mil. Pelayaran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Jaap de Hoop Scheffer merupakan agenda keamanan maritim dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan melalui pendekatan internasional dalam hal mengamankan suplai energi sebagaimana prioritas utama NATO.²¹⁷ Dalam hal ini, bentuk dukungan Inggris terhadap NATO terutama dalam mengamankan pasokan energi tertuang dalam dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*, yakni :

*“ensure that NATO has the political will and ability to respond to current and future threats to its security wherever they arise , sharing the risks and responsibilities equitably”*²¹⁸

Penulis melihat, apa yang dikemukakan dalam dokumen tersebut merupakan dalam salah satu bentuk dukungan terhadap NATO terkait ancaman bagi Inggris di masa sekarang maupun masa mendatang. Salah satu ancaman itu ialah *energy security*, yang dikemukakan dalam dokumen tersebut terutama pada bab empat.²¹⁹

²¹⁶ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal.55

²¹⁷ Robert G. Bell. *NATO's Grapple with Energy Security*. dalam Gal Luft and Anne Korin. *Op.Cit.* Hal 261

²¹⁸ HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op.Cit. Hal.62

²¹⁹ Mengenai ancaman Inggris tersebut dapat di lihat terutama halaman 44 pada dokumen *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*.

Poin selanjutnya adalah, Inggris menolak kebijakan permainan harga yang dimotori oleh pemasok besar Eropa seperti Rusia dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain itu pada poin terakhir, langkah yang dilakukan Inggris adalah dengan memaksimalkan dan meningkatkan pasokan cadangan mineral dan gas. Dalam tataran regional Uni Eropa, terdapat banyak faktor dalam masalah *energy security* salah satu diantaranya faktor Rusia dalam menentukan permainan harga minyak dan gas. Pengaruh permainan harga minyak dan gas Rusia bagi sebagian besar negara Eropa pada umumnya, terutama bagi negara yang dilewati jalur pipa gas oleh Rusia dinilai terlalu memberatkan.²²⁰ Alternatif lain yang akan dilakukan oleh Inggris adalah dengan memaksimalkan dan memperbesar penyimpanan pasokan cadangan minyak dan gas. Salah satu daerah yang potensial bagi pasokan tersebut adalah Laut Utara Inggris. Daerah Laut Utara Inggris telah memproduksi minyak dan gas sejak era 1970-an.²²¹ Namun, pemerintah Inggris menyadari apabila wilayah Laut Utara terus menerus dieksploitasi secara besara-besaran maka akan terjadi pasokan yang berkurang secara drastis. Oleh karena itu, Inggris juga mengimpor minyak dari wilayah Norwegia dengan persentase 75 persen pada tahun 2005.²²²

4.4 Analisa Teoritis

Setelah menguraikan mengenai beberapa argumen utama dalam karya ilmiah ini, pada bagian ini penulis akan menganalisis tujuan kebijakan pemerintah Inggris membentuk Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*). Kerangka analisis permasalahan dalam karya ilmiah ini menggunakan dua pendekatan konseptual, pertama adalah dengan pendekatan teori hubungan internasional *neorealisme*. Pendekatan kedua adalah dengan pendekatan konsep *energy security*, dalam menganalisis bagaimana langkah dalam mengamankan pasokan energi. Langkah dalam mengamankan pasokan energi memang telah penulis uraikan secara umum pada bagian sebelumnya diatas. Namun, pada

²²⁰ Jenny Bird. *Op. Cit.* Hal 16

²²¹ *Ibid.* Hal.6

²²² *Ibid.* Hal.7

bagian ini penulis akan menganalisis kembali langkah yang diambil tersebut dengan pendekatan *energy security* secara lebih mendalam.

4.4.1 Analisa Tujuan Pembentukan NSC menggunakan Teori Neorealisme

Neorealisme menekankan pada terjaminnya keamanan dan kedaulatan negara. Kaitannya dengan kedaulatan disebutkan oleh Kenneth Waltz yang memandang bahwa kedaulatan negara merupakan salah satu aspek penting dan layak untuk diperjuangkan. Untuk memperjuangkan suatu kedaulatan, negara haruslah kuat. Disini penulis menggunakan tolok ukur kekuatan negara berdasarkan kekuatan militer. Kekuatan militer bagi penganut realisme klasik maupun neorealisme merupakan hal yang utama. Salah satu strategi negara untuk menunjukkan kekuatannya adalah dengan memiliki sifat *deterrence* (daya tangkal) yang tangguh. Pada kasus Inggris ini, penulis melihat dibentuknya Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Inggris (NSC) sebagai upaya untuk memudahkan koordinasi antar institusi keamanan Inggris dalam menciptakan *deterrence*. Bersama NSC militer Inggris berencana berfokus pada pengurangan jumlah kapal selam dari semula berjumlah 48 menjadi 40 unit. Selain itu juga terdapat pemangkasan jumlah peralatan tempur dari semula 160 unit menjadi tidak lebih dari 120 unit. Pemangkasan tersebut digantikan oleh pengelolaan teknologi nuklir dan fokus pada daya tangkal di wilayah laut dan pelabuhan.²²³

Deterrence juga diperlihatkan Inggris ketika bersama pasukan koalisi mulai memasuki Irak guna menumpas teroris yang disinyalir berada di negara tersebut. Seperti dipaparkan bagian sebelumnya, Inggris mengerahkan sejumlah 40.906 personil, dengan kekuatan udara sebanyak 113 pesawat termasuk 66 jet tempur serta kapal induk *Ark Royal*. Sementara di Afghanistan pasukan Inggris

²²³ Mengenai hal ini dapat dilihat pada HM Government. 2010. *Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*. Op. Cit. Hal.38. Sementara untuk pengamanan wilayah pelabuhan, Inggris menetapkan kebijakan *Port Facility Security Plan* (PFSP), ini diberlakukan mengingat pelabuhan menjadi salah satu kunci utama dalam perekonomian Inggris. Tentang pengamanan laut dan pelabuhan dapat dirujuk pada tulisan Peter Lehr. "Port security in the UK : The Spectre of Maritime Terrorism". dalam Paul Wilkinson. 2007. *Homeland Security in the UK : Future preparedness for terrorist attack since 9/11*. New York : Routledge. Hal.274

menempatkan pasukannya di Afghanistan dengan jumlah 9.500 personil. Kemudian pada rentang tahun 2006-2009, Inggris kembali menerjunkan personil militer dalam skala medium ke Irak dan Afghanistan. Penambahan anggaran pertahanan yang ditujukan untuk kegiatan intelijen, berdasar analisis penulis juga sebagai indikator bentuk *deterrence* Inggris terutama dalam menanggulangi ancaman teror dan *cyber crime* terhadap wilayah kedaulatan Inggris baik di dalam negeri maupun di wilayah persemakmuran. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian landasan pemikiran pada bab pertama, terkait pernyataan Charles Glaser yang menyatakan bahwa motivasi negara meningkatkan kapabilitas keamanannya lebih ditujukan untuk *survive* dan mencegah setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki. Menurutnya, ancaman yang paling utama ialah ancaman yang datang dari negara lain. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Inggris untuk menjaga wilayah kedaulatannya dari ancaman negara lain maupun kelompok teroris non-negara, senada dengan ungkapan Waltz dan Glaser.

Dalam neorealisme terdapat dua *term* alasan negara meningkatkan kemannya, yakni antara defensif atau ofensif. Melihat ancaman yang telah penulis uraikan di bagian sebelumnya, maka Inggris berusaha membendung ancaman dengan berbagai formulasi strategi dan kebijakan. Kebijakan maupun strategi yang dilakukan oleh Inggris menurut pengamatan dan analisis penulis lebih mengarah pada tindakan yang bersifat defensif. Untuk melihat hal tersebut, penulis berfokus dari upaya yang diambil pemerintah Inggris. Seperti dalam upaya membendung ancaman teror misalnya, Inggris menjalankan strategi *Countering International Terrorism* (CONTEST) yang bersinergi antara pemerintah dan Dewan Keamanan Nasional (NSC). Strategi tersebut sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris dalam Negeri Urusan Penanggulangan Terorisme, pada bulan Mei 2004 diselenggarakan pertemuan antara Kepolisian Federal dengan pihak Departemen dalam Negeri Inggris membahas tentang draft rencana Inggris

dalam menanggulangi ancaman teror yang ditindaklanjuti pada Februari 2005.²²⁴ Selang waktu setahun, pada Juli 2006 pemerintah Inggris menetapkan strategi CONTEST dengan istilah “4P” yakni *pursue* (memburu), *prevent* (pencegahan), *protect* (melindungi), dan *prepare* (mempersiapkan diri) sebagaimana penulis ulas dalam bagian sebelumnya. Langkah tersebut dan delapan poin respon Inggris terhadap ancaman kedaulatan dan keamanan menurut penulis serta penanggulangan *cyber crime* seperti tertera pada Tabel 4.1 berangkat dari analisis neorealisme, lebih mengarah pada tindakan *security maximize* karena ditujukan pada memaksimalkan pengamanan terhadap keamanan negara sebagaimana dikemukakan oleh Dunne dan Schmidt terkait tujuan negara meningkatkan kapabilitas kekuatannya.²²⁵

Titik tolak dari neorealisme juga diindikasikan dengan adanya aliansi antar negara dalam membendung adanya ancaman. Langkah yang dilakukan Inggris sebagaimana penulis paparkan dalam argumentasi utama kedua karya ilmiah ini adalah dengan aliansi, yakni memperkuat hubungan dengan NATO. Aliansi sendiri merupakan bentuk dari strategi *balancing* atau penyeimbangan kekuatan dengan sumber ancaman. Dalam kaitannya dengan aliansi, Waltz memang mengemukakan terdapat untung rugi dalam kelompok aliansi. Bagi negara dengan kekuatan kecil hingga sedang, keberadaan aliansi merupakan suatu keuntungan karena dengan aliansi meningkatkan kepercayaan diri negara lemah karena merasa terlindungi negara besar. Disisi lain, aliansi menurut pendapat penulis dapat pula dijadikan ranah bagi negara dengan kekuatan besar seperti Inggris untuk menyebarkan pengaruhnya dalam aliansi. Analisis penulis tersebut merujuk pada konsep pengkategorian yang dikemukakan oleh pemerintah Inggris pada Tabel 4.3 hingga saat ini yang dijadikan sebuah kerangka atau acuan bagi NATO dan PBB

²²⁴ Frank Gregory. “An Assessment of The Contribution of Intelligence Led Counter Terrorism to UK Homeland Security Post 9/11 Within the ‘CONTEST’ Strategy” dalam Paul Wilkinson. 2007. *Homeland Security in the UK : Future preparedness for terrorist attack since 9/11*. New York : Routledge. Hal.131.

²²⁵ Terkait tujuan negara dalam meningkatkan kekuatannya baik bersifat ofensif maupun defensif dapat dilihat kembali pada bagian Landasan Konseptual yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan pada karya ilmiah ini dalam bab pertama.

dalam melaksanakan misi perdamaian. Dengan diterapkannya konsep tersebut menandakan Inggris memiliki pengaruh yang besar terhadap aliansi.

Menurut Stephan Walt pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa negara membentuk aliansi bukan hanya untuk menyeimbangkan kekuatan semata tetapi juga menyeimbangkan untuk mampu melawan ancaman eksternal. Ungkapan tersebut diperkuat dengan pernyataan Charles Glaser berpendapat ancaman yang paling utama ialah ancaman yang datang dari negara lain. Pada argumen penulis melihat aliansi yang dilakukan oleh Inggris bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC) dengan NATO dan Uni Eropa merupakan wujud dari konsep *balance* dari Stephan Walt tersebut. Ini dapat kita rujuk pada Tabel 4.2, terutama pada poin kerjasama sebagai upaya memberantas ancaman bersama dengan Uni Eropa dalam Operasi Atlanta yang bertujuan menanggulangi dan membendung ancaman pembajakan di wilayah perairan. Selain itu program pemberantasan terorisme dan obat-obatan terlarang serta konflik internasional yang tertuang dalam *EU External Action Service* adalah implementasi dari penyeimbangan melawan kekuatan ancaman eksternal. Sementara dengan NATO, operasi militer di Afghanistan dan Irak bersama NATO merupakan wujud dari poin mensukseskan misi aliansi dalam mencegah ancaman terutama terorisme melalui strategi *pre-emptive strike*.²²⁶ Mengacu pada pendapat Glaser, maka bagi Inggris pasca peristiwa 9/11 dan Bom London ancaman nyata yang datang dari negara lain adalah Irak dan Afghanistan.

Dalam penanggulangan *cyber crime*, wujud aliansi Inggris bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC) dengan NATO adalah merespon ancaman berdasarkan

²²⁶ *Pre-emptive strike* merupakan strategi militer yang menitikberatkan pada serangan pendahuluan terhadap negara yang dianggap sebagai sumber ancaman. Pasca serangan 9/11 Afghanistan dan Irak dianggap sebagai negara sarang teroris oleh sebagian besar negara Barat yang tergabung dalam NATO. Strategi *pre-emptive strike* tersebut merupakan isi dari salah satu “Doktrin Bush” digunakan oleh Amerika Serikat yang notabene adalah salah satu negara terkuat anggota NATO bersama Inggris dalam agenda perang melawan terorisme global. “Doktrin Bush” meliputi : *Preemptive war, Unilateralism, Strength Beyond Challenge, dan Extending Democracy, Liberty and Security to All Religions*. Lihat dalam Sukawarsini Djelantik. 2010. *Terorisme : Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal.160

pada Pasal IV Washington Treaty dan pertemuan anggota NATO di Lisbon tahun 2001. Hal ini berdasarkan analisis penulis menunjukkan bahwa aliansi juga diikat dengan adanya sebuah perjanjian atau aturan bersama bagi setiap anggota yang dibuat bersama untuk kepentingan aliansi. Disinilah terdapat dilema sebagaimana dikatakan Waltz bahwa terkadang sebagian kedaulatan negara diserahkan kepada aliansi, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa aliansi derajat organisasi aliansi dapat lebih tinggi daripada negara anggota itu sendiri. Para anggota aliansi yang tergabung dalam NATO, termasuk Inggris kemudian berdalih bahwa hal tersebut merupakan suatu upaya mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Analisis penulis adalah langkah tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Dale Copeland didalam bukunya yang berjudul *The Origins of Major War* mengemukakan bahwa kekhawatiran akan kondisi keamanan membuat negara berusaha mencegah terjadinya perang. Lalu diperkuat dengan anggapan Benjamin Miller bahwa keamanan dapat tercipta dengan adanya kerjasama dengan negara lain, kerjasama tersebut dalam kasus ini adalah adanya langkah penguatan aliansi antara Inggris yang didukung bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC) dengan pihak NATO sebagaimana tujuan pembentukan NSC itu sendiri. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan dua dokumen resmi negara dalam segi keamanan dan pertahanan nasional yaitu. “*Securing Britain in an Age of Uncertainty : The Strategic Defence and Security Review*” dan “*A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy*” yang diluncurkan pada tahun 2010. Dengan demikian keberadaan Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang menjadi bagian dari sinergitas antara pemerintah dengan institusi keamanan negara dapat berjalan dengan selaras dalam menjaga keamanan dan pertahanan serta kedaulatan wilayah Inggris maupun wilayah persemakmurannya.

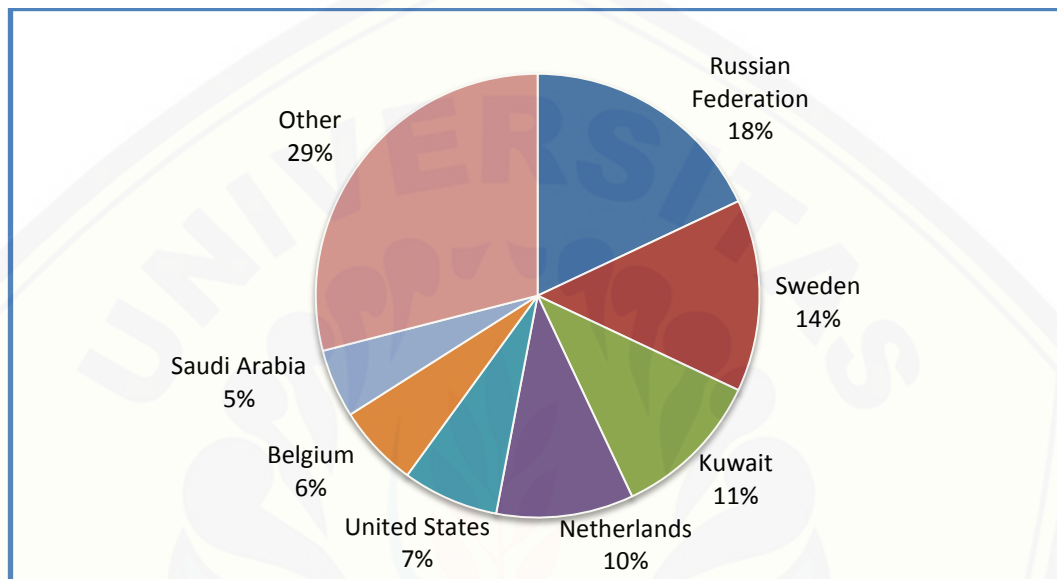
4.4.2 Analisa Tujuan Pembentukan NSC dalam Upayanya Mengamankan Energi menggunakan Konsep Energy Security

Adapun hal yang melatarbelakangi negara berusaha mengamankan sumber energinya setidaknya ada tiga poin.²²⁷ Pertama, kekhawatiran akan adanya penurunan cadangan minyak dunia. Kedua, perpindahan sumber pasokan minyak dunia dari wilayah Utara ke wilayah selatan. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak, teroris, dan ekstrimis. Inilah yang menjadi kekhawatiran negara-negara industri di dunia terutama negara Barat. Apabila pasokan energi menipis, atau dikuasai pihak pemberontak, teroris dan ekstrimis maka pasokan cadangan minyak akan berkurang dan berdampak pada sektor industri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Michael T. Klare tersebut, juga yang penulis paparkan pada bagian landasan pemikiran dalam bagian ini akan dianalisis bagaimana Inggris bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC) berusaha mengamankan pasokan energinya dengan pendekatan *energy security*. Dalam term *energy security*, keberadaan minyak dan gas serta sumber energi lainnya sangat diperhatikan karena minyak menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan alat-alat transportasi untuk mendistribusikan hasil produksi. Inggris sendiri menggunakan minyak dan sumber energi lainnya untuk berbagai kepentingan seperti transportasi dan lainnya seperti yang tertera pada Gambar 4.1. *Energy Security* memandang, ketahanan minyak yang cukup mendorong terciptanya kestabilan ekonomi di suatu negara. Sehingga setiap negara selalu berusaha mendapatkan pasokan minyak yang cukup atau memiliki cadangan minyak yang cukup untuk kebutuhan negaranya. Namun, keadaan Inggris mulai mengalami kekurangan pasokan energi hingga saat ini. Seiring meningkatnya penggunaan dan kebutuhan akan energi, dari tahun ke tahun antara produksi, konsumsi, dan persediaan tidaklah sejalan. Pada satu sisi penggunaan energi meningkat secara drastis, namun persediaan yang ada semakin menipis dan hal ini pula berdampak pada sektor produksi energi nasional. Guna

²²⁷ Michael T. Klare. *Energy Security*. dalam Paul D. Williams. Op.Cit Hal.488

mengatasi masalah ini Inggris melakukan berbagai langkah salah satunya impor minyak dari berbagai negara seperti yang dilansir oleh Departemen Energi dan Perubahan Iklim Inggris pada Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Negara Impor Minyak Inggris

Sumber : Department of Energy and Climate Change of United Kingdom. 2015. *Statutory and Security of Supply Report 2015*. London : Crown. Hal.20 (data diolah)

Selain itu bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC), pemerintah Inggris merumuskan kebijakan seperti yang telah penulis jabarkan pada Tabel 4.5 diatas. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis kebijakan dan pengambilan langkah tersebut senada dengan apa yang Michael T.Klare kemukakan terkait hal yang melatarbelakangi suatu negara mengamankan pasokan energinya. Hal pertama yang dikemukakan Michael T.Klare adalah kekhawatiran akan adanya penurunan cadangan minyak dunia. Bagi Inggris dampak tersebut sangat dirasakan mulai tahun 1999 saat pasokan Inggris mulai menurun. Adanya ancaman dari Rusia yang akan memotong pipa jalur minyak dan gas Eropa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Inggris. Mengingat Rusia menjadi salah satu negara pengimpor pasokan energi bagi Inggris.

Pendapat kedua adalah adanya perpindahan sumber pasokan dari wilayah belahan bumi Utara ke wilayah bagian Selatan. Seperti yang diungkapkan oleh Geoff Hiscock dalam buku *Earth Wars : The Battle for Global Resources*, saat ini pergerakan pasokan energi dunia lebih mengarah pada negara-negara di bumi belahan Selatan seperti Indonesia, China, serta sebagian wilayah Amerika Selatan. Wilayah bumi bagian Utara kini mengalami penurunan pasokan, walaupun Inggris memiliki cadangan di daerah laut utara Inggris namun cadangan pasokan tersebut dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu terkait hal tersebut, langkah Inggris yang dirumuskan bersama Dewan Keamanan Nasional (NSC) seperti yang tertera pada Tabel 4.5 adalah mengusahakan diplomasi dengan mengedepankan strategi yang mana berhubungan dengan kepentingan energi dan keamanan pasokan energi terutama dengan negara yang ada di wilayah Selatan selain negara di wilayah Utara seperti Norwegia yang merupakan salah satu importir terbesar Inggris.

Pendapat ketiga sebagaimana dikemukakan Michael T.Klare diatas adalah adanya kekhawatiran terhadap serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak, teroris, dan ekstrimis. Pendapat ketiga inilah yang kemudian membuat Inggris merasa terancam selain keamanan dan kedaulatan, tindakan pada poin ketiga ini juga merupakan ancaman serius. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas antara pihak keamanan (dalam hal ini pihak militer) dengan pemerintah. Maka dalam hal ini, langkah Inggris yang diformulasikan antara pemerintah dengan Dewan Keamanan Nasional (NSC) adalah memasukkan agenda *energy security* dalam kerangka tugas Angkatan Bersenjata. Implementasinya adalah dengan melakukan misi bersama NATO berlayar mengitari perairan Afrika seluas 12.500 mil dengan tujuan mendukung terciptanya kondisi keamanan melalui pendekatan internasional dalam hal mengamankan suplai energi sebagaimana prioritas utama NATO. Selain itu Inggris juga menganggarkan dana sebesar 450.000 Poundsterling untuk mengamankan wilayah perairannya dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kaya akan kandungan energi bekerjasama dengan lembaga terkait dibawah naungan NSC.

Penulis berpendapat bahwa kekhawatiran Inggris pada poin ketiga tersebut cukuplah beralasan. Misi yang dilaksanakan bersama NATO merupakan langkah yang tepat, mengingat tidak jarang perairan Afrika merupakan jalur yang rawan akan tindak kejahatan seperti pembajakan yang dilakukan oleh para teroris, pemberontak, dan ekstrimis terutama bagi kapal pengangkut minyak dan kargo Inggris. Pengamanan terhadap ZEE dan wilayah perairan juga merupakan suatu terobosan yang beralasan. ZEE yang merupakan salah satu jantung utama Inggris dari segi pasokan energi dan ekonomi mengambil peranan penting. Jika jalur pasokan energi dan wilayah perairan ZEE tidak mendapatkan prioritas pengamanan yang maksimal dikhawatirkan akan mempermudah para teroris dan pemberontak memasuki wilayah tersebut. Dampaknya, jika para teroris berhasil menguasai jalur minyak dan ZEE maka bisa dimungkinkan kondisi stabilitas Inggris akan terganggu.

Michael T. Klare juga memandang bahwa masalah *energy security* dapat mempengaruhi sikap dan tindakan politik luar negeri suatu negara. Hal ini terjadi pula pada Inggris yang pada awalnya merupakan salah satu negara eksportir sumber energi Eropa perlahan mulai menjadi negara importir. Akibat adanya pasokan energi yang menurun Inggris pun, seolah cenderung menjadi negara yang sangat aktif dalam berbicara masalah energi baik di tingkat regional maupun global. Dalam tataran regional Eropa, Inggris menjadi negara yang secara aktif menolak strategi politik harga minyak Rusia. Selain itu Inggris juga menerapkan strategi dengan menkankan pada metode liberalisasi pasar energi bagi negara-negara Uni Eropa. Upaya pemerintah Inggris bersama Dewan Keamanan Nasional Inggris (NSC) dalam mengamankan sumber energi melalui operasi dan misi dengan NATO menandakan bahwa Inggris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian masalah *energy security* dalam politik luar negerinya.

BAB V KESIMPULAN

Setelah mengkaji alasan Inggris membentuk NSC (*National Security Council*) di tahun 2010, dapat terlihat motivasi Inggris sebagai sebuah negara yang ingin mempertahankan negaranya dari setiap ancaman. Sistem internasional yang anarki mengharuskan setiap negara untuk tetap *survive* dari segala bentuk ancaman yang muncul, karena bentuk ancaman saat ini lebih bervariasi tidak hanya berbentuk ancaman fisik namun juga ancaman *cyber* dan ancaman kemanusiaan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan sebuah langkah preventif untuk menghalau segala bentuk ancaman yang datang, pembentukan NSC di Inggris merupakan salah satu langkah preventif pemerintah Inggris dalam menghadapi ancaman. Langkah yang dilakukan pemerintah Inggris ini merupakan langkah yang tepat dalam menghalau segala ancaman, seperti yang penulis kaji dalam bab empat terdapat tiga alasan utama mengapa Inggris perlu membentuk NSC : (1) Menjaga keamanan dan kedaulatan nasional; (2) Memperkuat Aliansi dengan NATO dan Uni Eropa; (3) Menjaga Sumberdaya Mineral. Tiga alasan utama Inggris dalam membentuk Dewan Keamanan Nasional tersebut menunjukkan bahwa dalam konstelasi dunia hubungan internasional masih dipenuhi ketidakpastian, diperlukan sebuah koordinasi antar institusi keamanan demi terciptanya stabilitas keamanan dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Dewan Keamanan Nasional menjadi sebuah forum antar lembaga strategis negara dalam menyusun rencana strategis keamanan nasional yang dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri secara langsung, dengan adanya Dewan Keamanan Nasional ini diharapkan komunikasi antar lembaga strategis negara bisa berjalan lebih efektif. Dengan terjalinnya koordinasi antar lembaga strategis negara dapat memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional yang tepat dan efektif. Pembentukan NSC merupakan langkah tepat bagi pemerintah dalam mengkoordinasi lembaga-lembaga strategis negara dalam merumuskan kebijakan serta langkah antisipatif terhadap ancaman keamanan dan kedaulatan negara khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Buzan, Barry.1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Sussex: WHEATSEAF BOOK.
- Buzan, Bary. 2007.*International Security vol. III :Widening Security*. London: SAGE Publications. Ltd.
- Copeland, Dale. 2000. *The Origins of Major War*. New York: Cornell University Press.
- Cradock, P. 1997. *In Pursuit of British Interests*. London: John Murray.
- Danopoulos, Constantine P. and Watson, Cynthia. 1996. *The Political Role of the Military : An International Handbook*. London : Greenwood Press.
- Dennis, Norman. et.al. 2003. *The Failure of Britain's Police : London and New York Compared*. Wiltshire : The Cromwell Press.
- Djelantik Sukawarsini. 2010. *Terorisme : Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eby Hara, Abubakar. 2011.*Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Evans and Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.
- Griffiths, Martin (eds). 2007. *International Relation Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.
- Habib, A. Hasnan. 1997. *Kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Hakim, Chappy. 2012. *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia*. Jakarta : Red & White Publishing.
- Hastings M, & Jenkins S, 2012, *Battle for the Falklands*, London: Pan Macmillan.
- Hennessy, P. 2002. *The Secret State: Preparing for the worst 1945-2010*. London : Penguin.
- Hiscock, Geoff. 2012. *Earth Wars : The Battle for Global Resources*. Singapore : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Jackson, Robert & Sorensen, George.2009.*Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi : Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Johnson, Loch K. 2007. *Handbook of Intelligence Studies*. New York : Routledge.
- Kartono, Kartini. 1990. *Metodologi Riset*. Bandung: CV.Mandar Maju. Hal.63
- Kopp, Sandu-Daniel. 2014. *Politics, Markets and EU Gas Supply Security : Case Studies of the UK and Germany*. Berlin : Springer VS.
- Luft, Gal and Korin, Anne. 2009. *Energy Security Challenges for the 21st Century : A Reference Handbook*. California : ABC-CLIO.
- Nugroho, Riant. 2014. *National Security Policy : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Perry, Marvin. 2013. *Peradaban Barat : Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global (terjemahan)*. Bantul : Kreasi Wacana.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochammad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Phillips, Charles dan Axelrod, Alan. 2006. *Encyclopedia of Historical Treaties and Alliances, Second Edition*. New York : Facts On File.
- Rosenau, James N.1976. *World Politics: An Introduction*. New York: Free Press.
- Rudy, Teuku May. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung : Refika Aditama.
- Salmon, Trevor C. 2008. *Issues in International Relation, Second Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.

- Samego, Indria. 2001. *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara : Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta : The Habibie Center.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wall, S. 2008. *A Stranger in Europe: Britain and the EU from Thatcher to Blair*. Oxford: OUP.
- Wilkinson, Paul. 2007. *Homeland Security in the UK : Future preparedness for terrorist attack since 9/11*. New York : Routledge.
- William, Paul.D. 2008. *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta : CAPS.
- Wolfer, Arnold. 1968. Alliances. In David L. Sills, ed., *International Encyclopedia of the Social Science*. New York: Macmillan.

Journal, Paper dan Publikasi ilmiah :

- Anggoro, Kusnanto. 2013. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM-RI di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003
- Bangham, George and Shah, Sarang. “*The National Security Council and the Prime Minister*”. Policy Research Paper of The Wilberforce Society. March 2012.
- Bird, Jenny. 2007. *Energy Security in the UK*. London : Institute for Public Policy Research.
- Cabinet DOPC. 1979. *Northern Ireland: The overall situation, The Margaret Thatcher Foundation*.
- Cabinet Office. 2011. *The UK Cyber Security : Strategy Protecting and Promoting the UK in a Digital World*. London : Crown.
- Conservative Party,2010, *A Resilient Nation: National security green paper – policy green paper No.13*, London: Conservative Party. Hal. 09

- D.E Highley, et.al. 2004. *British Geological Survey report CR/04/070N : The Economic Importance of Minerals to the UK*. Nottingham : Hawthornes.
- Davies, P. 2011. 'Twilight of Britain's Joint Intelligence Committee?' *International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence*. No. 24 vol. 3.
- Deavanny, Joe and Harris, Josh. 2013. *The National Security Council : National Security at the Centre of Government*. London : King's College London.
- Directorate-General Security Policy. (Tanpa Tahun). *Overseas Territories: The Ministry of Defence's Contribution*. London : Ministry of Defence.
- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. 2005. "The Impact of 7 July 2005 London Bomb Attacks on Muslim Communities in the Eu". Vienna : EUMC.
- Fengand, Liu dan Ruizhuang, Zhang. *The Typologies of Realism. Chinese Journal of International Politics*. Vol. 1 , 2006, pp.109–134.
- Gooch, J., 'Sir George Clarke's career at the Committee of Imperial Defence', *The Historical Journal*, vol.18, no.3, 1975, p.557
- Goodman, M. 'Learning to Walk: The origins of the UK's Joint Intelligence Committee', *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, vol.21(1), 2007, pp.40-56.
- Gordon, D.C. 1962. 'The Colonial Defence Committee and Imperial Collaboration: 1885-1904' *Political Quarterly*, Vol.77, No.4 (December), pp.526-545
- Guzzeti, Luca. 1995. *A Brief History of European Union Research Policy*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Irvan Ollii, Mohammad. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime". *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I September 2005.
- Johnson, F.A. 1961. 'The British Committee of Imperial Defence: Prototype of U.S. Security Organization'. *The Journal of Politics*, Vol.23, No.2 (May), p.235
- Kuznicki, Michele et.al. (Tanpa Tahun). *Terrorism: Irish Republican Army. Domestic and Foreign Terrorism* . Eastern Michigan University.

- Lasswell, Harold D. 1936. *Politics: Who Gets What, When and How*. New York: McGraw-Hill.
- Nagan, Winston P. & M.Haddad, Aitza. "Sovereignty in Theory and Practice". San Diego International Journal (Vol.13: 429, 2012).
- Nagan, Winston P. and Hammer, Craig. "The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations". naskah yang disampaikan Winston P. Nagan dalam kuliah umum 8 March 2003 pada University of Asmara - Eritrea.
- National Crime Agency. 2014. *National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime 2014*. London : Crown.
- NATO International Military Staff. 2006. *The Beginnings Of NATO's Military Structure: Birth Of The Alliance To The Fall Of The Berlin Wall*. Brussels : NATO Public Diplomacy Division.
- NATO. 2013. *NATO in Focus : An Introduction to the Transatlantic Alliance*. Brussels : NATO Public Diplomacy Division.
- Naylor, J.F., 'The Establishment of the Cabinet Secretariat', *The Historical Journal*, vol.14, no.4, 1971., Hal.783
- Neville-Jones, P., 2006. *Security Issues: Interim position paper, National and International Security Policy Group, Conservative Party*.
- Rivzvi, Hasan-Azkari. 2012. "National Security Council : A Debate on Institutions and Processes for Decision Making on Security Issues." PILDAT Discussion Paper. Civil-Military Relation. April 2012.
- Sarita Divedi, Sangit. 2012. "Alliances in International Relations Theory". International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. Vol.1 Issue 8.
- Schweller, Randall L. *Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In*. *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), pp. 72-107.
- Stanbridge, B.G.T., 'The Chiefs of Staff Committee: 50 years of joint direction', *RUSI Journal*, 118.4, 1973, pp.25-31.
- Strachan, H., 'A War Examined: Allies and ethics: British national strategy: Who does it?', *Parameters*, vol.43 (2), 2013, Hal.49

Taliaferro, Jeffrey W. *Security Seeking under Anarchy*. *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01)

U.S Energy Information Administration. 2014. *Energy Analysis of United Kingdom*. Washington D.C: U.S Energy Information Administration.

Waltz, Kenneth N. *Structural Realism After the Cold War*. *International Security*, Vol. 25, No.1 (Summer 2000).

Waltz, Kenneth N. *The Emerging Structure of International Politics*. *International Security*, Vol.18, No.2 (Autumn, 1993).

Wilson, O.W. "The British Police". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Volume 40|Issue 5.

World Bank. 2011. *World Development Indicators database: Gross Domestic Product 2010*. Washington D.C: World Bank.

Media Cetak :

Abdul Manan. "Fokus Baru Intel Amerika". *Tempo* edisi 10-16 Juni 2013.

Blitz, J. 'National security chief planned'. *Financial Times*. Edisi Jumat 16 April 2010.

Tim Redaksi. "Dewan Keamanan Nasional : The National Security Council Of United Kingdom." *Defender*. Edisi 57/2012

Tim Redaksi. "Kota yang Kian Padat". *Tempo* edisi 10-16 Juni 2013.

Tim Redaksi. "Peretas Cina Curi Info Jet Canggih Inggris". *Defender*. Edisi 67/2013.

Tim Redaksi. "Poros Baru". *Tempo* edisi 20-26 April 2015.

Tim Redaksi. "Undang-undang Kamnas Inggris : Perspektif Perbandingan". *Defender*. Edisi 56/2012.

Internet :

A Kishalanky, Mark. 2014. United Kingdom : Land and People.

<http://www.britannica.com/place/United-Kingdom/Plant-and-animal-life#toc44682> . (Diakses pada, 16 Juni 2015)

- Andrew, Christopher. 2014. MI5: Changes and Reforms.
<https://www.mi5.gov.uk/home/about-us/who-we-are/mi5-history/mi5-today/changes-and-reforms.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)
- BBC News. 2007. 'New JIC chair William Ehrman profiled'.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3911385.stm
- BBC News. In Depth London Attack.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/London_blast/what_happened/html/ (diakses pada 30 Oktober 2015)
- BBC UK. 2010. Cameron Chairs First UK Security Council Meeting.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8679082.stm. (Diakses pada : 02 Juli 2014).
- BBC. 1998. The Troubles Thirty years of conflict in Northern Ireland, 1968 – 1998. <http://www.bbc.co.uk/history/troubles> (Diakses pada 17 Juni 2015).
- BBC. 2014. 7 July Bombings : Overview.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/what_happened/html/. (Diakses pada 16 Juni 2015).
- Britannica Encyclopedia. 2014. The Royal Air Force (RAF) British Air Force.
<http://www.britannica.com/topic/The-Royal-Air-Force>. (Diakses pada : 29 Juli 2015)
- Brown, C.2004. 'Lord Butler lambasts Blair over bad government', *The Independent*,
<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/lord-butler-lambasts-blair-over-bad-government-6156229.html>
- Cabinet Office, 2010, *Notes on the Central Intelligence Machinery Division of Cabinet Office Records and Other Intelligence-related Cabinet Office Records*,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60940/notes-on-cim-division.pdf
- Cowell-Meyers dan Arthur, Paul Kimberly. 2014. Irish Republican Army (IRA).
<http://www.britannica.com/topic/Irish-Republican-Army> (Diakses pada 17 Juni 2015).
- Davey, Edward. 2014. How the United Kingdom Pursues Energy Security.
<http://www.iea.org/ieaenergy/issue6/how-the-united-kingdom-pursues-energy-security.html> (Diakses pada 13 Februari 2016, 20:15)

- Desyana, Cornila. 2013. Sebanyak 863 Imigran Gelap Serbu Inggris. <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/01/07/117452652/sebanyak-863-imigran-gelap-serbu-Inggris>. (Diakses pada 19 Juni 2015).
- History UK. 2005. 7/7 London Bombings. <http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/77-london-bombings>. (Diakses pada 17 Juni 2015).
- History UK. 2015. 1918 : British Royal Air Force is Founded. <http://www.history.com/this-day-in-history/british-royal-air-force-is-founded>. (Diakses pada : 29 Juli 2015)
- HM, Andika. 2010. Kabinet Cameron Berkonsolidasi. http://news.okezone.com/read/2010/05/14/18/332468/index_news.html. (Diakses pada : 02 Juli 2014).
- Hodge, Katie. 2013. Government Faces Around 33,000 Cyber Attacks A Month, Reveals Cabinet Office Minister Chloe Smith. <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-faces-around-33000-cyber-attacks-a-month-reveals-cabinet-office-minister-chloe-smith-8584636.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).
- Hoffman, Bruce. 1998. Inside Terrorism. <http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html>. (Diakses pada : 16 Juni 2015).
- Home Office. 2011. *Policy Paper: Counter-terrorism strategy (CONTEST)*, <https://www.gov.uk/government/publications/counter-terrorism-strategy-contest>
- Institute for Government & Libra Advisory Group, 2010, 'Written evidence submitted by the Institute for Government and the Libra Advisory Group (GS06)', <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmpubadm/memo/grandstrat/gso6.htm> (Diakses pada 19 September 2016)
- J, Lucy. 2011. The Impact of 9/11 In Britain. <http://mic.com/articles/1643/the-impact-of-9-11-in-britain> (Diakses pada 16 Juni 2015).
- Johnson, Ben. 2013. Sir Robert Peel. <http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Sir-Robert-Peel/> (Diakses pada : 25 Juli 2015)
- Jones Sam. 2014. UK Prime Cyber Attack Target Of Europe And Middle East. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7023c2d4-5481-11e4-bac2-00144feab7de.html#axzz3dIAIxQ5b>. (Diakses pada 19 Juni 2015).

- Kelner, Petter. 2014. United Kingdom. <http://www.britannica.com/place/United-Kingdom>. (Diakses pada, 16 Juni 2015).
- Merriam Webster Dictionary. 2015. www.merriam-webster.com/dictionary/strategy (diakses 04 Maret 2015)
- Monda, Puja. 2010. Mineral Resources: Definition, Types, Use and Exploitation (with statistics and diagram). <http://www.yourarticlelibrary.com/environment/minerals/mineral-resources-definition-types-use-and-exploitation-with-statistics-and-diagram/28169/>. (Diakses pada : 17 Januari 2016, 14:24)
- Nation Encyclopedia. 2015. United Kindom. <http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Slovenia-to-Zimbabwe-Cumulative-Index/United-Kingdom.html>. (Diakses pada, 16 Juni 2015).
- National Crime Agency. 2013. National Crime Agency : About Us. <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us>. (Diakses pada : 28 Juli 2015)
- Naylor, J.F. 2004. '*Hankey, Maurice Pascal Alers, first Baron Hankey (1877–1963)*', Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, 2004; online edn, Jan 2008 <http://www.oxforddnb.com/view/article/33683>.
- Nile Gardiner dan James Phillips. 2005. The London Bombings: How the U.S. and the U.K. Should Respond. <http://www.heritage.org/research/reports/2005/07/the-london-bombings-how-the-us-and-the-uk-should-respond>. (Diakses pada 17 Juni 2015).
- Perlo-Freeman, Sam et.all.2011. Appendix 4A. Military expenditure data, 2001–10. <http://www.sipri.org/yearbook/2011/04/04A>
- Royal Air Force. 2015. Royal Air Force Strategy. <http://www.raf.mod.uk/role/Strategyprototype.cfm> (Diakses pada : 23 Juli 2015)
- Royal Navy. 2015. Royal Navy : Protecting Our Economy. <http://www.royalnavy.mod.uk/what-we-do/protecting-our-economy> (Diakses pada 12 Juli 2015).
- Royal Navy. 2015. Royal Navy : Ready to fight <http://www.royalnavy.mod.uk/what-we-do/ready-to-fight> (Diakses pada 12 Juli 2015).

- The Irish Times. 2004. World Leader React.
<http://www.irishtimes.com/news/world-leaders-react-1.1135175>
- The Secret Intelligence Service. 2014. Our Roles and Responsibilities.
<https://www.sis.gov.uk/about-us/what-we-do.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)
- The Secret Intelligence Service. 2014. UK National Security Strategy.
<https://www.sis.gov.uk/about-us/what-we-do/uk-national-security-strategy.html>. (Diakses pada 11 Juli 2015)
- Trueman, C.N. 2014. A History of the European Union and Great Britain.
<http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/a-history-of-the-european-union-and-great-britain/>. (Diakses pada : 17 Januari 2016)
- Turner, Camilla. 2015. Forty Illegal Immigrants a Day Arrested in Britain.
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11517668/Forty-illegal-immigrants-a-day-arrested-in-Britain.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).
- UK Government. 2014. Oil and Gas UK Field Data. www.gov.uk/oil-and-gas-uk-field-data. (Diakses pada : 20 Januari 2016, 19:25).
- UK Government. 2014. The UK's work in Afghanistan.
<https://www.gov.uk/government/publications/uks-work-in-afghanistan/the-uks-work-in-afghanistan>. (Diakses pada 12 Juli 2015).
- UK Government. 2015. United Kingdom Joint Delegation to NATO.
<https://www.gov.uk/government/world/organisations/uk-joint-delegation-to-nato> (Diakses pada : 17 Januari 2016, 13:25)
- Victoria, Jepson. 2012. Identify the Major Differences between Classical Realism and Neo-realism,
<http://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/>(Diakses pada 15 Mei 2014)
- Whitehead, Tom. 2012. Britain Is Being Targeted By Up To 1,000 Cyber Attacks Every Hour.
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9624655/Britain-is-target-of-up-to-1000-cyber-attacks-every-hour.html>. (Diakses pada 19 Juni 2015).
- Yansyah. 2014. Ancaman terorisme, Inggris Umumkan Status “Genting”
<http://www.harianaceh.co/read/2014/08/30/35206/ancaman-terorisme-Inggris-umumkan-status-genting> (Diakses pada 17 Juni 2015).